

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2009



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
TAHUN 2008**

DAFTAR ISI

PERATURAN WALIKOTA DEPOK NO.12 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DEPOK TAHUN 2009

LAMPIRAN 1 : PERATURAN WALIKOTA DEPOK NO.12 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DEPOK TAHUN 2009

BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Landasan Hukum	2
1. 3 Maksud dan Tujuan	3
1. 4 Sistematika Dokumen RKPD	4
BAB II EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2007	6
2. 1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah	6
2. 2 Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah	6
2. 2. 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	7
2. 2. 2 Titik Kemacetan	8
2. 2. 3 Titik Banjir	9
2. 2. 4 Cakupan Layanan Air Bersih	9
2. 2. 5 Unit Pengelolaan Sampah	9
2. 2. 6 Kawasan Kumuh	10
2. 2. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi	10
2. 2. 8 Pendapatan Asli Daerah	11
2. 2. 9 Indeks Pembangunan Masyarakat	11
2. 3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2007	15
2. 4 Isu Strategis dan Masalah Mendesak	17
2. 4. 1 Pelayanan Publik	18
2. 4. 2 Kemiskinan	21
2. 4. 3 Transportasi	23
2. 4. 4 Pelayanan Persampahan	23
2. 4. 5 Pemberdayaan Masyarakat	25
2. 4. 6 Tata Ruang	25
2. 4. 7 Air Bersih	26
2. 4. 8 Banjir	26
2. 4. 9 Investasi	27
2. 4. 10 Pemilu	27
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH	29
3. 1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2007 dan Perkiraan Tahun 2008	29
3. 2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2009	31
3. 3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	31
3. 4 Analisis dan Perkiraan Sumber Pendanaan Daerah	32
3. 4. 1 Pendapatan Asli Daerah	32
3. 4. 2 Dana Perimbangan	33
3. 4. 3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	34
3. 4. 4 Belanja Daerah	35
3. 4. 5 Pembiayaan Daerah	36
3. 5 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	37
3. 5. 1 Pendapatan Daerah	37
3. 5. 2 Belanja Daerah	38
3. 5. 3 Pembiayaan Daerah	40

BAB IV	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009	41
BAB V	RENCANA KERJA	47
BAB VI	KAJIAN PELAKSANAAN	48
LAMPIRAN 2	: PRIORITAS PROGRAM DAN SKPD PELAKSANA	
LAMPIRAN 3	: RENCANA KERJA MENURUT BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN ANGGARAN 2009	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Capaian Indikator Makro Kota Tahun 2007	9
Tabel 2. 2	Capaian Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Depok Tahun 2007	16
Tabel 2. 3	Realisasi Langsung Tiap-tiap Urusan Pemerintah Kota Depok Tahun 2007	20
Tabel 2. 4	Jumlah Penduduk Miskin Kota Depok Tahun 2006	30
Tabel 2. 5	Proyeksi Timbulan Sampah Kota Depok (2005-2010)	33
Tabel 3. 1	Distribusi Persentase PDRB Kota Depok Tahun 2003-2006 Atas Dasar Harga Berlaku	41
Tabel 3. 2	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah APBD Kota Depok Tahun 2004-2008	45
Tabel 3. 3	Perkembangan Dana Perimbangan APBD Kota Depok Tahun 2004-2008	45
Tabel 3. 4	Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah APBD Kota Depok Tahun 2004-2008	47
Tabel 3. 5	Perkembangan Pendapatan APBD Kota Depok Tahun 2004-2008	47
Tabel 3. 6	Perkembangan Belanja APBD Kota Depok Tahun 2004-2008	48
Tabel 3. 7	Perkembangan Rincian Belanja APBD Kota Depok Tahun 2004-2008	49
Tabel 3. 8	Perkembangan Pembiayaan APBD Kota Depok Tahun 2004-2008	49



WALIKOTA DEPOK

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DEPOK TAHUN 2009

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2006-2011 dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006;
- b. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok untuk Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 sebagaimana dimaksud pada huruf b, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang...

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

25. Peraturan.....

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
26. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
27. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
32. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 45);
33. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2006 – 2011 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor 02);
34. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);

35. Peraturan

35. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
36. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DEPOK TAHUN 2009.**

Pasal 1

- (1). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2009 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2006-2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006.
- (2). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat evaluasi pembangunan tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi, isu strategis, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2009.

Pasal 2...

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2007
- BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
- BAB IV : PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2009
- BAB V : RENCANA KERJA
- BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4....

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 29 Oktober 2008

WALIKOTA DEPOK,

ttd

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 29 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd

Dra. WINWIN WINANTIKA, MM
NIP. 480 093 043

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2008 NOMOR 12

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



TAHUN 2008 NOMOR 12

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA DEPOK TAHUN 2009
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2006-2011 dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006;
- b. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok untuk Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 sebagaimana dimaksud pada huruf b, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang ...

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 29 Oktober 2008
TENTANG : RKPD KOTA DEPOK TAHUN 2009

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan daerah adalah upaya berkesinambungan yang dilaksanakan oleh semua komponen daerah untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada RKP Nasional. Sebagai penjabaran dari RPJMD, RKPD berkedudukan strategis karena menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dengan demikian, RKPD berperan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah. Secara garis besar dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun Anggaran 2009 merupakan pelaksanaan tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2006-2011. RKPD Kota Depok disusun melalui pendekatan teknokratis, demokratis dan partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top-down*. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh suatu dokumen perencanaan yang tidak hanya memenuhi syarat teknis perencanaan, namun juga memperoleh dukungan masyarakat dalam implementasinya. Substansi RKPD adalah program dan kegiatan dari SKPD, oleh karena itu proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Selanjutnya RKPD akan menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD.

Terdapat delapan tahapan proses penyusunan RKPD, yaitu 1) Persiapan dan pengorganisasian pemangku kepentingan, 2) Penyusunan rancangan awal RKPD, 3) Penyusunan rancangan Renja SKPD, 4) Penyusunan Rancangan RKPD, 5) Musrenbang, 6) Penyusunan rancangan akhir RKPD, 7) Penyiapan dan penetapan Peraturan RKPD, dan 8) Pengintegrasian RKPD kedalam proses penganggaran daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok disusun berdasarkan:

- 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
- 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6 Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;
- 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 11 Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerinah Daerah Kabupaten/Kota.
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 20 Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009;
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.
- 25 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok tahun 2000-2010;
- 26 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2006-2011;
- 27 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok tahun 2006-2025;
- 28 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2009 dimaksudkan untuk:

- a. Menjabarkan rencana strategis sebagaimana tercantum dalam RPJMD ke dalam rencana operasional tahun 2009.
- b. Mengarahkan proses penyusunan Renja dan RKA SKPD tahun 2009.
- c. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD tahun 2009.
- d. Menjadi instrumen untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah.
- e. Menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah.
- f. Menjadi instrumen pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja pelayanan SKPD.
- g. Menjadi instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.
- h. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah.
- i. Mewujudkan sinergitas antara program dan anggaran, antara pelaksanaan dan pengawasan, serta efisiensi alokasi sumberdaya

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar urusan pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2009, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang pengertian, proses penyusunan dan kedudukan RKPD, keterkaitannya dengan RPJMD, Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan uraian tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Depok tahun 2009.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

1.4. Sistematika

Menjelaskan isi bahasan tiap bab dalam RKPD.

BAB II. EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2007

Menjelaskan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kedudukan RKPD tahun 2009 dalam kerangka pembangunan jangka menengah, capaian kinerja makro dan indikator kesejahteraan rakyat tahun sebelumnya, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu, serta isu strategis/aktual yang berkembang dan masalah yang mendesak ditangani.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, antara lain mencakup indikator pertumbuhan sumber ekonomi daerah, sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan perekonomian daerah, arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009

Menjelaskan prioritas pembangunan daerah berdasarkan isu strategis dan masalah yang mendesak, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB V. RENCANA KERJA

Menjelaskan program dan kegiatan pokok RKPD, instansi pelaksana, indikator capaian tiap-tiap program dan kegiatannya yang disusun berdasarkan pada program dan kegiatan yang dikelompokkan dalam rumpun Urusan Wajib dan Pilihan Pemerintah Daerah.

BAB VI. KAIDAH PELAKSANAAN

Memuat kaidah pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan RKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh SKPD dan pelaku pembangunan lainnya.

BAB II

EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2007

2.1. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2006-2011, Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Depok adalah

“Menuju Kota Depok yang Melayani dan Mensejahterakan”

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut :

Pertama, Mewujudkan pelayanan yang ramah, cepat dan transparan.

Kedua, Membangun dan mengelola sarana dan prasarana infrastruktur yang cukup, baik dan merata.

Ketiga, Mengembangkan perekonomian masyarakat, dunia usaha dan keuangan daerah.

Keempat, Meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan nilai-nilai agama.

RKPD tahun 2009 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kota Depok 2006-2011 dengan program dan kegiatan pokok sesuai yang tercantum dalam arahan RPJMD dengan prioritas sesuai dengan dinamika yang berkembang. Selain itu program dan kegiatan juga diselaraskan dengan arahan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2009.

2.2. Evaluasi Status dan Kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah.

Sebagai landasan dan sekaligus untuk menjamin kesinambungan program tahun 2009 dengan tahun sebelumnya, maka perlu dilakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan daerah sampai saat ini. Status dan kedudukan pencapaian kinerja ini juga penting untuk mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai terhadap target kinerja yang diamanatkan oleh RPJMD. Berdasarkan indikator makro Kota Depok Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam RPJMD, pencapaian kinerja pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Capaian Indikator Makro Kota Tahun 2007

No	Misi	Indikator	Tahun 2007	Keterangan
1	Mewujudkan pelayanan yang ramah, cepat dan transparan,	Indeks Kepuasan Masyarakat	71,17 %	Sebagai data awal, dan termasuk kategori Baik menurut Menpan
2	Membangun dan mengelola sarana dan prasarana infrastruktur dasar yang cukup, baik dan merata.	Titik macet	2 titik	Sesuai target
		Titik banjir	1 lokasi	Sesuai target
		Layanan air baku	637 SR	Tidak tercapai target
		Unit Pengolahan Sampah	0	Tidak tercapai target
		Kawasan kumuh	3 lokasi	Sesuai target
3	Mengembangkan perekonomian masyarakat, dunia usaha dan keuangan daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,65	Melampaui target
		Pendapatan Asli Daerah	14,43 %	Melampaui target
4	Meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan nilai-nilai agama.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,1	Melampaui target

2.2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya (SK Menpan No.

25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah).

Melalui kegiatan Kajian IKM Kota Depok terhadap 21 jenis pelayanan Pemerintah Kota Depok oleh SKPD, diperoleh preferensi positif dari masyarakat Kota Depok, yaitu dengan didapatkannya nilai IKM sebesar 71,17 %. Menurut Kep-Menpan angka ini masuk dalam kategori BAIK. Ada empat kategori tingkatan pelayanan menurut SK Men-PAN tersebut, yaitu: *tidak baik* (nilai 25-43,75), *kurang baik* (nilai 43,76-62,5), *baik* (62,51-81,25), dan *sangat baik* (81,26-100,00). Terdapat 14 (empat belas) unsur pelayanan yang dinilai, yaitu : prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggungjawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, dan keamanan pelayanan.

Nilai IKM yang diperoleh di atas merupakan *base line* data (data awal) karena belum tersedia sebelumnya, oleh karena itu belum bisa dijadikan indikator keberhasilan pembangunan di bidang pelayanan Tahun 2007. Penilaian baru bisa dilakukan pada tahun berikutnya dengan target kinerja harus naik sebesar 2,5 % dari nilai saat ini. Namun demikian, angka itu penting untuk mengetahui posisi pelayanan Pemerintah Kota Depok saat ini di tengah tuntutan besar dari masyarakat yang menghendaki pelayanan prima. Meskipun masuk dalam kategori Baik, tetap diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan, khususnya pada jenis pelayanan yang relatif rendah nilai capaiannya, seperti pelayanan pasar, infrastruktur jalan, serta beberapa pelayanan perijinan.

2.2.2 Titik Kemacetan

Penanganan permasalahan transportasi kota Depok meliputi berbagai hal seperti peningkatan kinerja penataan ruang, pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan infrastruktur transportasi serta pengembangan manajemen transportasi termasuk pengembangan transportasi publik /moda transportasi massal. Penanganan permasalahan kemacetan lalu-lintas di suatu titik tertentu, tidak dapat hanya ditangani di lokasi tersebut saja, namun juga meliputi penanganan infrastruktur dan manajemen lalu-lintas pada lokasi-lokasi lain yang mempengaruhinya, termasuk didalamnya peningkatan disiplin pengguna jalan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengatasi problema kemacetan yang menjadi sasaran.

Fokus penanganan kemacetan pada Tahun 2007 adalah dua titik di pusat kota yaitu: 1) Simpang Jalan Kartini – Dewi Sartika; dan 2) Ruas Margonda segmen I – AR. Hakim, dengan melakukan pembangunan infrastruktur jalan pada beberapa ruas terkait, yang dipadukan dengan pembiayaan infrastruktur yang berasal dari Pemerintah Pusat. Sejalan dengan pembangunan Fly-over AR Hakim oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Depok pada Tahun 2007 telah melaksanakan pelebaran ruas Jalan Margonda Segmen-1 yang dimulai dari simpang Kartini hingga simpang Ramanda. Dengan dioperasionalkannya fly-over pada bulan Maret 2008, masyarakat dapat merasakan berkurangnya permasalahan kemacetan pada ruas-ruas Jl. Dewi Sartika; Simpang Kartini; Jl. Raya Margonda Segmen-1 hingga Jl. AR. Hakim.

Meskipun berhasil memenuhi target, kompleksitas permasalahan kemacetan kota masih membutuhkan solusi yang lebih komprehensif dan sungguh-sungguh seiring dengan tekanan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor.

2.2.3 Titik banjir

Target penanggulangan masalah banjir yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 adalah tertanggulangnya 1 titik lokasi banjir. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan kegiatan perbaikan tebing dan tanggul kali Sugutamu sepanjang 316,6 m yang memberikan manfaat berkurangnya resiko banjir di perumahan Taman Cipayung, Kec. Sukmajaya. Meskipun berhasil memenuhi target RPJMD, tetapi masih terdapat lokasi yang berpotensi banjir yang harus ditangani secara bertahap oleh pemerintah daerah. Selain itu peran serta masyarakat merupakan faktor pendukung guna mempercepat penanganan banjir di Kota Depok, seperti memelihara kebersihan lingkungan dan selokan.

2.2.4 Cakupan layanan air bersih

Pelayanan Air bersih Kota Depok melalui layanan perpipaan masih cukup rendah jika dibandingkan dengan standar cakupan pelayanan kota metropolitan. Pada Tahun 2006 pelayanan baru mencakup 18,27 % penduduk kota. Penyebabnya antara lain adalah tingginya penggunaan air tanah sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan air bersih oleh masyarakat dengan kualitas air yang masih dapat diterima.

Program peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan Kota Depok dilakukan melalui kerjasama Pemerintah dengan pihak swasta yang telah berjalan 3 (tiga) tahun, sampai pada Tahun 2007 telah dibangun 160.325 m jaringan distribusi primer dan sekunder serta 2.396 Sambungan Rumah (SR). Pada Tahun 2007 sistem jaringan air bersih ditargetkan dapat menambah 1.000 Sambungan Rumah, namun terealisasi sebesar 637 SR (63,7%). Tidak tercapainya target sambungan rumah tersebut disebabkan masih rendahnya minat penyambungan pelayanan air bersih perpipaan, mengingat masyarakat calon pelanggan masih memilih menggunakan air tanah meskipun jaringan distribusi telah tersedia.

2.2.5 Unit Pengelolaan Sampah

Konsep penanganan sampah Kota Depok telah bergeser dari sistem konvensional kepada konsep pengelolaan sampah terpadu yaitu menggabungkan konsep ramah lingkungan dan penanganan skala kawasan. Penanggulangan sampah dikelola sejak di TPS melalui Unit-unit Pengelolaan Sampah (UPS) skala kawasan dan pemilahan serta perlakuan terhadap jenis sampah yang ada. Upaya ini sangat penting untuk mengurangi beban yang diterima oleh TPA Cipayung yang semakin terbatas kapasitasnya. Selain itu, konsep ini dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah serta dapat ditarik keuntungan nilai ekonomis pengelolaan sampah dari proses daur ulang (3R yaitu *reduce*, *reuse* dan *recycling*) dan komposting.

Dalam Tahun 2007 telah dianggarkan pembangunan 10 (sepuluh) UPS yang tersebar di beberapa lokasi. Namun dalam perjalanannya, Pemerintah bersama DPRD telah menyepakati untuk melakukan kajian kelayakannya terlebih dahulu untuk mengetahui pola pembiayaan dan persebaran yang lebih efisien dan efektif, sehingga rencana pembangunan 10 unit UPS tersebut ditangguhkan dan akan dilaksanakan pada tahun 2008 sesuai rekomendasi hasil kajian.

Hasil kajian yang telah diselesaikan pada akhir Tahun 2007, menyimpulkan bahwa pendekatan pengelolaan sampah terpadu melalui pembangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS) layak diterapkan di Kota Depok, dan telah menghasilkan usulan lokasi pembangunan UPS.

2.2.6 Kawasan Kumuh

Cukup banyak kawasan di Kota Depok termasuk kawasan kumuh yang timbul pada lahan-lahan Negara yang dimanfaatkan untuk tempat tinggal secara ilegal (*squatters*). Kondisi rumah maupun kualitas lingkungan pada lokasi-lokasi-lokasi kumuh tersebut sangat buruk, mengingat akses terhadap sarana dan prasarana dasar perkotaan terbatas. Pada Tahun 2007

telah dilaksanakan kegiatan Penataan Sarana dan Prasarana di lokasi 3 kawasan kumuh sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu :

- 1) Kp. Lio Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas, meliputi komponen pekerjaan Betonisasi jalan lingkungan dan pekerjaan saluran di RW 13, 14, 19 dan 20.
- 2) Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis, meliputi komponen pekerjaan Betonisasi jalan lingkungan dan pekerjaan saluran di RW 02, 03, 04, 10, dan 14.
- 3) Kelurahan Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis, meliputi pekerjaan Betonisasi jalan lingkungan dan pekerjaan saluran di RW 03, 05, 07.

Kegiatan di tiga kawasan tersebut mencakup penataan sarana dan prasarana yang komponen pekerjaannya dikembangkan dari hasil perencanaan bersama masyarakat melalui *Community Action Plan (CAP)*. Pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan kapasitas masyarakat dalam upaya perbaikan kondisi lingkungan perumahan dan kontinuitas program.

2.2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan salah satu indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah. LPE dihitung berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Berdasarkan perhitungan BPS Kota Depok (2007), LPE Kota Depok Tahun 2006 (terakhir) adalah 6,65 %, yang berarti melampaui target RPJMD Kota Depok yang telah ditetapkan, yaitu 6,46 %. Laju pertumbuhan sektor yang paling tinggi terjadi pada kelompok tersier (perdagangan dan jasa) yaitu sebesar 7,73 %. Fakta ini mengindikasikan adanya kecenderungan Depok sebagai kota niaga dan jasa yang potensial.

2.2.8 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan di bidang ekonomi terutama sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Berbagai kegiatan intensifikasi yang dilakukan pada tahun 2007 menghasilkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar 14,43 % (target 5 %). Meskipun berhasil melebihi target, upaya peningkatan pencapaian PAD perlu terus dilakukan guna menjawab tuntutan pembangunan yang membutuhkan pembiayaan yang makin besar.

2.2.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau yang disebut sebagai Human Development Index (HDI) merupakan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat menurut UNDP. Berdasarkan kriteria yang diberikan oleh UNDP, daerah akan dikategorikan makmur/sejahtera jika nilai IPM (HDI) diatas 80, sementara untuk nilai berkisar antara 75-80 dikategorikan setengah sejahtera (*middle up*), dan jika nilai IPM (HDI) kurang dari 75 maka masyarakatnya termasuk kategori kurang tingkat kesejahteraannya.

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata dari Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan (Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf), dan Indeks Standar Layak Hidup (Daya Beli). Dari hasil survei IPM Tahun 2007, didapatkan angka IPM sebesar 78,10 (melebihi target : 77,6). Dengan menggunakan indikator yang diberikan oleh UNDP, maka kondisi masyarakat kota Depok telah masuk pada kategori setengah sejahtera (*middle up*). Namun demikian, pada indeks daya beli memerlukan perhatian yang lebih baik di masa mendatang karena sedikit kenaikannya seiring dengan kondisi perekonomian yang relatif sulit, khususnya pada sektor riil.

Selain Indikator Makro Kota, tersedia indikator lain yang bisa digunakan sebagai petunjuk bagi tingkat kesejahteraan masyarakat, yaitu Indikator Kesejahteraan Masyarakat (Inkesra) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tabel 2.2. menunjukkan perkembangan Inkesra dari tahun 2005.

Table 2.2 Capaian Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Depok tahun 2007.

NO	INDIKATOR	2005	2006	KETERANGAN
1	Jumlah penduduk (jiwa)	1.374.522	1.420.478	Prediksi 2007 = 1.470.002
2	Laju pertumbuhan penduduk (%)	3,44	3,42	-Prediksi 2007 =3,49 -Kategori tinggi
3	Komposisi penduduk (%)	50,66 % laki ; 49,34% wanita	50,68% laki2; 49,32% wanita	
4	Tingkat kelahiran (Angka Kelahiran Total)(%)	1,88	2,12	Selama 5 tahun terakhir relatif stabil
5	Tingkat pendidikan (%) : - SMA/ sederajat/SMK - SLTP/ sederajat - SD/ sederajat - Akademi-S3 - Tidak berijazah	34,28 17,56 22,41 15,61 10,14	37,27 17,8 20 11,73 11,7	Proporsi yang berpendidikan SMA meningkat
6	Angka partisipasi murni (%): - SD - SLTP - SLTA	90,85 86,14 67,39	93,08 72,70 58,07	Angka partisipasi murni SD meningkat, sedangkan utk SMP dan SMA turun
7	Angka kematian bayi (AKB)/ Jiwa/ 1000 kelahiran hidup	28,07	27,99	
8	Lamanya menyusui (%): a. 1-5 bulan b. 6-11 bulan c. 12-17 bulan d. 18-23 bulan e. 24 lebih	11 7,73 24,6 9,1 46,98	4,36 13,09 16,83 20,58 45,13	Makin banyak yang menyusui lebih lama
9	Imunisasi (%): a. Ya b. Tidak	Belum tersedia data	97,63 2,37	

(Tabel 2.2. lanjutan)

NO	INDIKATOR	2005	2006	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Status penguasaan rumah : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Milik sendiri ❖ Kontrak ❖ Milik orangtua/saudara/sanak famili ❖ Dinas ❖ sewa Lainnya 	Belum tersedia datanya	67,69 20,37 7,67 2,28 1,72 0,27	.
13	Pengeluaran Rata2 perkapita/bulan (Rp) : <ul style="list-style-type: none"> • Makanan • Non Makanan 	516.755 197.905 318.850	528.629 212.169 316.460	1. Tingkat kesejahteraan dikatakan meningkat bila pengeluaran non makanan sudah lebih dari 60 %. 2. Terdapat penurunan konsumsi non makanan
14	Penduduk menurut pengeluaran/kapita/bulan(%): <ul style="list-style-type: none"> • Kurang dari 150.000 • 150.000-199.999 • 200.000-299.999 • 300.000-499.999 • 500.000 lebih 	1,08 5,65 20,21 38,44 34,62	0,33 1,56 12,58 44,39 41,14	Terjadi peningkatan yg berarti jumlah penduduk yang berpendapatan di atas 300 ribu/bulan/kapita
15	IPM (Indeks Pembangunan Manusia) <ul style="list-style-type: none"> • Angka Harapan Hidup (AHH) • Angka Melek Huruf (AMH) • Rata-rata Lama Sekolah • Daya Beli (PPP) 	77,81 72,97 97,98 10,61 579,52	77,97 73,03 98,35 10,64 579,76	1. IPM mengalami peningkatan dengan semua indikator pendukungnya juga meningkat (semuanya lebih tinggi dibanding rata-rata Jabar) 2. IPM Jabar 70,28 3. AHH Jabar 67,40 4. AMH Jabar 94,90 5. RLS Jabar 7,46 6. Daya beli Jabar 561,10
16	PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)/triliun Rp: <ul style="list-style-type: none"> • Atas Dasar Harga Berlaku • Atas dasar Harga Konstan 	7,541 4,750	8,968 5,066	Meningkat 18,91 % Meningkat 6,65 %
17	LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)/%: <ul style="list-style-type: none"> • Primer • Sekunder • Tersier 	6,96 4,70 8,03 5,98	6,65 -4,27 6,44 7,73	

(Tabel 2.2. lanjutan)

NO	INDIKATOR	2005	2006	KETERANGAN
18	Distribusi Persentase PDRB (Atas dasar harga berlaku) : <ul style="list-style-type: none">• Primer• Sekunder• Tersier	2,99 48,57 48,44	2,65 47,13 50,22	Distribusi Persentase PDRB (Atas dasar harga berlaku) : <ul style="list-style-type: none">• Primer• Sekunder• Tersier
19	PDRB per Kapita/Rp : <ul style="list-style-type: none">• Atas dasar harga berlaku• Atas dasar harga konstan	5.569.813,08 3.508.084,49	6.408.948,60 3.620.579,94	Meningkat 15,07 % Meningkat 3,21 %

Berdasarkan capaian Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kota Depok tahun 2007 di atas, secara umum menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 78,10 (tahun 2007) meningkat dari 77,97 (tahun 2006) di atas rata-rata IPM Jawa Barat 70,76 (tahun 2007) dengan indikator penunjangnya, yaitu : Angka Harapan Hidup (AHH) mencapai 73,06 tahun; Rata-rata Lama Sekolah mencapai 10,66 tahun dan Angka Melek Huruf sebesar 98,52 %; Daya Beli (*Purchasing Power Parity*) sebesar 580,60.

Dalam bidang kesehatan, salah satu ukuran yang menunjukkan derajat kesehatan adalah angka kematian bayi (AKB) yang dihitung berdasarkan rasio jumlah bayi yang mati per 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Hasil perhitungan AKB pada tahun 2005 mencapai 28,07, sedangkan pada tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 27,99 per 1000 kelahiran hidup. Penurunan ini menunjukkan semakin membaiknya derajat kesehatan ibu dan anak di Kota Depok.

Hal yang masih memprihatinkan adalah angka kemiskinan dan pengangguran yang belum mampu diturunkan. Mengingat kompleksnya persoalan ini bukan hanya pada peran pemerintah semata, tetapi juga peran swasta perlu digalakkan untuk bersama pemerintah dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran ini. Sesuai dengan potensi dan

perkembangan penyerapan kerja dari lapangan usaha yang ada, maka strategi pengembangan dan pembukaan lapangan kerja diprioritaskan pada kegiatan jasa (sektor tersier).

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2007

Program dan kegiatan pada tahun 2007 diprioritaskan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (terutama bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan layanan hak-hak dasar masyarakat), peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana perhubungan, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan perekonomian daerah, peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik dan peningkatan kinerja pemerintah daerah. Selain itu juga untuk melaksanakan urusan wajib pemerintahan daerah dan urusan pilihan pemerintah daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2007 dapat dilihat pada realisasi belanja langsung dari tiap urusan berikut ini.

Tabel 2.3. Realisasi Belanja Langsung Tiap-tiap Urusan Pemerintah Kota Depok Tahun 2007

No	Urusan	Realisasi (%)
	WAJIB	75,62
1	Pendidikan	77,67
2	Kesehatan	80,18
3	Pekerjaan Umum	79,27
4	Perumahan	85,03
5	Penataan ruang	90,00
6	Perencanaan pembangunan	84,71

No	Urusan	Realisasi (%)
7	Perhubungan	89,35
8	Lingkungan Hidup	55,78
9	Kependudukan dan catatan sipil	86,37
10	Pemberdayaan perempuan	98,38
11	Keluarga berencana dan Keluarga sejahtera	95,85
12	Sosial	99,41
13	Tenaga kerja	42,20
14	Koperasi dan UKM	92,56
15	Penanaman modal	98,59
16	Kebudayaan	98,90
17	Pemuda dan Olahraga	37,19
18	Kesatuan bangsa dan Politik dalam negeri	95,04
19	Pemerintahan Umum	63,93
20	Kepegawaian	84,63
21	Pemberdayaan masyarakat dan desa	97,61
22	Kearsipan	94,71
23	Komunikasi dan Informatika	94,36
	PILIHAN	81,84
24	Pertanian	81,88
26	Energi dan Sumberdaya Mineral	100
27	Pariwisata	94,71
28	Kelautan dan perikanan	95,54
29	Perdagangan	78,32
30	Perindustrian	99,22
	Jumlah	75,91

**LKPJ 2007*

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2007 terutama disebabkan oleh terlambatnya penetapan APBD akibat perubahan regulasi dari Kepmendagri 29 tahun 2002 menjadi Permendagri 13 tahun 2006 sehingga berdampak pada berkurangnya waktu efektif pelaksanaan kegiatan-kegiatan APBD. Penyebab lainnya adalah keterlambatan transfer anggaran dari tingkat Propinsi maupun Pusat yang menyebabkan tertundanya kegiatan sehingga cenderung menumpuk pada akhir tahun dengan risiko tidak terlaksananya kegiatan.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu dilakukan penganggaran yang lebih tepat waktu, peningkatan kapasitas aparatur baik dalam administrasi keuangan maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan, peningkatan pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan APBD. Beberapa kegiatan prioritas RPJMD yang belum berhasil diwujudkan dan target kinerja yang belum sepenuhnya dapat dicapai, diupayakan terlaksana pada tahun 2008 sehingga tidak menumpuk di tahun 2009.

2.4. Isu Strategis dan Masalah Mendesak

Secara sederhana isu-isu strategis itu dapat dilihat dari nilai dampak yang ditimbulkannya dalam jangka panjang baik terhadap sosial, ekonomi, budaya, ideologi, maupun politik. Penetapan isu strategis yang kemudian diturunkan menjadi arah dan kebijakan strategis serta program strategis harus berdasarkan pendekatan yang benar, yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Dengan demikian penetapan isu strategis hendaknya tidak boleh hanya berdasarkan kasus-kasus yang diangkat oleh sebagian orang yang mungkin hanya berlaku secara lokal, tetapi harus lebih melihat besarnya nilai dampak dari masalah tersebut.

Untuk menetapkan suatu isu menjadi isu strategis, dapat dilakukan melalui beberapa tahapan antara :

1. Pendalaman isu, melalui pemetaan (mapping)
2. Konsultasi Publik
3. FGD (Focus Group Discussion)

Pemetaan isu dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu mana yang benar-benar memiliki dampak sangat luas terhadap IPOLEKSOSBUD dan keamanan/ketertiban masyarakat.

Hal ini dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara satu isu dengan isu lainnya. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan teknik pencarian data-data /informasi di masyarakat dan bukti-bukti empiris. Tahap selanjutnya adalah melakukan konsultasi publik, dengan mendengarkan pendapat dan pandangan masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi. Pada tahap ini juga sekaligus dilakukan *need assesment* terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga penentuan arah kebijakan strategis dan program strategis dalam upaya menyelesaikan isu strategis dapat menjadi lebih efektif.

Focus Group Discussion (FGD) merupakan kelompok diskusi dari para pakar dan *stakeholder* terkait. FGD ini yang sangat menentukan untuk memilih isu-isu mana yang layak dijadikan sebagai isu strategis. Dalam penentuan isu-isu strategis ini representasi FGD dipilih dari pakar, akademisi, LSM, Birokrat, dan masyarakat. Berbagai isu dan masalah yang berkembang dan dihadapi oleh masyarakat dibahas. Setiap peserta diskusi dengan dipandu oleh moderator memberikan saran dan pendapatnya. Moderator mengarahkan, mencatat dan mensistematisir hal-hal penting yang menjadi pandangan bersama, untuk kemudian di sampaikan kepada peserta diskusi untuk mendapatkan tanggapan kembali sebagai bahan resume dari diskusi berupa rumusan isu strategis.

Pada tahun 2009 telah terumuskan beberapa isu strategis, yaitu :

2.4.1 Pelayanan Publik

Hasil pendalaman melalui FGD, konsultasi publik dan pendalaman di lapangan, ada dua sektor yang menjadi isu prioritas dari pelayanan publik, yaitu : pelayanan pada bidang pendidikan dan pelayanan pada bidang kesehatan.

Setiap warga masyarakat berhak mendapatkan pelayanan secara baik, adil, transparan dan akuntabel. Kondisi ini mendorong perubahan paradigma dalam pelayanan pemerintahan, dari semula sangat birokratis menjadi lebih sederhana dan dari fungsional menjadi lebih terpadu. Fakta menunjukkan masih terdapatnya pengaduan masyarakat sebagai pengguna layanan atas ketidakpuasan dari produk layanan yang diterima, seperti prosedur kurang transparan, tingginya biaya pelayanan dan lamanya waktu pelayanan.

Merujuk SK MENPAN nomor 63 tahun 2003, pelayanan publik, atau pelayanan umum, pada dasarnya merupakan, “segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dengan demikian pengertian pelayanan publik sebagaimana dimaksud SK tersebut mempunyai arti yang sangat luas. Pada hakekatnya pelayanan publik merupakan tugas utama dalam administrasi negara yang dilakukan oleh aparatur negara.

Dalam konteks ini pemerintah lebih bertindak sebagai penentu regulasi/aturan dibandingkan sebagai pelaksana semua pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah perlu memberdayakan kelompok masyarakat itu sendiri sebagai penyedia atau pelaksana pelayanan. Dipandang dari sisi masyarakat, tuntutan pelayanan terus mengalami perubahan yang didorong

oleh arus globalisasi. Di samping itu tuntutan masyarakat mempunyai perbedaan yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan dan nilai yang berlaku pada masing-masing individu maupun kelompok masyarakat. Hal ini membuka cakrawala baru bagi aparatur untuk semakin berperan secara lebih baik dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya.

Melalui diterapkannya kebijakan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dilihat dari sisi pelayanan publik, diharapkan alur pelayanan menjadi lebih pendek, dalam arti titik antaran pelayanan menjadi lebih dekat ke masyarakat. Konsekuensi logisnya adalah perlu pelimpahan kewenangan menyangkut pelayanan publik pada tingkatan pemerintah di bawahnya, utamanya pemerintah kecamatan.

Setiap warga masyarakat berhak mendapatkan pelayanan secara baik, adil, transparan dan akuntabel. Kondisi ini mendorong perubahan paradigma dalam pelayanan pemerintahan, dari semula sangat birokratis menjadi lebih sederhana dan dari fungsional menjadi lebih terpadu. Fakta menunjukkan masih terdapatnya pengaduan masyarakat sebagai pengguna layanan atas ketidakpuasan dari produk layanan yang diterima, seperti kurang transparannya prosedur, tingginya biaya pelayanan dan lamanya waktu pelayanan.

Berdasarkan hasil perhitungan, IKM Kota Depok secara keseluruhan sebesar 71,17%. Menurut SK MEN-PAN Nomor : 25/M.PAN/2/2004, angka ini dapat diartikan bahwa menurut persepsi masyarakat kota Depok, layanan publik di Kota Depok tergolong dalam kategori B atau kinerja unit pelayanan baik. Sedang jika dibandingkan antara harapan dan kenyataan, maka meskipun kinerja unit pelayanan sudah baik, tetapi masih ada gap antara nilai kenyataan (71,17%) dengan nilai harapan masyarakat (94,63%) terhadap layanan yang diberikan oleh aparat pemerintah secara keseluruhan yaitu nilai gap negatif sebesar -23,46%. Hal ini berarti kepuasan masyarakat terhadap kinerja unit-unit pelayanan di kota Depok masih belum terpenuhi,

karena pelayanan prima belum dilaksanakan. Dalam organisasi pemerintahan, pelayanan prima menjadi penting karena rakyat adalah pemegang saham dalam organisasi publik, dan harus mendapatkan deviden berupa pelayanan yang memuaskan, sehingga pemerintah memperoleh kepercayaan dan legitimasi yang besar dari masyarakat. Dengan demikian, maka pelayanan yang dilaksanakan oleh SKPD-SKPD seharusnya memuaskan dan menyenangkan pengguna jasa layanan. Di samping itu, pelayanan juga harus dilaksanakan secara cepat, tepat, ramah, dan penuh perhatian. Hal ini perlu menempatkan pengguna jasa layanan publik sebagai mitra, dan pada akhirnya pelayanan yang dilaksanakan akan menguntungkan semua pihak.

Untuk unit layanan kesehatan dasar diperoleh IKM sebesar 71,41% artinya kinerja unit layanan ini baik. Meskipun kinerja unit pelayanan ini sudah baik, tetapi masih ada nilai gap negatif sebesar -13,57%. Hal ini berarti kepuasan masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan ini masih belum terpenuhi, sehingga masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya. Semua dimensi pelayanan indeks kepuasannya tergolong baik. Keluhan yang berkaitan dengan unit layanan ini adalah kurang memadainya peralatan kesehatan dan fasilitas penunjang. Oleh karena itu, disarankan perlunya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pada unit ini.

Untuk unit layanan pendidikan dasar diperoleh IKM sebesar 78,32% artinya kinerja unit layanan ini baik. Meskipun kinerja unit pelayanan ini sudah baik, tetapi masih ada nilai gap negatif sebesar - 12,50%. Hal ini berarti kepuasan masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan ini masih belum terpenuhi, sehingga masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya. Kepuasan pada semua dimensi pelayanan tergolong baik. Kepuasan tertinggi dicapai pada dimensi kesopanan, kompetensi dan daya tanggap petugas. Keluhan dan saran yang disampaikan oleh responden, untuk dimensi fisik yang perlu diperhatikan antara lain adalah peralatan ekskul, ruang

perpustakaan dan lapangan olah raga pada beberapa sekolah. Adapun saran yang disampaikan sehubungan dengan pelayanan unit ini juga sangat bervariasi antara lain mengenai perlunya peningkatan sarana sekolah (lapangan olahraga, mushola, dll), perlunya peningkatan kualitas guru dalam mengajar, dan peningkatan pelayanan secara menyeluruh.

Menurut Undang-undang Pendidikan, pelayanan terhadap pendidikan merupakan hak setiap warga masyarakat untuk bisa mendapatkannya dengan baik, tanpa mengenal golongan, Suku Ras dan Agama. Pendidikan merupakan investasi masa depan bangsa, dan daya saing bangsa atau suatu daerah sangat tergantung dari kualitas SDM yang ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Oleh karena itu pelayanan pendidikan yang baik menjadi sangat menentukan terhadap peningkatan kualitas SDM masyarakat.

Hasil perhitungan IPM Kota Depok (data BPS tahun 2007) pada bidang pendidikan menunjukkan angka yang relatif baik, yaitu : 98,52 %, pada Angka Melek Huruf (AMH) dan 10,66 tahun pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS), namun bidang pendidikan masih menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya masih terdapat penduduk Kota Depok yang masih dalam kategori buta aksara latin sebanyak 20.273 orang pada tahun 2006 dan al-qur'an sebanyak 36.491 orang pada tahun 2006 (data hasil survei Dinas Pendidikan Kota Depok).

Selain itu terdapat pula beberapa permasalahan yang masih perlu mendapatkan pemecahan, diantaranya : masih tingginya biaya pendidikan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat, terbatasnya kompetensi guru, terbatasnya kualitas output pendidikan dan terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan. Pada tahun 2008, seiring dengan perkembangan kota, terutama biaya pendidikan diprediksi akan tetap tinggi, sementara sarana dan prasarana pendidikan juga masih terbatas.

Demikian pula dengan pelayanan kesehatan, masyarakat di Kota Depok semua memerlukan pelayanan kesehatan yang baik untuk menjamin kesehatannya. Hasil kajian terhadap bidang kesehatan menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Depok cukup tinggi (73,06 tahun pada tahun 2007) , namun Kota Depok masih menghadapi berbagai permasalahan di Bidang Kesehatan pada tahun 2006, diantaranya: angka kesakitan seperti penyakit DBD sebesar 2,8 CFR, diare sebanyak 26 kasus per 1000 orang, ISPA sebanyak 0,071 kasus/100.000 orang, TB Paru sebesar 64 kasus dan filariasis sebanyak 5 kasus klinis. Pada tahun 2006 walaupun terjadi penurunan pada penyakit DBD sebesar 0,65 CFR dan Diare sebanyak 19,63 kasus per 1.000 orang, namun masih terdapat peningkatan angka kesakitan pada penyakit ISPA sebanyak 5,92 kasus/100.000 orang, TB Paru sebanyak 83 kasus dan filariasis sebanyak 6 kasus klinis. Selain itu terdapat 9.235 balita kurang gizi dan 935 balita penderita gizi buruk; masih terdapatnya Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2004 sebesar 8 jumlah kematian dan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2006 sebesar 27,99 per 1000 lahir hidup.

Selain hal tersebut di atas, permasalahan lain mencakup sarana prasana kesehatan dan sumber daya manusia. Pada tahun 2006 berdasarkan data BPS Jumlah puskesmas sebanyak 37, jumlah rumah sakit 14. Sedangkan jumlah dokter sebanyak 105 orang, petugas kesehatan lainnya sebanyak 470 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan kebutuhan pelayanan kesehatan setiap penduduk jumlah tersebut masih belum memadai sehingga pelayanan kesehatan belum dapat mencapai hasil maksimal.

Berbagai intervensi program dan kegiatan di bidang kesehatan lebih diarahkan pada hal-hal sebagai berikut: (a) Mempertahankan IMR yang sudah rendah dan berusaha untuk menurunkannya; (b) Mempertahankan AHH yang sudah tinggi dan berusaha untuk meningkatkannya; (c) Menurunkan beban biaya kesehatan bagi penduduk miskin; (d) Membangun dan melengkapi sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas dan RSD.

2.4.2 Kemiskinan

Tingginya laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2007 sebesar 3,43 % yang tidak diimbangi dengan tingkat kompetensi (pendidikan dan keterampilan) yang memadai dan terbatasnya lapangan kerja, menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah keluarga miskin dan pengangguran. Selain itu migrasi dan kondisi ekonomi makro seperti inflasi yang tinggi, kenaikan harga dan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) turut mempengaruhi peningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Depok. Berdasarkan data BPS Kota Depok, pada tahun 2004 terdapat 65.000 jiwa orang miskin dan pada tahun 2005 terdapat 64.000 jiwa dan pada tahun 2006 terdapat 137.581 jiwa. Akan tetapi sebagai referensi, berdasarkan hasil pemetaan penduduk miskin, dengan menggunakan kriteria miskin pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan 14 kriteria sebagai berikut :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² perorang
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bamboo/kayu murahan/semen kualitas buruk
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bamboo/rumbia/kayu murahan/tembok tanpa plester.
4. Fasilitas tempat buang air besar tidak ada/digunakan bersama
5. Sumber penerangan umum bukan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/air sungai/air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak untuk sehari-hari menggunakan minyak tanah/kayu bakar/arang
8. Tidak pernah mengonsumsi daging/susu/ayam perminggu atau hanya satu kali dalam seminggu
9. Tidak pernah membeli pakaian/hanya membeli satu stel dalam setahun
10. Hanya satu kali/dua kali makan dalam sehari
11. Tidak mampu membayar untuk berobat

12. Lapangan pekerjaan : petani (lahan 0,5 ha), buruh tani, nelayan, buruh bangunan, pekerjaan lainnya yang tidak tetap.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah sekolah dasar
14. Tidak memiliki asset berupa tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Tabel.2.4. Jumlah Penduduk Miskin Kota Depok Tahun 2006

No.	KECAMATAN	KK	JIWA
1	SAWANGAN	5.747	24.058
2	PANCORANMAS	6.746	30.530
3	SUKMAJAYA	5.577	25.701
4	CIMANGGIS	8.503	34.577
5	BEJI	2.843	12.106
6	LIMO	2.651	10.609
	JUMLAH	32.085	137.581

(Sumber : hasil Pemetaan Penduduk Miskin BPS Th 2006)

Untuk angka pengangguran, pada tahun 2006 angka pengangguran terbuka mencapai **108.491** dari jumlah angkatan kerja sebanyak 625.970 jiwa dan pada tahun 2005 sebesar **96.068** dari jumlah angkatan kerja sebanyak 617.288 jiwa. Beberapa penyebab diantaranya adalah : tidak seimbangnya antara kapasitas lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja, dan rendahnya keterampilan dan keahlian para pencari kerja sehingga kurang sesuai dengan pasar kerja. Pada tahun 2008, diprediksi bahwa persaingan untuk memasuki pasar kerja akan semakin tinggi, hal ini disebabkan oleh faktor eksternal (migrasi yang cukup tinggi) dan faktor internal (bertambahnya angkatan kerja baru, pertumbuhan lapangan kerja relatif rendah).

2.4.3 Transportasi

Berdasarkan data Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Depok tahun 2007, teridentifikasi bahwa Depok memiliki 36 titik kemacetan, yang

terdiri dari 22 ruas jalan dan 14 simpul/persimpangan. Pada umumnya kemacetan di Kota Depok disebabkan oleh terbatasnya kapasitas jalan. Ruas jalan yang ada pada saat ini terdiri dari jalan nasional 14,313 km, jalan provinsi 20,990 km dan jalan kota 435,57 km (38,39% kondisi baik dan 61,61% kondisi rusak). Permasalahan lain terkait dengan sistem transportasi Kota adalah tingginya tingkat pergerakan penduduk ke luar Depok khususnya ke arah DKI Jakarta, sebagian besar dengan menggunakan *moda sepeda motor (60%-70%) dan sisanya menggunakan mobil pribadi (10%-30%)*. Kinerja lalu lintas kota dinilai tinggi dengan *V/C ratio* melebihi 0,8 dan *load factor* tinggi. Fenomena daerah penyangga/*commuter* di Kota Depok menjelaskan tingginya tingkat pergerakan penduduk pada hari kerja dan saat-saat jam kerja.

Dari faktor-faktor diatas, kemacetan terjadi pada ruas-ruas jalan yang terkait langsung dengan pergerakan ke dan dari DKI Jakarta, terutama pada jam-jam sibuk di pagi dan sore hari. Kondisi tersebut juga dipegaruhi oleh kurangnya tenaga pengatur lalu lintas di tiap titik kemacetan, kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas, kurangnya rambu-rambu lalu lintas pada daerah/kawasan tertentu dan kurangnya kesadaran para pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Untuk tahun 2009 diprediksi kemacetan masih akan terjadi di beberapa lokasi, apalagi jika tidak diintervensi oleh program dan kegiatan yang tepat, mengingat pertumbuhan penduduk dan kendaraan akan tetap lebih tinggi dibanding dengan perbaikan infrastruktur. Untuk tahun 2009 direncanakan akan diselesaikan 4 (empat) lokasi kemacetan, yaitu: simpang Jl.Tole Iskandar – Jl. Kemakmuran, simpang Jl.Tole Iskandar- Raden Saleh, simpang RTM-Akses UI dan Cinere Segmen I.

2.4.4 Pelayanan Persampahan

Hingga akhir tahun 2007 pengelolaan sampah di Kota Depok masih dirasakan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh tidak sebandingnya jumlah

volume sampah dengan kapasitas pengangkutan sampah, sehingga terjadi penumpukan sampah. Berdasarkan data, pada tahun 2007 jumlah volume sampah kota mencapai 3.764 m³/hari sedangkan yang terangkut hanya sebanyak 1.281 m³. Diharapkan pada tahun 2009 pengelolaan sampah dapat ditingkatkan, melalui optimalisasi kinerja TPA dan pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) melalui penyediaan Unit Pengolahan Sampah (UPS). Pada tahun 2009 ditargetkan pembangunan dan operasionalisasi 20 UPS yang lokasinya tersebar di beberapa kecamatan dan di TPA. Melalui penyediaan UPS, semua sampah/pendorong gerobak sampah di pelayanan akan dibawa ke TPS untuk diolah secara terpadu, dengan menggunakan seperangkat alat untuk kegiatan pemilahan, *packing* dan *composting*. Sedangkan sampah yang tidak dapat didaur ulang dan sisa komposting akan dikemas dan ditransportasikan untuk dibuang ke TPA.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Persampahan yang baru, maka setiap Kabupaten/Kota harus menerapkan sistem *sanitary landfill* dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)-nya. Di Kota Depok, ini berarti penyempurnaan sistem *controll landfill* yang selama ini digunakan dalam pengelolaan TPA. Penyediaan UPS, perbaikan sistem pengelolaan sampah di TPA, serta kesadaran dari masyarakat untuk disiplin membuang dan mereduksi sampah dari sumbernya, diyakini akan mampu mengatasi permasalahan persampahan. Demikian pula untuk tahun 2009 penyelesaian masalah persampahan juga telah diinisiasi kemungkinan bekerjasama dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam penyediaan pengelolaan sampah secara bersama. Dalam Revisi RTRW Kota Depok tahun 2000 – 2010, telah dialokasikan tempat untuk Stasiun Penampung/Penerima Antara (SPA).

Tabel.2.5. Proyeksi Timbulan Sampah Kota Depok (2005-2010)

	Satuan	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Domestik							
Timbulan total	m3/hr	455	791	1.24	1.726	2.253	2.823
Total sampah terangkut	m3/hr	360	601	892	1.105	1.261	1.355
Pasar							
Timbulan total	m3/hr	149	149	149	149	149	149
Total sampah terangkut	m3/hr	118	113	107	95	83	72
Penyapuan Jalan (Jalur)							
Timbulan Total	m3/hr	211	211	211	211	211	211
Total sampah terangkut	m3/hr	167	160	152	135	118	101
Komersil							
Timbulan total	m3/hr	109	190	297	414	541	677
Total sampah terangkut	m3/hr	86	144	214	265	303	325
Total							
Timbulan Total	m3/hr	924	1.341	1.897	2.5	3.153	3.86
Total Sampah Terangkut	m3/hr	732	1.019	1.366	1.6	1.766	1.853

Sumber: Studi LES (local Environmental Strategy) 2004

2.4.5 Pemberdayaan Masyarakat

Tuntutan masyarakat akan perbaikan pembangunan semakin tinggi baik dalam fungsi perencanaan maupun pengawasan. Pada fungsi perencanaan peranan masyarakat dalam mewujudkan *good governance* merupakan faktor utama pembangunan dimana masyarakat ditempatkan sebagai obyek pembangunan bukan sebagai subyek pembangunan. Peranan masyarakat dimulai dari proses perencanaan Musrenbang yang bermula dari Musrenbang Kelurahan yang melibatkan masyarakat pada level RT, RW dan kelurahan, kemudian dilanjutkan pada Musrenbang Kecamatan yang merupakan forum gabungan *stakeholders* Kecamatan, dimana hasil musrenbang Kecamatan akan menjadi masukan dalam forum SKPD yang pada akhirnya akan menjadi salah satu masukan dalam Musrenbang Kota. Hasil usulan masyarakat merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangatlah penting baik dalam sisi perencanaan

maupun pengawasan. Dalam segi pengawasan, masyarakat merupakan perpanjangan pemerintah dalam pengawasan pembangunan dilingkungan sekitarnya guna menjaga kualitas dan kuantitas pembangunan terutama dalam pembangunan fisik.

Dalam pengoptimalan peranan masyarakat, pemerintah daerah dapat memberdayakan lembaga masyarakat seperti RT, RW, LPM, PKK dan lainnya. Pengoptimalan peranan lembaga masyarakat yang merupakan ujung tombak pembangunan perlu diiringi oleh penghargaan yang sesuai dari pemerintah daerah.

Perumusan aspek legal oleh Pemerintah daerah seperti Peraturan Daerah mengenai perencanaan partisipatif merupakan langkah maju dalam peningkatan pembangunan seiring dengan makna otonomi daerah. Karena dengan partisipasi dapat memperluas basis pengetahuan dan representasi, membantu terbangunannya transparansi komunikasi dan hubungan-hubungan kekuasaan di antara para *stakeholders*, dapat meningkatkan pendekatan *iteratif* dan *siklikal* dan menjamin bahwa solusi didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan lokal dan akan mendorong kepemilikan lokal, komitmen dan akuntabilitas.

2.4.6 Tata Ruang

Berkaitan dengan aspek pengendalian dan pemanfaatan ruang, saat ini terjadi peningkatan penggunaan lahan dan alih fungsi lahan di Kota Depok. Perkembangan yang terjadi menunjukkan terdapatnya kecenderungan adanya alih fungsi lahan dari kegiatan pertanian menjadi kegiatan budidaya perkotaan (perdagangan & jasa, permukiman, dan sebagainya) yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan kurang memperhatikan daya dukung lingkungan. Hal ini diindikasikan oleh berkurangnya kawasan lindung, peningkatan konversi lahan sawah, dan munculnya kerusakan lingkungan.

Masalah ini dipengaruhi oleh: kurangnya penegakan regulasi, masih lemahnya data tentang bangunan/gedung, belum adanya mekanisme yang mengatur proses pengendalian pemanfaatan ruang (pelaporan, pengawasan maupun penertiban), lemahnya koordinasi lintas instansi & penegakan hukum/aturan yang sementara ini telah ada.

Salah satu akibat yang ditimbulkan dari kurang terkendalinya pemanfaatan ruang adalah terjadinya banjir. Ditambah dengan kurangnya penataan drainase dan Daerah Aliran Sungai (DAS), belum termanfaatkannya situ sebagai kawasan resapan air, banyaknya lahan-lahan kritis, serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah banjir.

2.4.7 Air Bersih

Pertumbuhan jumlah penduduk Kota Depok yang semakin bertambah dan perkembangan kawasan pemukiman yang tersebar merata berakibat pada peningkatan kebutuhan air bersih, baik air tanah maupun melalui perpipaan atau PDAM. Pelayanan Air bersih Kota Depok melalui layanan perpipaan masih cukup rendah. Pada Tahun 2006 pelayanan baru mencakup 18,27 % penduduk kota. Hal ini disebabkan antara lain adalah tingginya penggunaan air tanah sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan air bersih oleh masyarakat dengan kualitas air yang masih dapat diterima.

Program peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan Kota Depok dilakukan melalui kerjasama Pemerintah dengan pihak swasta. Sampai Tahun 2007 telah dibangun 160.325 m jaringan distribusi primer dan sekunder serta 2.396 Sambungan Rumah (SR). Dalam RPJMD Kota Depok pada Tahun 2007 sistem jaringan air bersih ditargetkan dapat menambah 1.000 Sambungan Rumah, namun terealisasi sebesar 637 SR (63,7%). Hal ini disebabkan masih rendahnya minat penyambungan pelayanan air bersih perpipaan, mengingat masyarakat calon pelanggan masih memilih menggunakan air tanah meskipun jaringan distribusi telah

tersedia. Sedangkan pada tahun 2008 dan 2009 sambungan air bersih di targetkan 1400 Sambungan Rumah. Pengembangan institusi pengelola air bersih Kota Depok pada tahun 2009 merupakan target yang harus diselesaikan guna memperbaiki pelayanan air bersih di Kota Depok yang merupakan pendapatan asli daerah.

2.4.8 Banjir

Sebagai sebuah wilayah yang terus mengalami perkembangan, terutama dalam bidang perekonomian dan kependudukan, Kota Depok saat ini harus menghadapi konsekuensi maupun dampak perkembangan tersebut. Tingginya pertumbuhan tingkat hunian menyebabkan berkurangnya daerah resapan air yang mampu menampung curahan air di musim hujan.

Dengan kondisi dan sistem drainase Kota Depok yang masih membutuhkan penanganan yang serius dan berkurangnya daerah resapan air mengakibatkan terjadinya luapan air di beberapa tempat tertentu.

Kondisi ini semakin bertambah parah dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya banjir, terutama kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarang yang sering kali memanfaatkan sungai dan saluran air sebagai tempat pembuangan sampah.

2.4.9 Investasi

Potensi ekonomi kota Depok dapat dilihat dari sektor industri dengan jumlah industri besar dan kecil sebanyak 126 perusahaan, industri makanan dan minuman sebanyak 26 perusahaan dan industri pakaian jadi sebanyak 20 perusahaan. Pada bidang perdagangan volume dan nilai ekspor kota Depok pada tahun 2006 sebesar 121.307.942 kgs dan \$227,8 juta, 142,2 ribu Euro, 196,9 Juta yen dan 6,3 juta bath. Pada bidang pertanian sektor agribisnis merupakan salah satu unggulan daerah perkotaan dimana luas lahannya semakin berkurang, komoditas unggulan antarlain belimbing, jambu biji, tanaman hias dan ikan hias.

Permasalahan yang terkait dengan pengembangan investasi adalah belum efektifnya regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal; belum terwujudnya stabilitas politik, keamanan, dan penegakkan hukum; belum tersedianya informasi akurat yang dibutuhkan calon investor; serta masih terdapatnya kecenderungan ekonomi biaya tinggi dalam pelaksanaan investasi. Untuk itu upaya yang telah dilakukan adalah melalui kebijakan di bidang penanaman modal terkait dengan stabilitas politik, keamanan, dan penegakkan hukum; penyederhanaan pelaksanaan prosedur investasi melalui pembentukan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP); serta peningkatan partisipasi sektor swasta dalam pemenuhan kebutuhan investasi.

Untuk tahun 2009 diharapkan tetap terjadi peningkatan investasi secara makro dan dari sisi mikro ekonomi diharapkan terjadi penguatan investasi di sektor tersier, terutama perdagangan dan jasa. Hal ini dapat terwujud jika pemerintah kota bersama dengan masyarakat menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan tetap mendorong peningkatan potensi daerah. Selain itu pemerintah kota juga dapat menerbitkan regulasi yang mampu mendorong peran serta sektor swasta

2.4.10 Pemilu

Pada Tahun 2009 untuk kedua kalinya, akan dilaksanakan Pemilu Presiden secara langsung yang diawali dengan Pemilu untuk anggota DPR/DPRD dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pelaksanaan Pemilu tersebut akan menghasilkan berbagai perubahan. Perubahan tersebut merupakan hal yang wajar dalam sistem politik demokrasi. Namun yang perlu diperhatikan adalah konsistensi kebijakan baik di tingkat daerah maupun nasional untuk menjaga kontinuitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menghadapi perubahan kepemimpinan daerah dan nasional yang perlu diantisipasi daerah adalah perilaku pengikut dalam menerima

kekalahan. Karena itu yang perlu dibangun adalah kesadaran politik masyarakat yang didukung oleh elite partai untuk bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif dan dapat menerima dan melaksanakan pemilu sebagai salah satu prosedur demokrasi dalam memilih jabatan-jabatan politik. Bercermin pada pengalaman Pemilu Nasional 2004 di Kota Depok yang berlangsung tanpa gangguan, diperkirakan pada 2009 dengan tingkat kesadaran politik makin tinggi baik pada tataran elit maupun masyarakat, maka Pemilu Nasional Tahun 2009 akan berlangsung dengan tenang. Perbedaan ideologis antar partai yang tidak terlalu mencolok akan lebih mendorong pemilih untuk memilih program-program yang ditawarkan. Kesepakatan dan kesadaran para elit partai untuk bermain dalam arena demokrasi akan diikuti oleh masyarakat dengan baik. Permasalahan yang perlu diperhatikan adalah antusiasme masyarakat untuk mengikuti Pemilu perlu didukung oleh pelaksanaan fungsi partai secara tepat dan pemenuhan janji perubahan ke arah yang lebih baik oleh pemenang Pemilu. Meskipun partisipasi pemilih tidak mempengaruhi legitimasi hasil Pemilu, tetapi yang perlu diperhatikan adalah pendataan pemilih yang akurat, sehingga setiap anggota masyarakat yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan haknya, karena pada Pemilu Nasional 2004 masalah pendaftaran pemilih tersebut menjadi isu penting. Namun dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi pada Pemilu Nasional 2004 cukup tinggi mengingat para pemilih sangat antusias untuk ikut mewarnai perubahan politik nasional cukup besar.

Diperkirakan pada 2009 tingkat partisipasi pemilih akan menurun mengingat masalah pendataan pemilih belum memiliki system yang tertata dengan baik. Di samping itu dapat disebabkan tingkat kejenuhan pemilih, karena pelaksanaan pemilu yang cukup sering, antara pemilu gubernur, pemilu bupati/walikota, dan pemilu nasional, perubahan yang diharapkan belum terwujud atau disebabkan sosialisasi yang kurang. Karena itu diharapkan pendataan dapat dilaksanakan secara akurat, dan partai politik

dapat melakukan fungsinya dengan melakukan sosialisasi pelaksanaan Pemilu Nasional 2009 dan komunikasi politik yang lebih intensif mengenai perubahan yang akan dilakukan dalam pemilu.

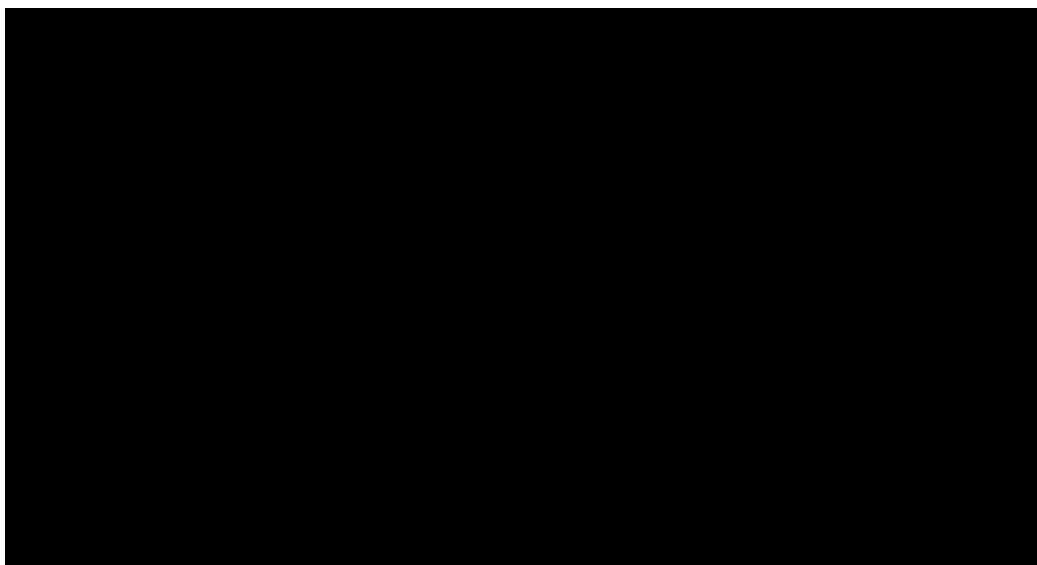
BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

3.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2007 dan Perkiraan Tahun 2008

Pembangunan ekonomi Kota Depok mengalami berbagai kemajuan, hal itu dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi daerah, antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kota Depok terakhir (tahun 2006/angka sementara), atas dasar harga berlaku, mengalami peningkatan sebesar 18,91 % dibanding Tahun 2005, yaitu dari Rp. 7.541.666,15,- (dalam juta) pada Tahun 2005 menjadi Rp. 8.967.779,01,- (dalam juta) pada Tahun 2006. Sedangkan atas dasar harga konstan mengalami peningkatan sebesar 6,65 % dari Rp. 4.750.034,10 (dalam juta) Tahun 2005 menjadi Rp. 5.066.129,06,- (dalam juta) Tahun 2006.

Gambar. 3.1. PDRB Kota Depok Tahun 2003-2006



Sumber: BPS Kota Depok, 2006

Penyumbang terbesar terhadap PDRB adalah sektor tersier (50,22 %), kemudian diikuti sektor sekunder (47,13 %), dan sektor primer (2,65 %). Fakta ini memperlihatkan bahwa sektor tersier mulai menggeser sektor sekunder yang sebelumnya merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Kota Depok. Secara rinci perkembangan proporsi sumbangan sektor-sektor dapat disimak pada Tabel.3.1.

**Tabel 3.1. DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB KOTA DEPOK
TAHUN 2003-2006 ATAS DASAR HARGA BERLAKU**

KELOMPOK SEKTOR	2003	2004	2005)*	2006)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. PRIMER	3,59	3,23	2,99	2,65
01. PERTANIAN	3,59	3,23	2,99	2,65
02. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	-	-	-	-
B. SEKUNDER	48,51	48,59	48,57	47,13
03. INDUSTRI PENGOLAHAN	38,30	38,52	38,49	37,54
04. LISTRIK, GAS DAN AIR MINUM	4,34	4,09	4,81	4,73
05. BANGUNAN/KONSTRUKSI	5,87	5,98	5,27	4,86
C. TERSIER	47,90	48,18	48,44	50,22
06. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	30,44	30,60	30,07	32,32
07. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	5,66	5,64	6,81	6,42
08. BANK & LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA	3,82	3,94	3,83	3,53
09. JASA-JASA	7,98	8,00	7,71	7,94

Sumber: BPS Kota Depok, 2006

Kemajuan ekonomi Kota Depok juga terlihat dari cukup tingginya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), yaitu mencapai 6,65 %, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan Jawa Barat (6,01 %). Dari semua sektor yang ada, sektor tersier mengalami pertumbuhan paling pesat, yaitu mencapai 7,73 %. Subsektor yang paling mendukung pesatnya laju pertumbuhan sektor tersier adalah subsektor perdagangan, hotel dan restoran yang bertumbuh hingga mencapai 9,39 %. Angka ini merupakan yang paling tinggi dibanding subsektor-subsektor yang berkembang di Kota Depok. Subsektor

yang tinggi pula pertumbuhannya adalah jasa-jasa yang mengalami pertumbuhan mencapai 8,04 %.

Di tengah potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, perekonomian Jawa Barat pada tahun 2008, termasuk Depok diperkirakan masih mengalami perkembangan yang cukup baik meskipun tidak terlalu tinggi akibat kebijakan kenaikan harga BBM baru-baru ini. Kajian ekonomi regional Jawa Barat yang disusun oleh Bank Indonesia, menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Barat triwulan I-2008 diperkirakan tumbuh sekitar 6,62 %, lebih tinggi dibanding capaian tahun lalu. Pada triwulan II, prospek perekonomian Jawa Barat bahkan diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 6,70 %-7,10 %. Prospek yang masih positif ini ditopang oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi sejalan dengan membaiknya ekspektasi pelaku usaha terhadap kondisi perekonomian Jawa Barat.

3.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2009

Perekonomian Kota Depok sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan eksternal dan internal. Perekonomian tahun 2009 terutama akan dipengaruhi oleh krisis energi, harga pangan dunia dan krisis finansial Amerika Serikat yang berpotensi memicu inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Secara internal, perekonomian Depok akan dipengaruhi oleh jumlah penduduk, yang di satu sisi merupakan potensi pasar barang dan jasa, namun di sisi lain merupakan beban pembangunan ekonomi. Faktor lainnya adalah ketersediaan infrastruktur. Melalui penyediaan infrastruktur yang baik, diperkirakan mempengaruhi efisiensi perekonomian dan daya tarik investasi.

Perekonomian Kota Depok tahun 2009 juga dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor tersier yang mulai menggeser sektor sekunder. Pada tahun 2009 diperkirakan kontribusi sektor tersier akan makin besar seiring dengan melemahnya pertumbuhan sektor primer dan sekunder. Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah ketentraman dan ketertiban daerah yang

berpengaruh besar dalam kelancaran usaha dan aktivitas ekonomi. Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2009 diharapkan berlangsung lancar dan aman sehingga tidak berdampak negatif terhadap perekonomian daerah.

Dengan catatan bahwa berbagai tantangan di atas dapat diatasi dan diantisipasi dengan baik, maka prospek perekonomian Kota Depok tahun 2009 diperkirakan tetap meningkat, apalagi mengingat kondisi ekonomi makro yang semakin baik dari tahun ke tahun. Di sisi permintaan, sektor konsumsi rumah tangga akan menjadi pendorong utama pertumbuhan. Realisasi investasi diperkirakan meningkat, terutama dengan terwujudnya pelayanan terpadu satu pintu. Infrastruktur jalan yang meningkat juga diharapkan akan lebih memacu daya tarik investasi di Kota Depok. Di sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Kota Depok diperkirakan didorong oleh sektor tersier, seperti perdagangan, hotel, dan restoran, serta jasa-jasa.

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2009

Arah kebijakan ekonomi Nasional :

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memacu investasi, ekspor, industri olahan, pertanian, dan UKM.
3. Penanggulangan kemiskinan melalui: Perbaikan iklim ketenagakerjaan, revitalisasi pertanian, peningkatan ekonomi dan akses rakyat miskin kpd pelayanan dasar, termasuk pangan/beras.
4. Meningkatkan LPE 5,5-6,1%, mengurangi pengangguran terbuka 6,5-7,5 % dan mengurangi jumlah penduduk miskin 10-11 %.

Arah kebijakan ekonomi Jawa Barat :

1. Pertumbuhan yang berkualitas melalui pengembangan *core business* Jabar (agribisnis, kelautan, manufaktur, jasa, pariwisata, SDM) dan mengurangi disparitas antar wilayah
2. Pengembangan dunia usaha, investasi dan keuangan daerah
3. Perkuatan sisi hilir industri dan nilai tambah agribisnis dan industri olahan

4. Peningkatan kemitraan dan penguasaan teknologi informasi
5. Meningkatkan LPE 5,5-6,5 %, mengurangi jumlah penduduk miskin kurang dari 21,2%, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia 72,31% dan mengurangi pengangguran di bawah 9,8 %.

Arah kebijakan ekonomi Kota Depok :

1. Meningkatkan investasi daerah melalui perbaikan iklim berusaha yang lebih kondusif, antara lain dengan peningkatan pembangunan infrastruktur jalan, pelayanan terpadu satu pintu.
2. Memberikan dukungan yang kuat terhadap tumbuhnya UKM (usaha kecil menengah) serta pertanian dan industri kecil dalam rangka meningkatkan kapasitasnya sehingga ikut memperkuat struktur ekonomi daerah.
3. Memberdayakan masyarakat miskin melalui program terpadu penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan antara program Pusat dan daerah, serta yang diinisiasi oleh dunia usaha melalui CSR, dan lain-lain.

3.4. Analisis dan Perkiraan Sumber Pendanaan Daerah

3.4.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Untuk pajak daerah terdiri dari 6 jenis pajak (pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PJU dan parkir). Sedangkan retribusi daerah terdapat 22 jenis retribusi. Hasil pengelolaan kekayaan daerah bersumber dari 2 pos, yaitu bagian laba PDAM dan bagian laba atas penyertaan modal pada Bank Jabar.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok selama 5 tahun (2004-2008) dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya mengalami kenaikan sebesar 18,54 % dan kontribusinya terhadap APBD rata-rata per tahun adalah berkisar sebesar 10,01%. Berikut ini disajikan tabel perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok.

Tabel.3.2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah APBD Kota Depok Tahun 2004-2008

NO	TAHUN	PAD	Pertumbuhan		APBD	Proporsi (%)
			Rp	(%)		
1	2004	49,916,768,407.91			462,589,805,400.00	10.79
2	2005	64,060,869,668.97	14,144,101,261.06	28.34	534,250,694,945.27	11.99
3	2006	68,631,174,736.00	4,570,305,067.03	7.13	689,819,605,865.97	9.95
4	2007	75,457,361,773.64	6,826,187,037.64	9.95	905,334,160,948.24	8.33
5	2008*	97,139,989,565.57	21,682,627,791.93	28.73	1,031,980,164,297.70	9.41
Rata-rata per tahun			11,805,805,289.42	18.54	905,993,607,864.30	10.10

Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2004-2008

3.4.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Kota Depok selama 5 tahun terakhir (2004-2008) pertumbuhannya rata-rata per tahun adalah sebesar 12,00% dan kontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama adalah rata-rata sebesar 68,94 %. Berikut ini disajikan tabel mengenai perkembangan Dana Perimbangan Kota Depok selama 5 tahun :

Tabel.3.3. Perkembangan Dana Perimbangan APBD Kota Depok Tahun 2004-2008

NO	TAHUN	Dana Perimbangan	Pertumbuhan		APBD	Proporsi (%)
			Rp	(%)		
1	2004	371,166,629,595.41			462,589,805,400.00	80.24
2	2005	415,229,467,888.00	44,062,838,292.59	11.87	534,250,694,945.27	77.72
3	2006	520,303,329,045.00	105,073,861,157.00	25.31	689,819,605,865.97	75.43
4	2007	504,052,499,829.00	(16,250,829,216.00)	(3.12)	905,334,160,948.24	55.68
5	2008*	574,268,400,146.29	70,215,900,317.29	13.93	1,031,980,164,297.70	55.65
Rata-rata per tahun			50,775,442,637.72	12.00	905,993,607,864.30	68.94

Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2004-2008

Dari tabel di atas terlihat bahwa Dana Perimbangan merupakan porsi terbesar dalam sumber penerimaan APBD Kota Depok, atau dengan kata lain menunjukkan tingkat ketergantungan Pemerintah Kota terhadap

penerimaan Dana Perimbangan khususnya terhadap Dana Alokasi Umum (DAU).

3.4.3Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah Kota Depok selama 5 tahun terakhir (2004-2008) pertumbuhannya rata-rata per tahun mengalami kenaikan 1.376,90 % . Kenaikan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 166.836.404.377,31 atau sebesar 5.561,21% dari tahun 2006 disebabkan adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah, dan kontribusi terhadap APBD dalam kurun waktu yang sama rata-rata sebesar 7,90 %. Berikut ini disajikan tabel mengenai perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah Kota Depok. Terjadi pertumbuhan yang besar pada tahun 2007, hal ini disebabkan oleh perubahan peraturan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan dan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu terjadi perubahan uraian pada rincian lain-lain pendapatan daerah yang sah.

**Tabel .3.4. Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah APBD Kota Depok
Tahun 2004-2008**

NO	TAHUN	Lain-lain Pendapatan yang Sah	Pertumbuhan		APBD	Kontribusi (%)
			Rp	(%)		
1	2004	10,411,099,000.00			462,589,805,400.00	2.25
2	2005	13,533,200,000.00	3,122,101,000.00	29.99	534,250,694,945.27	2.53
3	2006	3,000,000,000.00	(10,533,200,000.00)	(77.83)	689,819,605,865.97	0.43
4	2007	169,836,404,377.31	166,836,404,377.31	5,561.21	905,334,160,948.24	18.76
5	2008*	160,056,976,907.31	(9,779,427,470.00)	(5.76)	1,031,980,164,297.70	15.51
Rata-rata per tahun			37,411,469,476.83	1,376.90	905,993,607,864.30	7.90

Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2004-2008

Total pendapatan Kota Depok yaitu penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah dalam kurun waktu 2004-2008 mengalami peningkatan sebesar 17,97% per tahun dan kontribusinya terhadap APBD adalah sebesar 86,93% per tahun, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel .3.5. Perkembangan Pendapatan APBD Kota Depok Tahun 2004-2008

NO	TAHUN	PENDAPATAN	Pertumbuhan		APBD	Kontribusi (%)
			Rp	(%)		
1	2004	431,494,497,003.32			462,589,805,400.00	93.28
2	2005	492,823,537,556.97	61,329,040,553.65	14.21	534,250,694,945.27	92.25
3	2006	591,934,503,781.00	99,110,966,224.03	20.11	689,819,605,865.97	85.81
4	2007	749,346,265,979.95	157,411,762,198.95	26.59	905,334,160,948.24	82.77
5	2008*	831,465,366,619.17	82,119,100,639.22	10.96	1,031,980,164,297.70	80.57
Rata-rata per tahun			99,992,717,403.96	17.97	905,993,607,864.30	86.93

Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2004-2008

3.4.4 Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil (output dan outcome) dari input yang direncanakan, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Perkembangan Belanja Daerah Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel .3.6. Perkembangan Belanja APBD Kota Depok Tahun 2004-2008

NO	TAHUN	BELANJA	PERTUMBUHAN (%)		APBD	PROPORSI (%)
			Rp	%		
1	2004	456,859,805,400.00			462,589,805,400.00	98.76
2	2005	527,366,694,945.27	70,506,889,545.27	15.43	534,250,694,945.27	98.71
3	2006	674,902,436,665.97	147,535,741,720.70	27.98	689,819,605,865.97	97.84
4	2007	892,250,553,147.93	217,348,116,481.96	32.20	905,334,160,948.24	98.55
5	2008*	1,018,651,516,097.70	126,400,962,949.77	14.17	1,031,980,164,297.70	98.71
Rata-rata per tahun			108,214,922,712.41	18.83	905,993,607,864.30	98.51

Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2004-2008

Berdasarkan Permendagri No. 59 tahun 2007, Belanja Daerah dikelompokan atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Perkembangan Belanja Daerah Kota Depok selama kurun waktu 5 tahun (2004-2008) yaitu rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami kenaikan mengalami peningkatan sebesar 18.83% per tahun dan kontribusinya

terhadap APBD adalah sebesar 98.51% per tahun, perkembangannya sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel .3.7. Perkembangan Rincian Belanja APBD Kota Depok Tahun 2004-2008

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN				2008
		2004	2005	2006	2007	
	BELANJA	456,859,805,400.00	527,366,694,945.27	674,902,436,665.97	892,250,553,147.93	1,018,651,516,097.70
1	Belanja SKPD	412,675,240,149.00	464,293,194,787.75	582,157,266,561.97	754,389,927,553.07	845,303,341,712.39
2	Belanja Hibah			-	10,500,000,000.00	39,886,114,000.00
3	Belanja Bantuan Sosial			-	79,851,311,509.00	110,780,916,058.00
4	Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	42,937,070,300.00	48,154,906,600.00	47,134,393,000.00	26,250,000,000.00	-
5	Belanja Tidak terduga	1,247,494,951.00	14,918,593,557.52	45,610,777,104.00	21,259,314,085.86	22,681,144,327.31

Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2004-2008

3.4.5 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perkembangan pembiayaan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 69,90% per tahun, sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel .3.8. Perkembangan Pembiayaan APBD Kota Depok Tahun 2004-2008

TAHUN	PEMBIAYAAN		SURPLUS (DEFISIT)	PERTUMBUHAN	
	PENERIMAAN	PENGELUARAN		Rp	%
2004	31,095,308,396.68	5,730,000,000.00	(25,365,308,396.68)		
2005	41,427,157,388.30	6,884,000,000.00	(34,543,157,388.30)	(9,177,848,991.62)	36.18
2006	97,885,102,084.97	14,917,169,200.00	(82,967,932,884.97)	(48,424,775,496.67)	140.19
2007	155,987,894,968.29	13,083,607,800.00	(142,904,287,167.98)	(59,936,354,283.01)	72.24
2008*	200,514,797,678.53	13,328,648,200.00	(187,186,149,478.53)	(44,281,862,310.55)	30.99
Rata-rata Pertumbuhan					69.90

Sumber : Perda APBD Kota Depok Tahun 2004-2008

3.5. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.5.1 Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2009 memperhatikan prinsi-prinsip sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil.
3. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Selanjutnya disampaikan kebijakan dari masing-masing sumber pendapatan daerah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber pendapatan daerah yang menjadi kewenangan dan secara langsung dipengaruhi oleh kinerja Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pada dasarnya perolehan penerimaan daerah dari sumber PAD selalu meningkat setiap tahun, namun persentasenya masih relatif rendah dalam menyumbang keseluruhan pendapatan daerah.

Sumber pendapatan asli daerah yang diharapkan mengalami peningkatan adalah : Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yaitu bagi laba PDAM Bogor karena diperkirakan adanya peningkatan penerimaan perusahaan mengingat masih potensialnya pasar bagi pelanggan baru air bersih. Selain itu, peningkatan juga diharapkan dari

beberapa jenis pajak, yaitu pajak reklame seiring dengan telah berubahnya tarif, pajak hotel dan restoran, parkir, hiburan, penerangan jalan, dan retribusi IMB.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009, arah kebijakan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) adalah:

- a. DBH akan dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah.
- b. DBH akan mengalami proses penyempurnaan dalam perhitungan, penetapan alokasi dan ketepatan waktu penyalurannya ke daerah.
- c. DBH akan ditingkatkan akuntabilitas/tanggung gugat serta efektivitas penggunaannya.

Untuk Dana Alokasi Umum (DAU), berdasarkan RKP 2009, diupayakan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN dengan terus meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU yang bersumber dari instansi yang berwenang, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaannya. DAU sebagai penopang utama pembiayaan pembangunan daerah diharapkan dapat meningkat pada tahun 2009.

Arah kebijakan Dana Alokasi Khusus tahun 2009 :

- a. Diprioritaskan untuk membantu daerah dengan kemampuan fiskal rendah dan sedang dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang menjadi urusan daerah.

- b. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar, melalui kegiatan khusus di bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan infrastruktur.
- c. DAK digunakan untuk membiayai bidang-bidang tertentu, yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian, kependudukan, infrastruktur jalan, irigasi, air minum, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, kehutanan dan perhubungan.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Lain-lain Pendapatan yang Sah juga merupakan kewenangan Pemerintah dan Provinsi. Oleh sebab itu kebijakan tentang sumber pendapatan ini tergantung kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Provinsi berdasarkan hasil kordinasi dan konsultasi dengan daerah.

Jenis penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah yang diharapkan meningkat adalah dari Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Povinsi, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

3.5.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2009 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program RPJMD (tahun ke empat) serta Urusan Wajib dan Pilihan pemerintah daerah berdasarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan wajib terdiri dari: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah pemerintahan umum administrasi keuangan perangkat daerah kepegawain dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika serta perpustakaan. Sedangkan urusan pilihan terdiri dari: pertanian, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan serta industri.

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Tidak Terduga.

Kebijakan untuk belanja tidak langsung adalah sebagai berikut :

1. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2009, alokasi belanja pegawai akan mengalami peningkatan seiring adanya kebijakan kenaikan gaji PNS sebesar 15, penyesuaian eselonering dalam rangka pelaksanaan SOPD baru, dan pengangkatan CPNSD.
2. Tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya (Pasal 39 ayat [2] Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).
3. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja

hibah diperkirakan mengalami penurunan terkait dengan selesainya program PPK-IPM.

4. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan stimulan operasional RT, RW, dan LPM, olahraga, keagamaan dan fokus utama bantuan pada program pendidikan gratis serta jaminan kesehatan bagi keluarga tidak mampu/miskin.
5. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

3.5.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan pembiayaan tahun 2009 untuk Penerimaan Pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Pada tahun 2009, akan ditingkatkan dana penyertaan modal daerah kepada Bank Jabar dan Banten sebesar Rp. 10 Milyar.

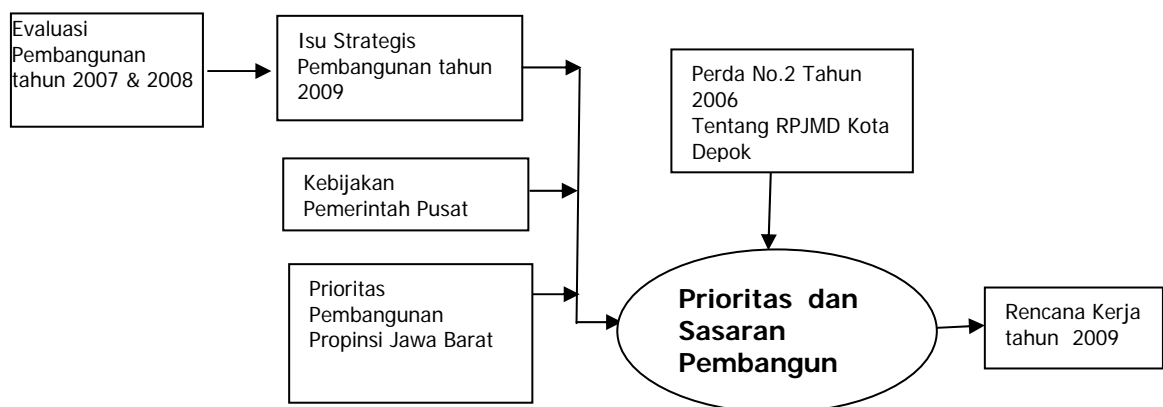
BAB IV

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009

Prioritas pembangunan daerah yang menjadi salah satu dasar penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2009 disusun berdasarkan isu strategis pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Depok Tahun 2006– 2011 dan beberapa arahan RKP serta RKPD Propinsi Jawa Barat.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah serta memberikan arahan yang lebih jelas bagi perencanaan pembangunan yang lebih rinci maka masing-masing prioritas pembangunan daerah dilengkapi dengan Sasaran pembangunan. Proses penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2009 dilakukan berdasarkan bagan alir pada gambar 3.4.

Gambar 4.1. Bagan Alir Penetapan Prioritas Pembangunan Daerah



Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Depok tahun 2009 merupakan penjabaran dari Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2006-2011 dengan memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat sebagaimana

terdapat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat (RKPD) Provinsi tahun 2009, yaitu 8 (delapan) common goals Provinsi Jawa Barat tahun 2009, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia
2. Ketahanan Pangan
3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat
4. Peningkatan Kinerja Aparatur
5. Penanganan Pengelolaan Bencana
6. Pengendalian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan
7. Pengembangan Infrastruktur Wilayah
8. Kemandirian Energi dan Kecukupana Air Bersih

Adapun target Indikator Makro Kota Depok untuk tahun 2009 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2006-2011, meliputi peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 2,5 %, mengurangi titik kemacetan minimal 2 titik, mengurangi titik banjir pada 1 lokasi, bertambahnya cakupan pelayanan sambungan air bersih 1400 Sambungan Rumah (SR), bertambahnya unit pengolahan sampah sebanyak 10 lokasi, penataan kawasan kumuh pada 3 lokasi, meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi menjadi 6,48, pertumbuhan PAD sebesar 5% dari tahun sebelumnya, dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi sebesar 80,21 (meliputi Indeks Kesehatan (IK) menjadi sebesar 74,79, Indeks Pendidikan (IP) menjadi sebesar 70,00, Indeks Daya Beli (IDB) menjadi sebesar 622,99.

Untuk merealisasikan pencapaian target indikator makro kota tahun 2009 dan upaya untuk mengeliminir isu strategis, diperlukan penentuan prioritas pembangunan agar alokasi sumberdaya bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Berdasarkan beberapa analisis terhadap permasalahan kota dan RPJMD, prioritas pembangunan tahun 2009 meliputi :

I. Peningkatan Pelayanan Publik.

Fokus:

Pendidikan: peningkatan sarana prasarana, meningkatkan rata-rata lama sekolah, meningkatkan angka melek huruf, peningkatan layanan untuk siswa rawan DO/miskin, peningkatan mutu layanan

Kesehatan : peningkatan sarana prasarana, penanganan gizi buruk, peningkatan layanan untuk keluarga miskin, optimalisasi RSUD, menurunkan AKI dan AKB.

Program :

- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
- Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan keluarga
- Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar
- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
- Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
- Peningkatan Pelayanan Masyarakat Veteriner dan kesehatan Hewan
- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Baik Jalur Sekolah dan Luar Sekolah.
- Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat/Swasta Dalam Penyelenggaraan Pendidikan
- Peningkatan Pembinaan Generasi Muda, Olah Raga dan Seni Budaya Sekolah
- Peningkatan Manajemen Pelayanan

II. Penanggulangan Kemiskinan

Fokus :

Penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat (petani, pelaku usaha mikro/kecil), dan perbaikan sanitasi lingkungan, peningkatan kemitraan pemerintah dan masyarakat

Program :

- Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan
- Perlindungan Ketenagakerjaan
- Pengembangan Agribisnis Perkotaan
- Penataan Lingkungan Pemukiman
- Peningkatan Jangkauan Layanan Air Bersih
- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.
- Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan keluarga.
- Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- Peningkatan Pelayanan Masyarakat Veteriner dan kesehatan Hewan
- Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
- Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera
- Peningkatan Manajemen Pelayanan
- Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

III. Peningkatan Pelayanan Transportasi Masyarakat

Fokus :

Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan, meningkatkan efektifitas manajemen transportasi, sosialisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna jalan.

Program :

- Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi
- Pengembangan Manajemen Transportasi
- Pengembangan Moda Transportasi
- Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
- Pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah

IV. Penanggulangan dan Peningkatan Layanan Persampahan

Fokus :

Mengatasi keterbatasan lahan TPS dan TPA, mengoptimalkan kualitas pelayanan persampahan, meningkatkan jangkauan pelayanan persampahan.

Program :

- Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPA
- Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPS
- Peningkatan Manajemen Pelayanan

V. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Fokus :

Mengoptimalkan peran kelembagaan lokal, meningkatkan keswadayaan Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan komunitasnya

Program :

- Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
- Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peningkatan Pelestarian seni dan Budaya
- Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera

VI. Pengendalian Tata Ruang

Fokus :

Meningkatkan dan menegakkan regulasi tata ruang, meningkatkan dan mengoptimalkan perencanaan tata ruang, memelihara kawasan lindung dan situ, peningkatan Ruang Terbuka Hijau serta pentaan pasca bencana.

Program :

- Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang & Bangunan
- Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
- Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

VII. Pengendalian Banjir

Fokus :

Memperbaiki sistem drainase, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

mencegah banjir.

Program :

- Pengendalian Banjir
- Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

VIII. Peningkatan Pelayanan Air Bersih

Fokus :

Pengembangan institusi pengelola Air Bersih Kota Depok, peningkatan jumlah pelanggan

Program :

- Program Penataan Lingkungan Pemukiman.
- Program Peningkatan Jangkauan Layanan Air Bersih

IX. Investasi

Fokus :

Meningkatkan potensi daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur.

Program :

- Pengembangan Obyek Wisata
- Peningkatan Pelestarian seni dan Budaya
- Peningkatan Produktifitas Usaha Koperasi dan UKM
- Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat
- Pengembangan Usaha Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah
- Pengembangan Usaha Perdagangan dan Jasa
- Peningkatan Daya Tarik Investasi
- Penyiapan Kawasan Niaga dan Industri yang Ramah Lingkungan
- Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

X. Pemilu

Fokus :

Meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi konflik sosial, meningkatkan partisipasi politik masyarakat

Program :

- Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan
- Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik
- Peningkatan Manajemen Pelayanan

Penjabaran prioritas program dapat dilihat pada lampiran II.

Selain prioritas pembangunan sebagaimana diuraikan diatas, terdapat beberapa Sasaran pembangunan yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial, politik dan kemasyarakatan, yaitu Program : peningkatan kualitas kehidupan beragama, peningkatan kualitas kehidupan politik, pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan, peningkatan pembinaan generasi muda dan olahraga, peningkatan pelestarian seni dan

budaya. Selanjutnya terdapat pula beberapa program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sehubungan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2011.

BAB V

RENCANA KERJA

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 disusun berdasarkan pada program dan kegiatan yang dikelompokkan dalam rumpun Urusan Wajib dan Pilihan Peragkat Daerah. Program-program mengacu pada RPJMD Kota Depok Tahun 2006-2011 dan SKPD pelaksana mengacu pada Perda No.08 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah, sebagaimana yang dituangkan dalam matrik Rencana Kerja Menurut Bidang Urusan Pemerintahan Daerah pada Lampiran III.

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Sesuai amanat Undang-undang, RKPD merupakan pedoman untuk menyusun rancangan APBD. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari telah tersusunnya RKPD tahun 2009 ini adalah sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota berkewajiban melaksanakan program-program/kegiatan-kegiatan dalam RKPD tahun 2009 dengan sebaik-baiknya.
2. Sebagai pedoman penyusunan RAPBD, RKPD perlu dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kota Depok dan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang dikukuhkan melalui Nota Kesepakatan antara Pimpinan DPRD dan Walikota.
3. Dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus membuat Rencana Kerja yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
4. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan perbaikan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Walikota melalui Bapeda.
5. Masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat berperan serta dalam pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan atau kontrol sosial dengan mengacu pada RKPD ini.

6. Pada akhir tahun anggaran 2009, setiap Kepala SKPD wajib melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

RKPD Kota Depok Tahun 2009, berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2009. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaan.

WALIKOTA DEPOK,

ttd

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DEPOK
 NOMOR : 12 TAHUN 2008
 TANGGAL : 29 Oktober 2008
 TENTANG : RKPD KOTA DEPOK TAHUN 2009

Prioritas Program dan SKPD Pelaksana

NO.	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang Melaksanakan	Program
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Publik	Meningkatkan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan sehingga mencapai indeks: a. Kesehatan: 74,79; b. Pendidikan: 70;	a. Dinas Kesehatan b. Rumah Sakit Daerah Rumah Sakit Daerah c. Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan	1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 2. Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan keluarga 3. Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4. Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar 5. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan 6. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Veteriner dan kesehatan Hewan 7. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Baik Jalur Sekolah dan Luar Sekolah. 8. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan 9. Peningkatan Peran Serta Masyarakat/Swasta Dalam Penyelenggaraan Pendidikan 10. Peningkatan Pembinaan Generasi Muda, Olah Raga dan Seni Budaya Sekolah 11. Peningkatan Manajemen Pelayanan
2	Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperbaiki sanitasi lingkungan, memperbaiki gizi buruk, perbaikan rumah tidak layak huni, dengan target: a. Daya Beli: 595,5 b. kawasan kumuh: 3 lokasi c. Gizi buruk: 500 (TFC: 180, Ibu Hamil: 400) d. Rumah tidak layak huni: 180	a. Disnakersos b. Dinas Pertanian dan Perikanan c. Dinas Tata Ruang dan Permukiman d. Dinas Kesehatan e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana f. Bappeda g. Kantor Pemberdayaan Masyarakat & Ketahanan Pangan	1. Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan 2. Perlindungan Ketenagakerjaan 3. Pengembangan Agribisnis Perkotaan 4. Penataan Lingkungan Pemukiman 5. Peningkatan Jangkauan Layanan Air Bersih Peningkatan Jangkauan Layanan Air Bersih 6. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 7. Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan keluarga. 8. Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 9. Peningkatan Pelayanan Masyarakat Veteriner dan kesehatan Hewan 10. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 11. Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera 12. Peningkatan Manajemen Pelayanan 13. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang Melaksanakan	Program
1	2	3	4	5
3	Peningkatan Pelayanan Transportasi Masyarakat	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan, meningkatkan efektifitas manajemen transportasi, meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna jalan, dengan target 2 titik macet	a. Dinas Perhubungan b. Dinas Bina Marga dan SDA	1. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi 2. Pengembangan Manajemen Transportasi 3. Pengembangan Moda Transportasi 4. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 5. Pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah Pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah
4	Penanggulangan dan Peningkatan Layanan Persampahan	Mengoptimalkan kualitas pelayanan persampahan, membangun 10 UPS dan mengefektifkan pengelolaan 26 UPS.	a. Dinas Kebersihan dan Pertamanan	1. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPA Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPA 2. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPS
5	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Mengoptimalkan peran kelembagaan lokal, meningkatkan keswadayaan masyarakat Mengoptimalkan peran kelembagaan lokal, meningkatkan keswadayaan masyarakat	a. Kantor Pemberdayaan Masyarakat & Ketahanan Pangan b. Bappeda c. Badan Lingkungan Hidup d. Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya	1. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Peningkatan Pelestarian Seni dan Budaya 4. Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera
6	Pengendalian Tata Ruang	Meningkatkan dan menegakkan regulasi tata ruang, mengoptimalkan perencanaan tata ruang, memelihara kawasan lindung dan situ serta pemulihan pasca bencana.	a. Bappeda b. Dinas Tata Ruang dan Permukiman c. Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup	1. Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang & Bangunan 2. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
7	Pengendalian Banjir	Memperbaiki sistem drainase, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah banjir, dengan target tertangani 1 lokasi.	a. Dinas Tata Ruang dan Permukiman b. Dinas Bina Marga dan SDA	1. Pengendalian Banjir 2. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
8	Peningkatan Pelayanan Air Bersih	Meningkatkan jumlah pelanggan dan mengembang-kan institusi pengelola air bersih Kota Depok, dengan target 1.400 SR.	a. Dinas Tata Ruang dan Permukiman b. Dinas Bina Marga dan SDA	1. Program Peningkatan Jangkauan Layanan Air Bersih 2. Program Penataan Lingkungan Permukiman

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	SKPD yang Melaksanakan	Program
1	2	3	4	5
9	Investasi	Meningkatkan potensi daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur, dengan target LPE 6,48, pertumbuhan PAD 5 %. Meningkatkan potensi daerah, menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan peran swasta dalam pembiayaan infrastruktur, dengan target LPE 6,48, pertumbuhan PAD 5 %.	a. Dinas Pemuda Olahraga, Seni dan Budaya Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata, Seni dan Budaya b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan c. Dinas Koperasi, UKM dan Pasar d. Bappeda	1. Pengembangan Obyek Wisata Pengembangan Obyek Wisata 2. Peningkatan Pelestarian seni dan Budaya Peningkatan Pelestarian seni dan Budaya 3. Peningkatan Produktifitas Usaha Koperasi dan UKM 4. Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat 5. Pengembangan Usaha Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah Pengembangan Usaha Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah 6. Pengembangan Usaha Perdagangan dan Jasa 7. Peningkatan Daya Tarik Investasi 8. Penyiapan Kawasan Niaga dan Industri yang Ramah Lingkungan 9. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
10	Pemilu	Meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi konflik sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat	a. Kantor Kesbang-polinmas Kantor Kesbang-polinmas b. Kantor Pemberdaya-an Masyarakat & KP	1. Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan 2. Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 3. Peningkatan Manajemen Pelayanan

WALIKOTA DEPOK,

ttd

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 12 TAHUN 2008

TANGGAL : 29 Oktober 2008

TENTANG : RKPD KOTA DEPOK TAHUN 2009

Rencana Kerja Menurut Bidang Urusan Pemerintahan
Tahun Anggaran 2009

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
Urusan :		Pendidikan		
SKPD :		Dinas Pendidikan		
No	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98%	Dinas Pendidikan
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Terjaganya Kebersihan dan Keamanan Kantor	98%	Dinas Pendidikan
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	85%	Dinas Pendidikan
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	85%	Dinas Pendidikan
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya sarana Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	98%	Dinas Pendidikan
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya sarana Peralatan Rumah Tangga	98%	Dinas Pendidikan
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	98%	Dinas Pendidikan
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya kehadiran dan penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	97%	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya kebutuhan operasional kendaraan	95%	Dinas Pendidikan
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terciptanya kenyamanan dalam bekerja di lingkungan kantor dinas	95%	Dinas Pendidikan
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor	Terciptanya kenyamanan dalam bekerja di lingkungan kantor dinas	95%	Dinas Pendidikan
4	Penyediaan Gedung Kantor	Terciptanya kenyamanan dalam bekerja di lingkungan kantor dinas	95%	Dinas Pendidikan
5	Biaya Sewa Kendaraan/Alat Angkut Kantor			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Meningkatnya laporan capaian kinerja SKPD	80%	Dinas Pendidikan
Peningkatan Manajemen Pelayanan		Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan		
1	Pengadaan Alat Kantor dan Alat Pendidikan	Meningkatnya kinerja aparatur dinas pendidikan	60%	Dinas Pendidikan
2	Operasional Pelayanan UPTD Pendidikan di Kecamatan Pancoran Mas			
3	Operasional Pelayanan UPTD Pendidikan di Kecamatan Beji			
4	Operasional Pelayanan UPTD Pendidikan di Kecamatan Sukmajaya			
5	Operasional Pelayanan UPTD Pendidikan di Kecamatan Cimanggis			
6	Operasional Pelayanan UPTD Pendidikan di Kecamatan Sawangan			
7	Operasional Pelayanan UPTD Pendidikan di Kecamatan Limo			
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan		Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Pelaksanaan Forum SKPD, Penyusunan Renja 2010	Tersedianya dokumen perencanaan hasil forum SKPD 2009 dan Renja 2010	5 Dokumen	Dinas Pendidikan
2	Penyusunan Roadmap Pendidikan Kota Depok	Terususunnya buku roadmap pendidikan	100 Buku	Dinas Pendidikan
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Baik Jalur Sekolah dan Luar Sekolah		Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah, Berkurangnya Angka Putus Sekolah, Meningkatkan Kualitas Hasil Belajar Peserta Didik, Meningkatkan Kualitas Lembaga Pendidikan		
1	Fasilitasi BOS Reguler dan Bos Pendamping	Terpenuhinya sebagian Dana Operasional Sekolah (Pendamping BOS Kota Depok)		Dinas Pendidikan
2	Bintek Peningkatan Kompetensi Penilik/Pengawas dan Pelatihan Manajemen Keuangan bagi Kepala Sekolah	Meningkatnya kompetensi pengawas penilik dan ketua gugus SD	70%	Dinas Pendidikan
3	Persiapan dan Pelaksanaan Ujian Nasional (UN dan UASBN)	Meningkatnya kualitas hasil UN dan UASBN	15%	Dinas Pendidikan
4	Operasional Penerimaan siswa baru (PSB) TK, SD, SMP, SMA, SMK Negeri Tahun Pelajaran 2008/2009	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PSB	85%	Dinas Pendidikan
5	Penyelenggaraan SMP/SMA Terbuka dan Kegiatan Lomografi	Meningkatnya partisipasi peserta didik SMA terbuka dalam kegiatan belajar mengajar	50%	Dinas Pendidikan
6	Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK dan Olimpiade Sains Nasional SD, SMP dan SMA	Terpilihnya juara LKS dan peserta olimpiade Sains Nasional Tingkat Kota Depok	2 tim	Dinas Pendidikan
7	Operasional Pelaksanaan Akreditasi	Meningkatnya kinerja pengelolaan sekolah yang sudah terakreditasi	100%	Dinas Pendidikan
8	Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup/Lifeskill Siswa dan Instruktur dibidang Otomotif SMK	Tersedianya media pembelajaran otomotif bagi siswa dan instruktur	45%	Dinas Pendidikan
9	Ekspo Teknologi Pendidikan dan Kegiatan Wawasan Wiyatamandala	Tersebaranya informasi mengenai teknologi dibidang pendidikan	100%	Dinas Pendidikan
10	Ujian Nasional Bidang Produktif Kelas XII SMK	Meningkatnya kualitas lulusan SMK di Kota Depok	100%	Dinas Pendidikan
11	Workshop MGMP SMP, SMA dan SMK	Meningkatnya kualitas guru mata pelajaran di SMP, SMK dan SMA	40%	Dinas Pendidikan

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
12	Pelatihan Life Skill bagi Warga Belajar Keaksaraan Fungsional (KF) Paket B dan Paket C dan peserta kursus, Pelatihan Pustakawan TBM PKBM dan Penyelenggara Kursus			Dinas Pendidikan
13	Lomba Keteladanan Pendidikan Non Formal dan In Formal (PNFI) dan Peringatan Hari Aksara Internasional, Hari Anak Nasional Tk. Kota dan Pusat	Meningkatnya pembinaan terhadap generasi muda	30%	Dinas Pendidikan
14	Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C	Meningkatnya jumlah warga belajar yang lulus Paket A,B dan C serta siswa pendidikan formal	75%	Dinas Pendidikan
15	Lomba Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terpenuhinya alat permainan anak usia dini	30%	Dinas Pendidikan
16	Jambore PLS	Terpilihnya lembaga non formal yang berkualitas	40 orang	Dinas Pendidikan
17	Pembinaan dan Pelatihan Tutor PAUD	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Tutor PAUD	10%	Dinas Pendidikan
18	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan Buku Bacaan PAUD dan Direktori PNFI	Terpenuhinya alat permainan anak usia dini	30%	Dinas Pendidikan
19	Pelatihan Asesor Tenaga Kependidikan Nonformal dan Informal	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Tutor PAUD	10%	Dinas Pendidikan
20	Pengadaan Peralatan Praktik SMK	Tersedianya media pembelajaran	55%	Dinas Pendidikan
21	Promosi Program SMK	Terdatanya dan terjaringnya minat siswa SMP/MTs untuk melanjutkan SMK	55%	Dinas Pendidikan
22	Operasional Program Bantuan Pusat dan Provinsi	Meningkatnya pelaksanaan program pusat dan propinsi	100 sekolah	Dinas Pendidikan
23	Pengadaan Tanah			Dinas Pendidikan
24	Bintek Administrasi Keuangan bagi Sekolah Penerima Bantuan			
25	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 2 lantai	Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan aktivitas belajar dan mengajar	100%	Dinas Pendidikan
26	Pembangunan MCK	Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan aktivitas belajar dan mengajar	100%	Dinas Pendidikan
27	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP	Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan aktivitas belajar dan mengajar	100%	Dinas Pendidikan
28	Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) SD	Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan aktivitas belajar dan mengajar	100%	Dinas Pendidikan
29	Rehabilitasi SMAN 5 Depok	Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan aktivitas belajar dan mengajar	100%	Dinas Pendidikan
30	Rehabilitasi Lahan Parkir dan Halaman SMP Negeri 10	Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan aktivitas belajar dan mengajar	100%	Dinas Pendidikan
31	Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Negeri I dan II	Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan aktivitas belajar dan mengajar	100%	Dinas Pendidikan
32	Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan	Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan aktivitas belajar dan mengajar	100%	Dinas Pendidikan
33	Pengadaan Sarana Informasi Kependidikan (buku saku KTSP SD,SMP,SMA/K) dan Pedoman penilaian	Meningkatnya pemahaman guru tentang penyusunan KTS dan penyusunan portofolio sebagai media penilaian sertifikasi	30%	Dinas Pendidikan
34	Rintisan Model Pengembangan Mata Pelajaran (B.Indo, B.Ing, Matematika, IPA dan B.Sunda) pada SMP	Terbentuknya sekolah model pengembangan kurikulum	100%	Dinas Pendidikan
35	Peningkatan Layanan Pendidikan Non Formal			Dinas Pendidikan
36	Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar Negeri			Dinas Pendidikan
37	Sosialisasi Pesan karakter Inspiratif Untuk Siswa SD, SMP dan SMA			Dinas Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan		
1	Operasional Penyaluran Insentif Guru (Tunjangan Fungsional) dan Kelebihan Jam Mengajar (KJM)	Meningkatnya kesejahteraan guru	70%	Dinas Pendidikan
2	Pemberian Transportasi Guru Wiyata Bakti	Meningkatnya kesejahteraan guru wiyata bakti dan guru bantu	70%	Dinas Pendidikan
3	Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional			Dinas Pendidikan
4	Bintek Penyusunan KTSP		100%	Dinas Pendidikan
5	Pelatihan guru dalam penanganan Siswa berkelakuan khusus		100%	Dinas Pendidikan
6	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang pendidikan	Implementasi PP bagi Tenaga pendidik dan kependidikan	92%	Dinas Pendidikan
7	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Lomba Tenaga Pendidikan/Kependidikan Berprestasi	Meningkatkan inovasi dan kreativitas tenaga pendidik dan kependidikan guna menciptakan kinerja	70%	Dinas Pendidikan
8	Pengolahan UNPTK	Terciptanya nomor NUPTK dan Data base jumlah tenaga pendidik dan kependidikan	17,000 orang	Dinas Pendidikan
	Peningkatan Pembinaan Generasi Muda, Olah Raga dan Seni Budaya di Sekolah	Meningkatnya Prestasi Generasi Muda, Olah Raga dan Seni Budaya di Sekolah		
1	POPDA, POP SMA, O2SN, POR Usia Dini, Lomba Siswa Berprestasi dan LTUB Tk. SD, SMP dan SMA Tahun 2009	Meningkatnya prestasi olahraga pelajar dan akademis maupun disiplin upacara	75%	Dinas Pendidikan
2	Pelatihan Bahasa Sunda dan Kesenian bagi Guru SD	Terlatihnya guru bahasa sunda dan guru seni	20%	Dinas Pendidikan
3	Peringatan HARDIKNAS	Meningkatnya pemahaman tentang pentingnya peringatan hardiknas dan haornas	20%	Dinas Pendidikan
4	Pembinaan Siswa SMA/SMK/MA	Terciptanya keseragaman tentang pembinaan OSIS dan meningkatnya kepemimpinan pelajar	30%	Dinas Pendidikan
5	Festival Seni Pelajar SMP, SMA, SMK se Kota Depok (Lomba BSP, Lomba Paduan Suara, Lomba Vokal Group dan Lomba Nasyid antar Pelajar SMA)	Meningkatnya minat dan apresiasi seni generasi muda pelajar	40%	Dinas Pendidikan
	Urusan : SKPD :	Kesehatan Dinas Kesehatan		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	Dinas Kesehatan
2	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor	100%	Dinas Kesehatan
3	Penyedia Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Jasa Alat Tulis Kantor	100%	Dinas Kesehatan
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Dinas Kesehatan
5	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	Dinas Kesehatan
6	Penyedia Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman	100%	Dinas Kesehatan
7	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya kehadiran dan penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	100%	Dinas Kesehatan

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100%	Dinas Kesehatan
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan STNK	100%	Dinas Kesehatan
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor	50%	Dinas Kesehatan
4	Penyediaan Gedung Kantor	Terpenuhinya penyediaan gedung kantor	100%	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan semesteran dinas kesehatan Kota Depok	100%	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Pembekalan bagi Petugas Farmasi di Puskesmas	Meningkatnya kemampuan petugas farmasi di puskesmas	100%	Dinas Kesehatan
2	Penyediaan Sistem Pengelolaan Obat	Tersedianya sistem pengelolaan obat	100%	Dinas Kesehatan
3	Akreditasi Jabatan Fungsional	Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang terakreditasi (306 tenaga)	80%	Dinas Kesehatan
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana Dinas Kesehatan	70%	Dinas Kesehatan
5	Sertifikasi ISO 9001-2000 Puskesmas Cimanggis dan Implementasi ISO 9001-2000 di Puskesmas Sukmajaya	Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan di Kota Depok	70%	Dinas Kesehatan
6	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu dan DTP	Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	75%	Dinas Kesehatan
7	Pelatihan Petugas Pengelola Keuangan dan Kepegawaian	Tersedianya dinkes dan puskesmas yang berkualitas	100%	Dinas Kesehatan
8	Rehabilitasi Puskesmas Kota Depok	Terpenuhinya kebutuhan sarana gedung puskesmas Kota Depok	100%	Dinas Kesehatan
9	Pembangunan Puskesmas	Terpenuhinya kebutuhan sarana gedung puskesmas Kota Depok	100%	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya rencana program dan kegiatan dinas kesehatan tahun 2010	100%	Dinas Kesehatan
	Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah		
1	Pemberian Izin Sarana Pelayanan dan Tenaga Kesehatan Swasta di Kota Depok	Terpenuhinya perijinan sarana pelayanan dan tenaga kesehatan swasta di Kota Depok	70%	Dinas Kesehatan
	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan, Meningkatnya Fasilitas Kesehatan		
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya biaya operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan	70%	Dinas Kesehatan
2	Pengadaan Obat, Alkes Habis Pakai dan Reagensia Puskesmas	tersedianya Obat, Alkes Habis Pakai dan Reagensia Puskesmas	100%	Dinas Kesehatan
3	Penyusunan Profil Kesehatan	Meningkatnya kualitas data Kesehatan Kota Depok	100%	Dinas Kesehatan
4	Sosialisasi Jaminan Kesehatan Daerah	Program Jamkesda dapat tersosialisasi sampai tingkat RW, petugas pengelola jamkesda memperoleh gambaran dan pengetahuan tentang pengelolaan jamkesda, diperoleh dukungan dari stakeholder	70%, 80%, 80 % peserta	Dinas Kesehatan
5	Pengadaan Obat Askes (Kapitasi Askes PNS)	Meningkatnya ketersediaan obat askes	100%	Dinas Kesehatan
6	Kapitasi PNS Kota Depok di Puskesmas (Askes)	Terlayannya PNS akan pelayanan kesehatan di puskesmas	100%	Dinas Kesehatan
7	Pendampingan Jamkesmas	Meningkatnya pelayanan masyarakat miskin akan pelayanan kesehatan rujukan di sarana pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
8	Pengadaan Cetakan dan Bahan Pakai Habis Penunjang Kegiatan Puskesmas	Meningkatnya pelayanan di puskesmas	80%	Dinas Kesehatan
	Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan Keluarga	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Keluarga		
1	Pelatihan Petugas Program KIA			Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja			Dinas Kesehatan
3	Sertifikasi Posbindu			Dinas Kesehatan
	Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat		
1	Penanggulangan Gizi Masyarakat	Meningkatnya status gizi balita dan keluarga	30%	Dinas Kesehatan
	Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Menurunnya Angka Kesakitan Yang Disebabkan Oleh Penyakit Menular dan Tidak Menular		
1	Penanggulangan Penyakit yang Dapat di Cegah dengan Imunisasi (PD3I)	Meningkatnya jumlah bayi, ballita anak sekolah, PUS, ibu hamil, serta calon jemaah haji yang terimunisasi	98%	Dinas Kesehatan
2	Pengamatan Penyakit Menular	Terdeteksinya Penyakit Menular (TBC, Kusta, ISPA, Antrax, HIV/AIDS, AFP)	98%	Dinas Kesehatan
3	Penanggulangan Filarisis	Tercapainya eliminasi Filariasis di Kota Depok	95%	Dinas Kesehatan
4	Penanggulangan Penyakit Menular	Menurunnya jumlah Penyakit Menular Lainnya (TBC,Kusta, ISPA, Anthrax, HIV/AIDS, AFP)	90%	Dinas Kesehatan
5	Penanggulangan Penyakit-Penyakit Cenderung KLB	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular	90%	Dinas Kesehatan
6	Penanggulangan Kebutaan Karena Katarak	Meningkatnya jumlah masyarakat Depok yang menderita kebutaan karena katarak dapat melihat kembali	100%	Dinas Kesehatan
7	Pelaksanaan P3K	Terlayannya kegiatan masyarakat dan Pemda kota Depok yang memenuhi P3K		Dinas Kesehatan
8	Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit tidak menular	60%	Dinas Kesehatan
	Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar	Meningkatnya Cakupan Kesehatan Lingkungan		

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
1	Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan Pemukiman	Meningkatnya kualitas air bersih dan pencegahan pencemaran terhadap air bersih serta adanya pengendalian vektor di TPA, tercapainya pendataan sarana sanitasi dasar maupun promosi klinik sanitasi	70 % memenuhi syarat kesehatan	Dinas Kesehatan
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Perilaku Hidup Bersih & Sehat		
1	Promosi PHBS	Meningkatnya pengetahuann masyarakat tentang kesehatan	15%	Dinas Kesehatan
2	Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-45	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta tentang kesehatan	15%	Dinas Kesehatan
3	Optimalisasi Saka Bhakti Husada	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5%	Dinas Kesehatan
4	Optimalisasi Kota Siaga	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	10%	Dinas Kesehatan
	Urusan : SKPD :	Ketahanan Pangan Dinas Kesehatan		
	Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar	Meningkatnya Cakupan Kesehatan Lingkungan		
1	Pengawasan dan Penyuluhan Hygiene & Sanitasi Tempat-tempat Umum dan Tempat Pengelolaan Makanan	Diperolehnya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan di TTU	75 % memenuhi syarat kesehatan	Dinas Kesehatan
2	Sertifikasi IRTP dan pengawasan sarana farmasi dan sarana makmin	Meningkatnya kualitas IRTP, DAM Catering, Apotik dan Toko Obat	100%	Dinas Kesehatan
3	Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya	Meningkatnya keamanan makanan jajanan anak sekolah di Kota Depok	100%	Dinas Kesehatan
	Urusan : SKPD :	Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Depok	75%	RSUD
2	Penyedia Jasa Kebersihan, Keamanan Kantor	Terciptanya lingkungan RSUD yang bersih dan aman	60%	RSUD
3	Penyedia Alat Tulis Kantor	Meningkatnya administrasi dan manajemen RSUD Kota Depok	90%	RSUD
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Depok	75%	RSUD
5	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya pelayanan kesehatan RSUD	75%	RSUD
6	Penyedia Makanan dan Minuman	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Depok	75%	RSUD
7	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah (RSUD)	Difasilitasinya kegiatan rapat-rapat koordinasi RSUD	80%	RSUD
8	Penyediaan Sarana Informasi			RSUD
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya pemeliharaan rutin gedung kantor RSUD Kota Depok	100%	RSUD
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Tercapainya kendaraan dinas/operasional RSUD yang siap pakai	80%	RSUD
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terciptanya kondisi perlengkapan gedung kantor RSUD Kota Depok	90%	RSUD
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		
1	Pengadaan Pakaian Kerja dan alat pelindung diri	Terpenuhinya pakaian kerja lapangan RSUD	80%	RSUD
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran RSUD	Terpenuhinya Pelaporan Keuangan Semesteran RSUD	100%	RSUD
	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Pengadaan Alat Kesehatan	Terpenuhinya mutu pelayanan kesehatan	60%	RSUD
2	Pengadaan Limbah dan Air Bersih	Sampah (medik dan non medik) di RSUD di kelola dengan baik	80%	RSUD
3	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor RSUD	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor RSUD	100%	RSUD
4	Pemeliharaan Taman RSUD Kota Depok	Terpenuhinya Pemeliharaan Taman RSUD Kota Depok	80%	RSUD
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi	Prosentase sarana gizi idan sarana kebersihan RSUD Kota Depok	60%	RSUD
6	Pengelolaan Tenaga Medis, Keperawatan, penunjang Medis Serta non Medis	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di RSUD	60%	RSUD
7	Pembangunan Pagar dan Gapura RSUD Kota Depok	Meningkatnya pelayanan Rumah Sakit	70%	RSUD
8	Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Meningkatnya tingkat keselamatan dan kesehatan kerja RSUD Depok	75%	RSUD
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Laundry dan linen RSUD Kota Depok	Meningkatnya pelayanan laundry RSUD kota Depok	80%	RSUD
10	Persiapan dan pengembangan Sistem Manajemen Mutu RSUD	Meningkatnya mutu pelayanan keehatan di RSUD Kota Depok	75%	RSUD
11	Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)	Terpenuhinya Sistem Informasi Rumah Sakit	75%	RSUD
	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan			
	Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah Melalui Diklat Struktural dan Fungsional	Meningkatnya Profesionalitas SDM Pemerintahan Daerah		
1	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Tenaga Medis dan Non Medis	Tersedianya tenaga RSUD yang berkualitas	40%	RSUD
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan			
1	Forum SKPD RSUD			
	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan, Meningkatnya Fasilitas Kesehatan		

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
1	Penyediaan Jasa Pelaksanaan Pelayanan	Terpenuhinya jasa pelayanan	75%	RSUD
2	Pendampingan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin/Askes/SKTM	Meningkatnya pelayanan masyarakat miskin akan pelayanan kesehatan Rujukan di RSUD Kota Depok	75%	RSUD
3	Pengadaan Obat, Alkes habis pakai dan bahan kimia dan Perlengkapan Farmasi	Tersedianya Obat, Alkes habis pakai dan bahan kimia Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD Kota Depok	100%	RSUD
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Perilaku Hidup Bersih & Sehat		
1	Promosi Layanan Kesehatan RSUD	Tersosialisasinya masyarakat akan pelayanan kesehatan di RSUD	70%	RSUD
	Urusan : SKPD :	Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Dinas Bina Marga & SDA
2	Penyedia Jasa kebersihan dan keamanan kantor	Terpenuhinya kebersihan dan keamanan kantor	100%	Dinas Bina Marga & SDA
3	Penyedia Alat Tulis Kantor	Tertibnya administrasi kantor/dinas	100%	Dinas Bina Marga & SDA
4	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kelancaran tugas kantor	80%	Dinas Bina Marga & SDA
5	Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kelancaran tugas kantor	85%	Dinas Bina Marga & SDA
6	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya pelayanan dinas	80%	Dinas Bina Marga & SDA
7	Penyedia Makanan dan Minuman	Terpenuhinya pelayanan dinas	85%	Dinas Bina Marga & SDA
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Terpenuhinya tugas dan kelancaran kantor	80%	Dinas Bina Marga & SDA
9	Penyediaan Sarana Informasi	Terpenuhinya kebutuhan informasi dinas	80%	Dinas Bina Marga & SDA
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor/dinas	90%	Dinas Bina Marga & SDA
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan bermotor	Terpeliharanya kendaraan dinas	95%	Dinas Bina Marga & SDA
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	95%	Dinas Bina Marga & SDA
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Meningkatnya kualitas pengawasan pelaksanaan pekerjaan semester I dan II	85%	Dinas Bina Marga & SDA
	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Lapangan	Meningkatnya kinerja dinas	40 orang	Dinas Bina Marga & SDA
2	Pengadaan Peralatan Komputer	Meningkatnya kinerja dinas	90%	Dinas Bina Marga & SDA
3	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kinerja dinas	80%	Dinas Bina Marga & SDA
4	Pengadaan Buku Perpustakaan		100%	Dinas Bina Marga & SDA
	Pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah	Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah		
1	Pembebasan Lahan untuk Infrastruktur dan Sarana/Prasarana Pemerintahan Bidang SDA	Tersedianya tanah untuk pembangunan jalan/saluran	100%	Dinas Bina Marga & SDA
1	Penyediaan Lahan untuk Infrastruktur dan Sarana/Prasarana Pemerintahan Bidang Bina Marga	Terpenuhinya tanah untuk pembangunan saluran irigasi	100%	Dinas Bina Marga & SDA
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Pelaksanaan Forum SKPD dan Penyusunan Renja SKPD	Peningkatan kualitas perencanaan	80%	Dinas Bina Marga & SDA
2	Perencanaan Teknis Jalan Tembus Terminal Jatijajar - Jagorawi (Tahap II)	Tercapainya kualitas hasil perencanaan yang diinginkan	95%	Dinas Bina Marga & SDA
2	Perencanaan Teknis dan Supervisi Peningkatan Jalan Sawangan Raya	Tersedianya hasil perencanaan	100%	Dinas Bina Marga & SDA
3	Masterplan Drainase Kota Depok	Tersedianya pedoman penataan drainase di kota Depok	80%	Dinas Bina Marga & SDA
4	Pemetaan Kali Krukut	Tersedianya peta kali krukut	80%	Dinas Bina Marga & SDA
5	Pemetaan Akuifer dan Air Tanah	Tersedianya data potensi dan sebaran akuifer dan air tanah di Kec. Pancoran Mas, Kec Beji dan Kec. Limo	50%	Dinas Bina Marga & SDA
6	Leger Jalan	Tersedianya data jalan kota	30%	Dinas Bina Marga & SDA
7	Sistem Informasi Geografis Sumber Daya Air	Tersedianya informasi awal untuk perencanaan kegiatan	50%	Dinas Bina Marga & SDA
8	Standarisasi Satuan Pekerjaan bidang ke-PU-an	Tersedianya standar satuan pekerjaan bidang ke PU-an	95%	Dinas Bina Marga & SDA
9	Survey Perencanaan Bidang Jalan dan Jembatan	Tersedianya dokumen survei perencanaan bidang jalan dan jembatan	1 set dokumen	Dinas Bina Marga & SDA
10	Survey Perencanaan Bidang Jalan Lingkungan	Tersedianya dokumen survei perencanaan bidang jalan dan jembatan	1 set dokumen	Dinas Bina Marga & SDA
11	Kajian Kelayakan Jembatan Panus Lama	Tersedianya hasil studi kelayakan jembatan Panus Lama	100%	Dinas Bina Marga & SDA
12	Pembinaan Kelompok P3A Mitra Cai	Terbinanya Kelompok P3A Mitra Cai	82,50%	Dinas Bina Marga & SDA

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
13	Survei Perencanaan Bidang Sumber Daya Air		100%	Dinas Bina Marga & SDA
14	Optimalisasi Jaringan Irigasi Saluran Sekunder Cisadane Empang Cabang Tengah, Cabang Barat, Cabang Timur	Tersedianya data jaringan irigasi yang optimal	80%	Dinas Bina Marga & SDA
	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Meningkatnya Kualitas Jaringan Transportasi		
1	Pengelolaan PHT (Pekerja Harian Tetap)	Meningkatnya kinerja dinas	70%	Dinas Bina Marga & SDA
2	Pengadaan Alat Laboratorium UPTD Workshop	Meningkatnya kinerja dinas	75%	Dinas Bina Marga & SDA
3	Perawatan Kendaraan Bermotor	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan alat-alat berat darat dan operasional UPTD	80%	Dinas Bina Marga & SDA
4	Pengadaan Alat-alat Berat	Meningkatnya kinerja dinas	90%	Dinas Bina Marga & SDA
5	Pengadaan Alat-alat angkutan Darat Bermotor	Meningkatnya kinerja dinas	100%	Dinas Bina Marga & SDA
6	Pemeliharaan Jalan	Tersedianya struktur jalan yang baik	85%	Dinas Bina Marga & SDA
7	Peningkatan Jalan	Tersedianya struktur jalan yang baik	85%	Dinas Bina Marga & SDA
8	Pembangunan Jalan	Tersedianya struktur jalan yang baik	85%	Dinas Bina Marga & SDA
9	Rehabilitasi Jalan	Tersedianya struktur jalan yang baik	85%	Dinas Bina Marga & SDA
10	Prasarana Jalan	Tersedianya struktur jalan yang baik	85%	Dinas Bina Marga & SDA
11	Pembangunan Jembatan	Tersedianya struktur jalan yang baik	85%	Dinas Bina Marga & SDA
12	Pengelolaan UPTD Workshop			Dinas Bina Marga & SDA
	Pengendalian Banjir	Menurunnya kawasan banjir		
1	Pengelola Satgas	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	60%	Dinas Bina Marga & SDA
2	Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan/Penanggulangan Saluran Irigasi	Memperlancar aliran air	40,55%	Dinas Bina Marga & SDA
3	Pemeliharaan DAS (Daerah Aliran Sungai)	Memperlancar aliran air	25%	Dinas Bina Marga & SDA
4	Pengendalian Penataan Sempadan Air	Terpeliharanya dan tertatanya sempadan saluran irigasi	9,86%	Dinas Bina Marga & SDA
5	Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan	Lancarnya operasional bidang sda dan terpeliharanya jaringan irigasi di 6 Kec	40,25%	Dinas Bina Marga & SDA
6	Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi	Memperlancar distribusi air	11,16%	Dinas Bina Marga & SDA
7	Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai Resapan Air	Tersedianya cadangan air bawah tanah dan area pariwisata	19,5%	Dinas Bina Marga & SDA
8	Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber Daya Air	Memperlancar aliran air dan mengurangi daerah genangan/banjir	50,45%	Dinas Bina Marga & SDA
9	Swakelola Masyarakat Dalam Penataan Drainase	Tertatanya saluran drainase Kota dan memperlancar aliran air	55%	Dinas Bina Marga & SDA
	Penataan Lingkungan Pemukiman	Menurunnya Pemukiman Kumuh		
1	Pemeliharaan jalan lingkungan	Meningkatnya kondisi jalan di lingkungan pemukiman	1017680300	Dinas Bina Marga & SDA
2	Perbaikan dan Pembuatan Saluran Drainase dan Gorong-gorong	Meningkatnya kondisi jalan di lingkungan pemukiman	9,6 km	Dinas Bina Marga & SDA
3	Betonisasi Jalan Lingkungan	Meningkatnya kondisi jalan di lingkungan pemukiman	9,6 km	Dinas Bina Marga & SDA
4	Rehabilitasi Jalan Lingkungan	Meningkatnya kondisi jalan di lingkungan pemukiman	6,6 km	Dinas Bina Marga & SDA
5	Pembangunan Jalan Lingkungan	Meningkatnya kondisi jalan di lingkungan pemukiman	6,6 km	Dinas Bina Marga & SDA
6	Peningkatan Jalan Lingkungan	Meningkatnya kondisi jalan di lingkungan pemukiman	9,6 km	Dinas Bina Marga & SDA
7	Penataan Kawasan Kumuh	Tertatanya Kawasan Kumuh	3 kelurahan	Dinas Bina Marga & SDA
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup			
1	Sosialisasi dan Pembuatan Contoh Sumur Resapan	Terbinanya masyarakat akan pentingnya sumur resapan	12 lokasi	Dinas Bina Marga & SDA
	Urusan : SKPD :	Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air		
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menurunnya Pencemaran Lingkungan		
1	Monitoring dan Pengendalian Air Bawah Tanah	Tersedianya informasi tentang pemanfaatan air bawah tanah	50%	Dinas Bina Marga & SDA
	Urusan : SKPD :	Pekerjaan Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya komunikasi dan penerangan dinas	100%	DKP
2	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Terwujudnya Kelancaran Kerja	100%	DKP
3	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kelancaran administrasi perkantoran	100%	DKP
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kelancaran administrasi perkantoran	100%	DKP
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kelancaran penerangan kantor	100%	DKP
6	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	100%	DKP

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
7	Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya kelancaran rapat-rapat dinas	20%	DKP
8	Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Terpenuhinya kelancaran tugas dinas	70%	DKP
9	Penyediaan sarana informasi	Terpenuhinya informasi pelayanan kebersihan dan lingkungan hidup	60%	DKP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Bermotor	Terwujudnya kelancaran kerja	100%	DKP
2	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terwujudnya kelancaran kerja	100%	DKP
3	Penyediaan Gedung Kantor	Terpenuhinya prasarana kerja	20%	DKP
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		
1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Terwujudnya identitas, keserasian dan keseragaman pegawai DKLH	80%	DKP
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	70%	DKP
	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terwujudnya kelancaran kerja	40%	DKP
2	Pengadaan suku cadang kendaraan operasional kebersihan	Terpenuhinya kebutuhan suku cadang kendaraan operasional kebersihan	80%	DKP
3	Pengadaan peralatan kebersihan	Lancarnya kegiatan operasional pengangkutan sampah dan terpenuhinya kebutuhan peralatan	70%	DKP
4	Pengadaan kendaraan operasional kebersihan	Terpenuhinya kebutuhan suku cadang kendaraan operasional kebersihan	50%	DKP
5	Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan	Lancarnya kegiatan operasional pengangkutan sampah dan terpenuhinya kegiatan pemeliharaan kendaraan operasional	80%	DKP
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Pelaksanaan Forum SKPD & Penyusunan Renja	Tersampainya aspirasi masyarakat dalam usulan kegiatan	60%	DKP
2	Renstra	Tersusunnya Renstra	1 Dokumen	DKP
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPA	Meningkatnya Efisiensi Pengelolaan Sampah di TPA		
1	Pengelolaan TPA	Terkelolanya TPA sesuai SOP	34%	DKP
2	Layanan Pengangkutan Sampah	Terangkutnya sampah di kota Depok	47%	DKP
3	Sosialisasi Pengelolaan Sampah di TPA	Terbinanya forum masyarakat di sekitar TPA	3 forum	DKP
4	Pembangunan Sarana Pencucian Kendaraan di TPA (Tahap 2)	Terwujudnya kelancaran pemeliharaan kendaraan operasional pengangkutan	40%	DKP
5	Pembuatan pagar di TPA Cipayang	Terjaminnya kelancaran operasional pengangkutan dan pembuangan sampah di TPA	40%	DKP
6	Pembangunan drainase & jalan operasi lingk TPA (Tahap 2)	Tertatanya sistem drainase dan jalan lingk di TPA	75%	DKP
7	Pembuatan kolam pembuangan sampah di TPA	Terkelolanya TPA sesuai dengan SOP	40%	DKP
8	Pelaksanaan Pengolahan sampah di 5 UPS	Terolahnya sampah di unit pengelolaan sampah	30m3/ups/hari	
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPS	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Pengolahan Sampah		
1	Pelaksanaan Pengolahan sampah di 22 UPS	Terolahnya sampah di unit pengelolaan sampah	30m3/ups/hari	DKP
2	Sosialisasi & pelatihan pengelolaan sampah	Memudahkan proses pengolahan sampah I lokasi UPS	6 RW di 6 Kec	DKP
3	Komposting Rumah Tangga	Terwujudnya rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah	6 RW di 6 Kec	DKP
4	Penunjang Program Adipura	Meningkatnya kinerja pengelolaan lingkungan hidup	70%	DKP
5	Pengadaan Unit Pengolahan Sampah	Terolahnya sampah di unit pengelolaan sampah	30m3/ups/hari	DKP
6	Pengadaan peralatan pengolahan sampah	Terpenuhinya kebutuhan mesin pengelolaan sampah	30%	DKP
7	Kajian Perda Persampahan	Tersusunnya Perda Persampahan di Kota Depok	100%	DKP
8	Sosialisasi Unit Pengelolaan Sampah	Meningkatnya aspirasi masyarakat terhadap sistem pengelolaan dan pengolahan sampah terpadu dan memudahkan proses pengolahan sampah di lokasi UPS	300 orang dan 10 titik	DKP
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menurunnya Pencemaran Lingkungan		
1	Pemeliharaan IPLT	Terpeliharanya IPLT Kalimuya	40%	DKP
2	Pengelolaan IPLT	Terkelolanya IPLT Kalimuya	40%	DKP
3	Pengadaan sarana dan prasarana IPLT	Terkelolanya IPLT Kalimuya	40%	DKP
	Perencanaan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Ruang & Bangunan	Terkendalinya Ruang Terbuka Hijau		
1	Pembangunan taman separator Margonda segmen I	Tertatanya taman Kota	75%	DKP
2	Pemeliharaan Taman Kota Depok	Tertatanya taman Kota	75%	DKP
	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Data dan Informasi Keuangan yang Akurat		
1	Dukungan Peningkatan Potensi Retribusi Kebersihan	Terlaksananya monitoring dan peningkatan retribusi	70%	DKP
	Penyelenggaraan Jaminan Sosial	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial		
1	Operasional pelayanan TPU	Terkelolanya TPU	25%	DKP
2	Pembuatan Bangunan Pos Jaga TPU 3	Terkelolanya TPU	25%	DKP
3	Pembangunan jalan masuk ke TPU 2	Terkelolanya TPU	25%	DKP
4	Penataan TPU	Terkelolanya TPU		DKP
5	Pemasangan Lampu di TPU Kalimulya I, II, III	Terkelolanya TPU	25%	DKP
	Urusan : SKPD :	Perumahan Dinas Tata Ruang dan Permukiman		
	Penataan Lingkungan Pemukiman	Menurunnya Pemukiman Kumuh		

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Tersedianya bangunan rumah dan sarana masyarakat	10 rumah di 2 RW	Dinas Tarkim
2	Pengelolaan Rusunawa	Meningkatnya pelayanan pengguna Rusunawa	95%	Dinas Tarkim
Peningkatan Jangkauan Layanan Air Bersih				
1	Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kota Depok	Terpeliharanya jaringan pelayanan air bersih kepada masyarakat	10%	Dinas Tarkim
2	Penunjang Sarana dan Prasarana Air Bersih	Meningkatnya layanan air bersih kepada masyarakat	10%	Dinas Tarkim
Pembangunan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi Lingkungan (DAK)				
Urusan : SKPD :		Penataan Ruang Dinas Tata Ruang dan Permukiman		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Dinas Tarkim
2	Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor		Dinas Tarkim
3	Penyedia Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor		Dinas Tarkim
4	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan		Dinas Tarkim
5	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Dinas Tarkim
6	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga		Dinas Tarkim
7	Penyedia Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Penyediaan Makanan dan Minuman		Dinas Tarkim
8	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah		Dinas Tarkim
9	Penyediaan Sarana Informasi	Terpenuhinya Penyediaan Sarana Informasi		Dinas Tarkim
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Dinas Tarkim
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor		Dinas Tarkim
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Dinas Tarkim
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terpenuhinya Pelaporan Keuangan Semesteran		Dinas Tarkim
Peningkatan Manajemen Pelayanan		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Belanja Alat Kantor	Meningkatnya efisiensi kerja	75%	Dinas Tarkim
2	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	Terpenuhinya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Tahun 2009	3 Dokumen	Dinas Tarkim
3	Sosialisasi PERDA Bangunan	Terjaringnya aspirasi masyarakat		Dinas Tarkim
4	Gebyar Pelayanan IMB (Tindak Lanjut Pendataan Bangunan TA 2007)	Terpenuhinya retribusi IMB dan IPR Kota Depok		Dinas Tarkim
5	Kegiatan Evaluasi Administrasi Pemberian IUJK			Dinas Tarkim
Pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah		Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah		
1	Pembangunan Gedung Dibale Tahap VI	Tersedianya tempat kerja yang representatif bagi pegawai pemda kota Depok		Dinas Tarkim
2	Pembangunan Gedung Pramuka	Terlaksananya pembangunan struktur gedung Pramuka Kota Depok	45%	Dinas Tarkim
3	Pembangunan Gedung Kesenian	Terlaksananya pembangunan atap dan arsitektur gedung kesenian Kota Depok	75%	Dinas Tarkim
4	Rehabilitasi Kantor Kelurahan	Meningkatnya kinerja dan kenyamanan pegawai kelurahan	75%	Dinas Tarkim
5	Rehabilitasi Kantor Kecamatan	Meningkatnya kinerja dan kenyamanan pegawai kecamatan	75%	Dinas Tarkim
6	Pembangunan Sarana Pendukung Stadion Merpati Kota Depok Tahap II	Tersedianya konstruksi tribun dan genset stadion merpati	75%	Dinas Tarkim
7	Pekerjaan Pengendalian Anti Rayap pada Gedung Pemerintahan Kota Depok	Terwujudnya sertifikat layak huni bangunan pemerintah Kota Depok	75%	Dinas Tarkim
8	Pembangunan Tambah Ruang Gedung Kantor Kelurahan	Meningkatnya kinerja dan kenyamanan pegawai kelurahan		Dinas Tarkim
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan		Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Pelaksanaan Forum SKPD	Terjaringnya Aspirasi Masyarakat		Dinas Tarkim
2	Penyusunan Revisi Renstra Distarkim	Terpenuhinya Dokumen rencana strategis	1 Dokumen	Dinas Tarkim
Perencanaan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Ruang & Bangunan		Terkendalinya Ruang Terbuka Hijau		
1	Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	Berkurangnya bangunan yang melanggar IMB	1800 Bangunan	Dinas Tarkim
2	Verifikasi dan Penertiban Perijinan Bangunan	Tersedianya data verifikasi dan penertiban bangunan	360 bangunan	Dinas Tarkim
3	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 2 Kawasan	Tersedianya dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Arif Rahman Hakim, Nusantara dan Dewi Sartika	1 dokumen	Dinas Tarkim
4	Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat di JPO Margo-Detos (Running Text)	Tertatanya penempatan reklame sesuai estetika lingkungan	75%	Dinas Tarkim
5	Identifikasi Potensi, Masalah, dan Penjarangan Issue RTRW (2010-2030)	Tersedianya dokumen Identifikasi Potensi, Masalah, dan Penjarangan Issue RTRW (2010-2030)	1 dokumen	Dinas Tarkim
6	Penyusunan Naskah Akademis RTRW Kota Depok (2010-2030)	Tersedianya peta perijinan berbasis persil tata ruang	1 dokumen	Dinas Tarkim
7	Penyusunan Master Plan Penataan Tower Bersama Kota Depok	Tersedianya dokumen Penataan Tower Bersama Kota Depok	1 dokumen	Dinas Tarkim
8	Penyusunan Standarisasi Gedung Kantor Kelurahan dan Kecamatan Kota Depok	Terwujudnya dokumen DED Kantor Kelurahan dan Kecamatan Kota Depok	75%	Dinas Tarkim
Urusan : SKPD :		Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
1	Penyedia jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan kantor	100%	Bappeda
2	Penyedia alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	100%	Bappeda
3	Penyedia barang cetak dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	100%	Bappeda
4	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhanKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Bappeda
5	Penyedia peralatan rumah tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	100%	Bappeda
6	Penyedia makanan & minuman	Penyedia makanan & minuman	100%	Bappeda
7	Penyedia Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	Bappeda
8	Penyedia sarana informasi	Terpenuhinya kebutuhan sarana informasi	100%	Bappeda
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	100%	Bappeda
2	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100%	Bappeda
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Bappeda			Bappeda
	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Bintek Perencana			Bappeda
2	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Bappeda
3	Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2009	Terukurnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kondisi pelayanan publik di Kota Depok yang dijadikan sebagai bahan perencanaan peningkatan pelayanan publik di Kota Depok	80%	Bappeda
4	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC			Bappeda
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Penyusunan Perda Perencanaan Partisipatif	Tersedianya Perda Perencanaan Partisipatif	200 buku	Bappeda
2	Pelaksanaan Forum SKPD, Penyusunan Renstra dan Renja Bappeda	Tersedianya Rancangan kegiatan Bappeda TA 2010	80%	Bappeda
3	Penyelenggaraan Musrenbang 2009	Tersusunnya kegiatan pembangunan Tahun 2010	1 Dok	Bappeda
4	Survey dan Pengendalian Program SKPD	Terkendalinya kegiatan-kegiatan SKPD	80%	Bappeda
5	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010	Tersedianya dokumen RKPDP Tahun 2010	60 buku%	Bappeda
6	Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Meningkatnya koordinasi dan kualitas perencanaan bidang Sosial dan Budaya	80%	Bappeda
7	Penyusunan Data Profil Daerah	Tersusunnya data profil daerah		Bappeda
8	Kajian Strategi Peningkatan Kapasitas Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan	70%	Bappeda
9	Penyediaan Info Perencanaan dan Pembangunan Kota Depok	Tersistematisnya prioritas penataan Taman Kota Depok	80%	Bappeda
10	Penyusunan Model Good Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah	Meningkatnya kualitas perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka good governance	70%	Bappeda
11	Kajian Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Kota Depok	Tersedianya informasi dan data perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Kota Depok	80%	Bappeda
12	Pembuatan Sistem Informasi manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan	50%	Bappeda
13	Penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Kemiskinan	Terwujudnya penanggulangan kemiskinan Kota Depok	80%	Bappeda
14	Survey dan Analisa Model Perencanaan Pembangunan Perekonomian Tahun 2009	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan perekonomian	1 dok	Bappeda
15	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Depok			Bappeda
16	Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi	80%	Bappeda
17	Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Infrastruktur	Tersedianya data kegiatan bidang infrastruktur	50%	Bappeda
18	Penyusunan Indikator Ekonomi Kota Depok	Tersedianya dokumen PDRB dan IHK Kota Depok	2 dok	Bappeda
19	Penyusunan Rencana Pengembangan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah	Terwujudnya perencanaan pembangunan infrastruktur	75%	
	Perencanaan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Ruang & Bangunan	Terkendalinya Ruang Terbuka Hijau		
1	Penunjang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Terkendalinya penataan ruang kota yang ideal	40%	Bappeda
2	Pengembangan IDSD Kota Depok (Lanjutan)	Terlaksananya data tematik dan peralatan komputer IDSD	1 set dan jaringan	Bappeda
	Urusan : SKPD :	Penanaman Modal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Fasilitasi Tim Investasi Infrastruktur Kota Depok	Terjalannya koordinasi dalam percepatan investasi infrastruktur daerah	80%	Bappeda
2	Promosi Potensi Investasi Daerah	Terciptanya peluang investasi dan penanaman modal	80%	Bappeda
3	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah			Bappeda
	Urusan : SKPD :	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Fasilitasi Pelaksanaan Wadah Forum Warga	Tersusunnya masukan kebijakan pembangunan	1 Dok	Bappeda

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
	Urusan : SKPD :	Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Penyusunan Depok dan Kecamatan dalam Angka Tahun 2009	Tersedianya data-data statistik umum Kota Depok	80%	Bappeda
2	Penyusunan Buku IPM Kota Depok Tahun 2009	Tersedianya data dan informasi IPM Kota Depok Tahun 2009	100%	Bappeda
3	Penyusunan Buku INKESRA Kota Depok Tahun 2009	Tersedianya data dan informasi INKESRA Kota Depok Tahun 2009	100%	Bappeda
	Urusan : SKPD :	Perhubungan Dinas Perhubungan		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kinerja aparatur	10%	Dishub
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Meningkatnya kualitas Kebersihan dan Keamanan Kantor	10%	Dishub
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan 100%Alat Tulis Kantor	100%	Dishub
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Dishub
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Dishub
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	Dishub
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman	100%	Dishub
8	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas	100%	Dishub
9	Penyediaan Sarana Informasi	Meningkatnya kinerja aparatur	5%	Dishub
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya kualitas Kebersihan dan Keamanan Kantor	100%	Dishub
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	Dishub
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung	Meningkatnya kinerja aparatur	5%	Dishub
4	Penyediaan gedung Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur	5%	Dishub
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Meningkatnya kinerja aparatur	5%	Dishub
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terdapatnya laporan realisasi keuangan semesteran	12 buku%	Dishub
	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur	5%	Dishub
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	Terlaksananya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	12 bulan	Dishub
3	Penyediaan Barang Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor	Terlaksananya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor	12 bulan	Dishub
4	Penyediaan informasi dan Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan	Meningkatnya kinerja aparatur	5%	Dishub
5	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pemeliharaan Emplasemen Terminal	Terdapatnya pelayanan jasa terminal	12 bulan	Dishub
	Peningkatan Jangkauan Pelayanan	Terwujudnya Perluasan Jangkauan Pelayanan		
1	Penambahan Jam Pelayanan Perijinan dan PKB	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perijinan trayek dan PKB	15%	Dishub
2	Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan Lalu Lintas di Jalan			Dishub
3	Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan Kendaraan di sekitar Terminal			Dishub
	Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah melalui Diklat Struktural dan Fungsional	Meningkatnya Profesionalitas SDM Pemerintahan Daerah		Dishub
1	Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional	Terwujudnya peningkatan karier jabatan fungsional	5%	Dishub
2	Bimbingan Teknis Orientasi LLAJ	Meningkatnya pengetahuan apatur di bidang LLAJ	100%	Dishub
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Peningkatan Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Penyelenggaraan Forum SKPD)	Tersusunnya usulan program /kegiatan DLLAJ 2009	1 Dok, 5 buku	Dishub
2	Lelang Investasi dalam Optimalisasi Terminal Margonda Kota Depok	Meningkatnya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan pekerjaan	5%	Dishub
3	Penyusunan Master Plan Penerangan Jalan Umum	Tersedianya informasi PJU Kota Depok	50%	Dishub
	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Meningkatnya Kualitas Jaringan Transportasi		
1	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Meningkatnya sarana dan prasarana PJU	10%	Dishub
2	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Terpeliharanya penerangan jalan umum	20%	Dishub
3	Pengendalian dan Pengawasan Rekening PJU	Meningkatnya efisiensi pembayaran rekening PJU	5%	Dishub
4	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas, RPPJ dan Papan Nama Jalan	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas	5%	Dishub
5	Pengecatan Marka Jalan, Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan	Meningkatnya ketertiban, kelancaran dan keselamatan bagi pengguna jalan	5%	Dishub
6	Pengadaan dan Pemasangan Warnig Light	Meningkatnya kewaspadaan dan keselamatan bagi pengguna jalan	10%	Dishub
7	Pengadaan dan Pemasangan Zebra Cross dan Pita Penggadu	Meningkatnya kewaspadaan dan keselamatan bagi pengguna jalan	10%	Dishub
8	Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi Elektronik (Running Text Bar)	Meningkatnya informasi untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas	10%	Dishub
9	Pembangunan Gedung UPTD PJU	Meningkatnya kinerja aparatur	5%	Dishub

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
Pengembangan Manajemen Transportasi		Menurunnya Titik Kemacetan		
1	Operasional Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas di Jalan	Meningkatnya ketertiban lalu lintas pada daerah rawan kemacetan	5%	Dishub
2	Pengadaan dan Pemasangan Separator Portable dan Pagar	Meningkatnya ketertiban lalu lintas pada daerah rawan kemacetan	5%	Dishub
3	Sewa Lahan Pangkalan Angkutan Umum	Terciptanya ketertiban angkutan umum	10%	Dishub
4	Pemeliharaan Rambu dan RPPJ dan Traffic Light	Meningkatnya usia ekonomis Rambu dan RPPJ	5%	Dishub
5	Evaluasi Kebutuhan Angkutan Penumpang Umum	Diketahuinya kinerja tingkat pelayanan angkutan umum	20%	Dishub
6	Pemeliharaan Separator/Median Jalan	Meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas	5%	Dishub
7	Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan	Terdapatnya data yang representatif untuk perencanaan transportasi	100%	Dishub
8	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Led Count Down dan Pedestrian Crossing	Meningkatnya fungsi traffic light di persimpangan	100%	Dishub
9	Koordinasi Lintas Sektor/ Bidang Lalu Lintas	Meningkatnya ketertiban lalu lintas pada daerah rawan kemacetan	5%	Dishub
10	Sosialisasi Tertib Lalu Lintas	Meningkatnya pengetahuan masyarakat pengguna jalan dalam berlalulintas	5%	Dishub
11	Kajian Sistem Shift Angkutan Umum	Menurunnya kepadatan lalu lintas di ruas jalan	10%	Dishub
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup		Menurunnya Pencemaran Lingkungan		
1	Penghijauan Lingkungan Terminal Kota Depok	Meningkatnya penghijauan di lingkungan terminal Depok	19%	Dishub
Urusan : SKPD :		Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Terpenuhinya komunikasi dan penerangan kantor	100%	BLH
2	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Terciptanya keamanan dan kenyamanan kantor	100%	BLH
3	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kelancaran administrasi perkantoran	100%	BLH
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kelancaran administrasi perkantoran	100%	BLH
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan penerangan kantor	100%	BLH
6	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	90%	BLH
7	Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya kelancaran rapat-rapat badan	70%	BLH
8	Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Terpenuhinya kelancaran tugas dinas	80%	BLH
9	Penyediaan sarana informasi	Terpenuhinya informasi BPLH	100%	BLH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan bermotor	Terwujudnya Kelancaran Tugas/Operasional Dinas	50%	BLH
2	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terwujudnya kelancaran kerja	80%	BLH
3	Penyediaan Gedung Kantor	Terpenuhinya prasarana kerja	100%	BLH
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran	100%	BLH
Peningkatan Manajemen Pelayanan		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi	80%	BLH
2	Pengadaan Peralatan Laboratorium	Tersedianya Peralatan Lab	100%	BLH
3	Pengadaan Mobil Sampling	Terlaksananya kelancaran operasional pengendalian limbah	80%	BLH
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan		Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Pelaksanaan Forum SKPD dan Penyusunan Renja	Tersampainya aspirasi masyarakat dalam usulan kegiatan SKPD	60%	BLH
2	Penyusunan Renstra			BLH
3	Kajian Raperda Limbah Cair	Tersedianya Kajian Raperda Limbah Cair	100%	BLH
4	Kajian Raperda Limbah B3	Tersedianya Kajian Raperda Limbah B3		BLH
5	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan (lisensi AMDAL, kajian limbah dan SLHD)	Tersedianya prosedur dan pemantauan lingkungan	30%	BLH
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup		Menurunnya Pencemaran Lingkungan		
1	Peringatan Hari Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan LH	60%	BLH
2	Sosialisasi dan Percontohan B3 dan Workshop Produksi Bersih	Terdapatnya data limbah B3	100 Perusahaan	BLH
3	Pembinaan dan pemantauan pengelolaan lingkungan	Tersedianya data kualitas dan meningkatnya kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	20%	BLH
4	Pemantauan dan evaluasi Kualitas Air dan Udara	Terdapatnya Kualitas Air dan udara di Kota Depok	6 ttk ambien, 6 ttk emisi, 19 ttk siku, 16 ttk sungai	BLH
5	Pemantauan Limbah Cair Industri, Limbah B3, Limbah Domestik dan Pemantauan IPLC	Terkendalinya kualitas limbah cair industri dan domestik di Kota Depok		BLH
6	Pendampingan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis/GERHAN	Mengurangi Jumlah Luasan Lahan Kritis yang berada di kota Depok	40%	BLH
7	Penghijauan Lingkungan	Mengurangi Pemanasan Global	40%	BLH
8	Fasilitasi Pemeliharaan Taman Hutan Raya			BLH
9	Monitoring dan Pengendalian Air Bawah Tanah	Tersedianya informasi data tentang pemanfaatan air bawah tanah	25 lokasi	BLH
Pengendalian Banjir		Menurunnya Kawasan Banjir		
1	Pembinaan situ berbasis masyarakat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan situ	60%	BLH
2	Konservasi Daerah Aliran Sungai	Terkelolanya Kawasan Konservasi DAS	40%	BLH
Urusan :		Kependudukan dan Catatan Sipil		

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
	SKPD :	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	Disudkcapil
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terjaganya kebersihan kantor	100%	Disudkcapil
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	Disudkcapil
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	Disudkcapil
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	Disudkcapil
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	Disudkcapil
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	Disudkcapil
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri	Meningkatnya kinerja aparatur	100%	Disudkcapil
9	Penyediaan Sarana Informasi	Bertambahnya informasi	100%	Disudkcapil
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan kegiatan tupoksi	100%	Disudkcapil
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya kenyamanan pelaksanaan kegiatan	100%	Disudkcapil
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya kenyamanan dalam pelaksanaan kegiatan	100%	Disudkcapil
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan realisasi keuangan semesteran	100%	Disudkcapil
	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur	80%	Disudkcapil
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Terwujudnya pembangunan yang aspiratif		
1	Pelaksanaan Forum SKPD	Terusunnya usulan program /kegiata Disudkcapil Tahun 2010	80%	Disudkcapil
	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Manajemen Kependudukan	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan		
1	Implementasi Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD)	Tersedianya data base kependudukan	70%	Disudkcapil
2	Pelayanan Pencatatan Perkawinan (Perkawinan diluar jam kerja dan Perkawinan Masal)	Tercapainya pembuatan akta perkawinan	80%	Disudkcapil
3	Pelayanan Dokumen Administrasi Catatan Sipil	Terlaksananya penerbitan akta catatan sipil	15,000 akta dan 1260 akta prasejahtera	Disudkcapil
4	Pemutakhiran Database Kependudukan	Jumlah penduduk dan DCP Pemilu dan Pilpres	95%	Disudkcapil
5	Pemeliharaan Dokumen Kependudukan	Tertatanya dokumen kependudukan dan catatan sipil	100%	Disudkcapil
6	Penertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Tertib administrasi kependudukan	60%	Disudkcapil
7	Sosialisasi Kependudukan	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan	75%	Disudkcapil
	Urusan : SKPD :	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air, Listrik dan Telepon	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber daya Air, Listrik dan Telepon	100%	BPPKB
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	100%	BPPKB
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	BPPKB
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	BPPKB
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	BPPKB
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	BPPKB
7	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya kehadiran Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	100%	BPPKB
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	100%	BPPKB
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%	BPPKB
3	Penyediaan Gedung Kantor	Terlaksananya sewa Gedung Kantor	100%	BPPKB
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		100%	BPPKB
	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan dan melancarkan kinerja pegawai dalam pelayanan	40%	BPPKB
2	Pengadaan Meubelair	Meningkatkan dan melancarkan kinerja pegawai dalam pelayanan	100%	BPPKB
	Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah melalui Diklat Struktural dan Fungsional	Meningkatnya Profesionalitas SDM Pemerintahan daerah		
1	Penunjang Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional	Meningkatnya kinerja tenaga fungsional	80%	BPPKB

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Forum SKPD	Tersusunnya rencana kegiatan SKPD	80%	BPPKB
	Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera	Meningkatnya Kualitas Masyarakat		
1	Penunjang Pemberdayaan Pokjnal Posyandu	Meningkatnya kinerja Pokjnal Posyandu	40%	BPPKB
2	Penyuluhan Tentang Peningkatan Kualitas keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga Pra KS dan KS I	70%	BPPKB
3	Pelatihan Usaha Ekonomi bagi Perempuan Kepala Keluarga Miskin	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi keluarga para perempuan kepala keluarga miskin	70%	BPPKB
4	Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	Tersedianya buku evaluasi Kota Depok	25 buku	BPPKB
5	Penyusunan Profil Gender	Tersedianya buku profil gender Kota Depok Tahun 2009	100 buku	BPPKB
6	Sosialisasi undang-undang Perdagangan Orang	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah (RAD) Penghapusan Eksploitasi Pekerja Anak	1 Rancangan	BPPKB
7	Fasilitasi Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2T2A)	Terfasilitasinya kebutuhan perempuan dan anak termasuk penyelesaian kasus/masalah yang dihadapi perempuan dan anak	70 orang / 10 kasus	BPPKB
8	Rehab Rumah Tidak Layak Huni di Lokasi (P2WKSS)	Tersedianya bangunan rumah layak huni dan sarana masyarakat	5 rumah, 1 unit MCK	BPPKB
9	Sosialisasi Undang-undang tentang Perlindungan Anak	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak anak dan perlindungan anak	60 orang	BPPKB
10	Sosialisasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang KDRT dan perlindungan perempuan	60 orang	BPPKB
	Urusan : SKPD :	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		
	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan		
1	Pembinaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas lapangan keluarga berencana	40%	BPPKB
	Penyelenggaraan dan Peningkatan Kesehatan Keluarga	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Keluarga		
1	Intensifikasi Kegiatan Pelayanan Program KB dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya cakupan peserta KB dan kesehatan reproduksi khususnya dari keluarga pra KS dan KS I (keluarga miskin)	40%	BPPKB
2	Peningkatan Kualitas Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Balita Kesiapan Masuk Sekolah (BKB-Kemas), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia, Bina Lingkungan Keluarga (BLK)	Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Balita Kesiapan Masuk Sekolah (BKB-Kemas), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia, Bina Lingkungan Keluarga (BLK)	40%	BPPKB
3	Pencatatan dan Pelaporan Program KB dan Kesehatan Reproduksi	Bahan evaluasi untuk perencanaan program dan kesehatan reproduksi	40%	BPPKB
4	Penunjang Operasional KB-Kesehatan dalam rangka Bhakti IBI dan Hari Kesatuan Gerak PKK	Meningkatnya pelayanan KB dan kesehatan keluarga	40%	BPPKB
5	Pendataan Keluarga dan Informasi Keluarga Berencana	Meningkatnya keakuratan/validnya data keluarga di Kota Depok	40%	BPPKB
6	TNI Manunggal KB-Kesehatan	Meningkatnya cakupan layanan KB dan Kesehatan Keluarga	20%	BPPKB
7	Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Kota Depok	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman kader pos KB, Keluarga dan Pengelola KB	40%	BPPKB
8	Lomba Ketahanan Keluarga	Meningkatnya kualitas kelompok BKB, BKR, BKL, BLK dan keluarga KB Lestari	40%	BPPKB
9	KIE dan Advokasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya Pengetahuan dan keterampilan Remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	25%	BPPKB
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana PLKB, Klinik KB dan Kelompok BKB	Meningkatnya cakupan peserta KB di Kota Depok	25%	BPPKB
	Urusan : SKPD :	Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial		
	Penyelenggaraan Jaminan Sosial	Menurunnya Masalah Kesejahteraan Sosial		
1	Pengelolaan dan Pemberian Santunan Kematian	Tersalurkannya santunan kematian	100%	Disnakersos
2	Pelaksanaan Nikah Massal	Terlaksananya nikah massal bagi penduduk Kota Depok	75%	Disnakersos
3	Pemberdayaan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial	Terlaksananya bimbingan dan pelatihan keterampilan PMKS	60%	Disnakersos
4	Fasilitasi Pemulangan Orang Terlantar Diperjalanan	Berkurangnya orang terlantar di Kota Depok	55%	Disnakersos
5	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kota Depok	Tercapainya penyelenggaraan dan penataan taman makam pahlawan	80%	Disnakersos
6	Sosialisasi Perundang-undangan Sosial Penyandang Cacat	Meningkatnya kesejahteraan sosial penyandang cacat	60%	Disnakersos
	Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Ormas Dalam Pembangunan		
1	Fasilitasi dan pelatihan kewirausahaan bagi potensi sumber kesejahteraan sosial	Terlaksananya fasilitasi dan pelatihan kewirausahaan bagi potensi sumber kesejahteraan sosial	75%	Disnakersos
	Penanggulangan Bencana			
1	Pelatihan Petugas Penanggulangan Bencana	Peningkatan layanan penanggulangan bencana	80%	Disnakersos
	Urusan : SKPD :	Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	60%	Disnakersos
2	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor	100%	Disnakersos
3	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhi kebutuhan alat tulis kantor	100%	Disnakersos
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhi barang cetakan dan penggandaan	100%	Disnakersos
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	80%	Disnakersos
6	Penyediaan Alat Rumah Tangga	Tersedianya Alat Rumah Tangga	100%	Disnakersos

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
7	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	100%	Disnakersos
8	Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	Meningkatnya Kapasitas Kinerja Aparatur	100%	Disnakersos
9	Penyediaan sarana informasi	Tersedianya sarana informasi	100%	Disnakersos
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	100%	Disnakersos
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	100%	Disnakersos
3	Sewa Gedung Kantor	Terlayaninya masyarakat Kota Depok	60%	Disnakersos
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Tersedianya sistem pelaporan kinerja keuangan	100%	Disnakersos
Peningkatan Manajemen Pelayanan		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	80%	Disnakersos
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan		Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Penyelenggaraan Forum SKPD	Terevaluasinya dan terencanaanya kegiatan bidang tenaga kerja dan sosial	100%	Disnakersos
Peningkatan Kualitas Ketenagakerjaan		Tersedianya Tenaga Kerja Terlatih		
1	Pelatihan Servis HP dan Elektronik		80%	Disnakersos
2	Pelatihan Montir Sepeda Motor Roda Dua	Tersedianya tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja	80%	Disnakersos
3	Pelatihan Advokasi Perburuhan	Meningkatnya pengetahuan tentang peraturan perburuhan	80%	Disnakersos
4	Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja	Tersebaranya Informasi Pasar kerja	75%	Disnakersos
5	Sosialisasi Ketenagakerjaan dan Sosial		80%	Disnakersos
6	Pembangunan gedung Balai Latihan Kerja Kota Depok	Tersedianya sub struktur, struktur & arsitektur gedung balai latihan kerja Kota Depok	75%	Disnakersos
Urusan : SKPD :		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Tenaga Kerja dan Sosial		
Perlindungan Ketenagakerjaan		Meningkatnya Hubungan Industrial Tenaga Kerja dengan Pengusaha		
1	Bimbingan Teknis Ketenagakerjaan LKS Bipartit dan LKS Tripartit	Meningkatnya layanan perselisihan hubungan industrial	80%	Disnakersos
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			
3	Fasilitasi Pembentukan P2K3 pada Perusahaan di Kota Depok	Terbentuknya P2K3 pada perusahaan	80%	Disnakersos
4	Loka Karya Norma Ketenagakerjaan	Meningkatnya pengawasan, norma kerja dan kesehatan kerja	70%	Disnakersos
5	Penetapan UMK di Kota Depok	Penetapan UMK di Kota Depok	80%	Disnakersos
Urusan : SKPD :		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, UKM dan Pasar		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Dinas KUKM & Pasar
2	Penyedia Jasa Kebersihan & Keamanan Kantor	Terpenuhinya Jasa Kebersihan & Keamanan Kantor	100%	Dinas KUKM & Pasar
3	Penyedia Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	Dinas KUKM & Pasar
4	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan Cetak dan Penggandaan	100%	Dinas KUKM & Pasar
5	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Dinas KUKM & Pasar
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	100%	Dinas KUKM & Pasar
7	Penyediaan sarana Informasi	Meningkatnya wawasan pegawai	50%	Dinas KUKM & Pasar
8	Penyedia Makan dan Minuman	Penyedia Makan dan Minuman	100%	Dinas KUKM & Pasar
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas	100%	Dinas KUKM & Pasar
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Dinas KUKM & Pasar
3	Penyediaan Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan gedung kantor	100%	Dinas KUKM & Pasar
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja SKPD	100%	Dinas KUKM & Pasar
Peningkatan Produktifitas Usaha Koperasi dan UKM		Meningkatnya Pendapatan Anggota Koperasi dan UKM		
1	Sarasehan Gerakan Koperasi	Terpenuhinya aspirasi gerakan koperasi	40%	Dinas KUKM & Pasar
2	Sosialisasi Perkuatan Permodalan Koperasi dengan BUMN	Meningkatnya kemampuan koperasi dalam mengakses permodalan	25%	Dinas KUKM & Pasar
3	Pelatihan pengembangan Manajemen Koperasi	Meningkatnya pengetahuan calon anggota koperasi	40%	Dinas KUKM & Pasar
4	Pemutakhiran Data Koperasi	Tersedianya data informasi koperasi	50%	Dinas KUKM & Pasar
5	Optimalisasi Program Perkuatan Permodalan bagi Penerima Dana Bergulir	Meningkatnya kemampuan dan kualitas dalam pengembalian dana bergulir	100%	Dinas KUKM & Pasar
6	Konsolidasi dengan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank dalam Rangka Penjaminan Perkuatan Modal UKM	Meningkatnya kemampuan dan perkembangan usaha UKM	30%	Dinas KUKM & Pasar
7	Sosialisasi Program Kemitraan Bina Lingkungan (BKBL) dengan Lembaga Non Bank sebagai Alternatif Perkuatan Modal	Terwujudnya perolehan dana perkuatan modal yang murah	40%	Dinas KUKM & Pasar
8	Pemutakhiran Data Kelembagaan UMKM	Meningkatnya kualitas data kelembagaan UKM	60%	Dinas KUKM & Pasar
9	Pembinaan Kelembagaan UMKM	Meningkatnya kemampuan SDM kelembagaan UMKM	60%	Dinas KUKM & Pasar

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
10	Pendataan Profil Kelembagaan UMKM	Meningkatnya kualitas data kelembagaan UMKM	60%	Dinas KUKM & Pasar
11	Fasilitasi Calaan Wirausaha dengan UKM	Meningkatnya keterampilan peserta pelatihan	60%	Dinas KUKM & Pasar
12	Pengelolaan Tempat Promosi UMKM (ITC)	Meningkatnya volume penjualan	60%	Dinas KUKM & Pasar
13	Pameran Produk UKM	Meningkatnya volume penjualan produk UMKM	60%	Dinas KUKM & Pasar
14	Penerapan Model Inkubator UKM	Meningkatnya kemampuan SDM UKM	60%	Dinas KUKM & Pasar
Urusan : Ketahanan Pangan SKPD : Dinas Koperasi, UKM dan Pasar				
Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat		Tertatanya Pasar Tradisional		
1	Perbaikan Bangunan Gedung Pasar Cisalak	Terciptanya kondisi gedung yang bersih dan nyaman	100%	Dinas KUKM & Pasar
2	Pengadaan dan Perbaikan PJU Pasar	Penerangan yg memadai	100%	Dinas KUKM & Pasar
Urusan : Perdagangan SKPD : Dinas Koperasi, UKM dan Pasar				
Peningkatan Manajemen Pelayanan		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Pelayanan Pengangkutan sampah	Terangkutnya sampah pasar ke TPA	100%	Dinas KUKM & Pasar
2	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Petugas Kebersihan Pasar	Meningkatnya kinerja petugas kebersihan	100%	Dinas KUKM & Pasar
3	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Petugas Kebersihan Pasar (TIBSAR)	Meninkatnya kinerja petugas ketertiban pasar	100%	Dinas KUKM & Pasar
4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	50%	Dinas KUKM & Pasar
5	Peningkatan dan pemeliharaan sarana penanggulangan kebakaran	Meningkatnya sarana penanggulangan kebakaran	65%	Dinas KUKM & Pasar
6	Evaluasi Pelaksanaan NPWRP	Tercapainya retribusi pasar yang optimal	75%	Dinas KUKM & Pasar
7	Penggantian Suku Cadang dan Pemeliharaan Kendaraan Angkutan Sampah Pasar	Terangkutnya sampah pasar	7 Pasar	Dinas KUKM & Pasar
Peningkatan Jangkauan Pelayanan				
1	Pelayanan Retribusi Pasar	Terpenuhinya pelayanan retribusi pasar	50%	Dinas KUKM & Pasar
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Persampahan di TPS				
1	Operasional dan Pemeliharaan UPS Pasar Kemiri Muka dan Cisalak	Meningkatnya penanggulangan dan pemanfaatan sampah	50%	Dinas KUKM & Pasar
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan				
1	Penyusunan Revisi Renstra Dinas	Tersedianya dokumen Renstra	75%	Dinas KUKM & Pasar
2	Forum SKPD	Meningkatnya kualitas perencanaan	50%	Dinas KUKM & Pasar
Pengembangan dan Penataan Pasar Rakyat				
1	Penertiban dan Pengelolaan Pedagang di Lingkungan Pasar	Tercapainya pasar yang aman dan nyaman	70%	Dinas KUKM & Pasar
2	Pembangunan Gapura Pasar Cisalak	Terlaksananya pembuatan gapura	50%	Dinas KUKM & Pasar
Urusan : Kebudayaan SKPD : Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya				
Peningkatan Pelestarian Seni dan Budaya		Meningkatnya Seni dan Budaya		
1	Temu Pelaku Seni dan Budaya	Meningkatnya peran serta artis dan seniman dalam pembangunan	40 artis dan seniman	Dinas Pemuda
2	Pemilihan dan Pembinaan Abang dan Mpok Depok dan Pengiriman Mojang Jejaka Jawa Barat	Adanya duta wisata di Kota Depok	3 pasang, 1 favorit, 1 fotogenik	Dinas Pemuda
3	Pentas seni dan budaya	Tergalinya folklot Kota Depok	100%	Dinas Pemuda
4	Pesan Inspiratif Berbasis Seni Tradisi	Melestarikan seni tradisi sebagai hiburan edukatif inspiratif	5 tempat	Dinas Pemuda
5	Festival Seni dan Budaya			
6	Pembinaan Kesenian dan Kebudayaan	Berkembangnya kesenian Tradisional Kota Depok	100%	Dinas Pemuda
Urusan : Kepemudaan dan Olah Raga SKPD : Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Dinas Pemuda
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya Kebersihan kantor	100%	Dinas Pemuda
3	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	100%	Dinas Pemuda
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	Dinas Pemuda
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tepenuhinya kelancaran perangkat listrik kantor	90%	Dinas Pemuda
6	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	100%	Dinas Pemuda
7	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	100%	Dinas Pemuda
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	Dinas Pemuda
9	Penyediaan sarana informasi	Terpenuhinya kebutuhan surat kabar dan majalah	100%	Dinas Pemuda
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur				
1	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya sarana angkutan kendaraan dinas/operasional	80%	Dinas Pemuda
2	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor dan rumah tangga	Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga	80%	Dinas Pemuda
3	Penyediaan Gedung Kantor	Meningkatnya kinerja aparatur	80%	Dinas Pemuda
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terdapatnya laporan realisasi keuangan semesteran	12 buku	Dinas Pemuda

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Meningkatnya kinerja pelayanan aparatur	75%	Dinas Pemuda
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Penyelenggaraan Forum SKPD	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	70%	Dinas Pemuda
	Peningkatan Pembinaan Generasi Muda, Olah Raga dan Seni Budaya di Sekolah	Meningkatnya Prestasi Generasi Muda, Olah Raga dan Seni Budaya di Sekolah		
1	Peringatan Haornas	Meningkatnya pemahaman tentang penting peringatan Haornas	20%	Dinas Pemuda
2	Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibraka serta Seleksi dan Pengiriman Peserta Pemuda Pelopor	Terbentuknya pasukan pengibar Bendera Pusaka dan terpilihnya PP tingkat Kota dan Utusan ke Propinsi dan Nasional	20%	Dinas Pemuda
3	Pekan Olahraga Pemerintah Kota (Porpemekot)	Meningkatnya Prestasi Olahraga	25%	Dinas Pemuda
4	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan Bagi Anggota Karang Taruna			Dinas Pemuda
5	Pekan Olahraga Pondok Pesantren	Meningkatnya Prestasi Olahraga Santri Pondok Pesantren	25%	Dinas Pemuda
	Peningkatan Prestasi Olah Raga	Meningkatnya Prestasi Olah raga		
1	Penyelenggaraan Porpemma Propinsi Jawa Barat Tahun 2009	Meningkatnya Prestasi Olahraga Kota Depok	70%	Dinas Pemuda
2	Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga Pemerintah Kota Depok	Meningkatnya kebugaran aparatur pemerintah Kota Depok	75%	Dinas Pemuda
3	Penunjang Stimulan Bantuan Keuangan Kegiatan Olahraga	Meningkatnya prestasi olah raga di masyarakat Kota Depok	70%	Dinas Pemuda
4	Korps Musik Gita Praja Setda Kota Depok	Meningkatnya Kinerja Korps Musik Gita Praja Kota Depok	70%	Dinas Pemuda
5	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Tahun 2009	Peningkatan Sumber daya manusia Kota Depok	75%	Dinas Pemuda
Urusan :		Pariwisata		
SKPD :		Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya		
	Pengembangan Obyek Wisata	Tertatanya Obyek Wisata		
1	Penyelenggaraan Lomba Makanan Khas Kota Depok	Meningkatnya potensi makanan khas Depok yan menjadi unggulan	makanan khas	Dinas Pemuda
2	Promosi potensi wisata belanja	Tersebarluaskannya informasi tentang potensi wisata belanja	65%	Dinas Pemuda
3	Pengembangan core bisnis Pariwisata	Meningkatnya industri di bidang Kepariwisata Kota Depok	60%	Dinas Pemuda
4	Pengembangan sarana wisata air Situ Pedongkelan	Meningkatnya kunjungan wisata air	60%	Dinas Pemuda
5	Penyusunan data base Usaha Jasa dan Sarana Wisata	Tersedianya data base para pengusaha di sektor Jasa dan Sarana Wisata	75%	Dinas Pemuda
Urusan :		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri		
SKPD :		Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kinerja operasional kantor	75%	Kantor Kesbanglinmas
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan	Meningkatnya kebersihan	90%	Kantor Kesbanglinmas
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya sarana kerja kantor	90%	Kantor Kesbanglinmas
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya sarana perkantoran	80%	Kantor Kesbanglinmas
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya sarana penerangan kantor	90%	Kantor Kesbanglinmas
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya peralatan rumah tangga	90%	Kantor Kesbanglinmas
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya sarana keperluan rapat	90%	Kantor Kesbanglinmas
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya penunjang sarana koordinasi	90%	Kantor Kesbanglinmas
9	Penyediaan Sarana Informasi	Meningkatnya sarana informasi	90%	Kantor Kesbanglinmas
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya kendaraan dinas	90%	Kantor Kesbanglinmas
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya sistem kerja	90%	Kantor Kesbanglinmas
3	Penyediaan Gedung Perkantoran	Tersedianya gedung kantor	90%	Kantor Kesbanglinmas
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan	90%	Kantor Kesbanglinmas
	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Pengadaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor	90%	Kantor Kesbanglinmas
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Terwujudnya pembangunan yang aspiratif		
1	Pelaksanaan Forum SKPD	Terwujudnya penyelenggaraan Forum SKPD	90%	Kantor Kesbanglinmas
	Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik			
1	Verifikasi Bantuan Parpol	Meningkatnya peran dan Fungsi partai politik	90%	Kantor Kesbanglinmas
2	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu 2009			
3	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009	Meningkatnya pemahaman pengetahuan dan partisipasi masyarakat	60%	Kantor Kesbanglinmas
Urusan :		Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
SKPD :		Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat		
Peningkatan Tertib Sosial		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Penegakan Perda		
1	Pelaksanaan Desiminasi Ranham	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman HAM	100 orang	Kantor Kesbanglinmas
2	Pelatihan Anggota satuan Linmas	Meningkatnya pengetahuan anggota linmas dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	100 orang	Kantor Kesbanglinmas
3	Fasilitasi Kegiatan PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat)	Meningkatnya kewaspadaan terhadap aliran kepercayaan	70%	Kantor Kesbanglinmas
4	Fasilitasi Kegiatan KOMIDA	Meningkatnya Stabilitas keamanan kota Depok	80%	Kantor Kesbanglinmas
5	Fasilitasi FKUB	Meningkatnya rasa hormat antar umat beragama		Kantor Kesbanglinmas
6	Pengadaan Seragam Linmas Kecamatan	Meningkatnya kinerja anggota satuan linmas	20%	Kantor Kesbanglinmas
7	Pengadaan Alat-Alat Penanggulangan Bencana	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	75%	Kantor Kesbanglinmas
Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan		Meningkatnya Peran Serta Pemuda dan Ormas Dalam Pembangunan		
1	Fasilitasi Pengiriman Peserta Pelatihan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman wawasan kebangsaan organisasi masyarakat, orsospol dan LSM, Tokoh masyarakat	75%	Kantor Kesbanglinmas
Urusan :		Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
SKPD :		Sekretariat Daerah		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Bag. Umum, Setda
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	100%	Bag. Umum, Setda
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Memperlancar Pelayanan Terhadap Masyarakat	80%	Bag. Aset, Setda
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Memperlancar Pelayanan Terhadap Masyarakat	70%	Bag. Aset, Setda
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Bag. Umum, Setda
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya peralatan rumah tangga	100%	Bag. Umum, Setda
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Meningkatnya sarana keperluan rapat	100%	Bag. Umum, Setda
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya penunjang sarana koordinasi	70%	Bag. Keu, Setda
9	Penyediaan bahan bacaan Surat Kabar dan Majalah	Meningkatnya penyampaian informasi	70%	Bag. Humas, Setda
10	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi perkantoran	Terpenuhinya honorarium TKK	100%	Bag. Kepeg, Setda
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Kendaraan Bermotor	100%	Bag. Umum, Setda
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Bag. Umum, Setda
3	Sewa Gedung Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat	100%	Bag. Umum, Setda
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	Bag. Umum, Setda
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhinya Bahan Pakaian Dinas Harian	100%	Bag. Aset, Setda
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
1	Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam pengadaan barang/jasa	20%	Bag. Pemb, Setda
2	Pengelolaan kegiatan tugas belajar IPDN dan Beasiswa S2 bagi PNS pemerintah Kota Depok	Terwujudnya pembelajaran yang baik di IPDN serta tersedianya pegawai yang berpendidikan S2	70%	Bag. Kepeg, Setda
3	Diklat teknis bimbingan teknis, seminar, lokakarya dan semiloka implementasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya pegawai yang memiliki pengetahuan dalam implementasi peraturan perundang-undangan	100%	Bag. Kepeg, Setda
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya LAKIP Setda	1 Dok	Bag. Keu, Setda
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	70%	Bag. Keu, Setda
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Meningkatnya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		
1	Kunjungan kerja/ inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Terpenuhinya penyelenggaraan Kunjungan kerja/ inspeksi KDH/ WKDH	100%	Bag. Keu, Setda
2	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah lainnya	Terpenuhinya Koordinasi dgn Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah lainnya	100%	Bag. Keu, Setda
3	Keprotokoleran Pemerintah Daerah	Terpenuhinya penyelenggaraan kegiatan keprotokoleran Pemerintah Kota Depok	100%	Bag. Humas, Setda
Peningkatan Manajemen Pelayanan		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor	Terpenuhinya jasa peralatan & perlengkapan kantor	100%	Bag. Umum, Setda
2	Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda	Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan masing-masing bagian di lingkup Setda	80%	Bag. Keu, Setda
3	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Terpenuhinya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	100%	Bag. Keu, Setda
4	Pengadaan Mobil dan Motor Operasional	Tersedianya mobil dan motor operasional untuk aparatur Pemerintah Kota Depok	60%	Bag. Umum, Setda
5	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah aparatur memahami Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	80%	Bag. Pem dan Otda
6	Pendukung operasional peliputan dan kehumasan	Meningkatnya peliputan kegiatan pemerintahan	70%	Bag. Humas, Setda
7	Talkshow Walikota dan Wakil Walikota	Terciptanya interaksi langsung antara pimpinan Kota Depok dengan masyarakat	70%	Bag. Humas, Setda

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
8	Pembuatan Buku Sambutan Walikota dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya pelayanan informasi	70%	Bag. Humas, Setda
9	Pengelolaan Media Internet Kehumasan	Meningkatnya pelayanan sistem informasi melalui media center	70%	Bag. Humas, Setda
10	Peningkatan Sinkronisasi Program dan Penganggaran	Tersedianya data tentang rekonsiliasi penganggaran	80%	Bag. Keu, Setda
11	Pembuatan Kliping Berita	Meningkatnya pelayanan informasi	70%	Bag. Humas, Setda
12	Pengumuman dan Penulisan Advetorial Pembangunan Kota Depok	Meningkatnya pelayanan informasi melalui media cetak	60%	Bag. Humas, Setda
13	Pelayanan Pengaduan	Meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat	65%	Bag. Humas, Setda
14	Penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan & perlengkapan kantor	100%	Bag. Aset, Setda
	Peningkatan Jangkauan Pelayanan	Terwujudnya perluasan jangkauan pelayanan		
1	Fasilitasi Kecamatan Pemekaran	Terbentuknya 5 Kec Baru hasil pemekaran	5 Kec baru	Bag. Pem dan Otda
	Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah melalui Diklat Struktural dan Fungsional	Meningkatnya Profesionalitas SDM Pemerintahan Daerah		
1	Diklat Prajabatan CPNS	Terpenuhinya persyaratan pengangkatan CPNS tahun 2008 menjadi PNS	100%	Bag. Kepeg, Setda
2	Diklat Kepemimpinan tingkat II,III, dan IV	Terpenuhinya persyaratan pejabat dan calon pejabat struktural eselon II,III dan IV	100%	Bag. Kepeg, Setda
3	Penegakan disiplin pegawai dan seleksi penerima Satya Lencana Karya Satya	Tegaknya disiplin pegawai dan penghargaan pegawai di lingkungan pemerintah Kota Depok	80%	Bag. Kepeg, Setda
4	Ujian kenaikan pangkat pegawai	Terpenuhinya salah satu syarat kenaikan pangkat pegawai	100%	Bag. Kepeg, Setda
5	Seleksi pengadaan CPNS Tahun 2009	Tersedianya CPNSD	500 orang	Bag. Kepeg, Setda
6	Pengelolaan sistem Informasi manajemen Kepegawaian	Meningkatnya akurasi data kepegawaian	80%	Bag. Kepeg, Setda
7	Pembuatan kartu pengenalan pegawai	Terpenuhinya identitas	100%	Bag. Kepeg, Setda
8	Diklat fungsional aparatur daerah	Tersedianya pegawai yang akan diangkat menduduki jabatan fungsional	100%	Bag. Kepeg, Setda
9	Pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual bagi pejabat struktural	Meningkatnya kecerdasan emosional dan spritual pejabat struktural	70%	Bag. Kepeg, Setda
10	Peningkatan status kepegawaian	Meningkatnya kinerja SKPD	100%	Bag. Kepeg, Setda
11	Uji kompetensi pegawai	Tersedianya hasil uji kompetensi pegawai	100 orang	Bag. Kepeg, Setda
12	Mutasi pegawai dalam jabatan struktural	Terbitnya SK Mutasi	70%	Bag. Kepeg, Setda
13	Mutasi pegawai dalam jabatan fungsional	Meningkatnya kinerja SKPD	70%	Bag. Kepeg, Setda
	Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Terwujudnya Kinerja Kelembagaan yang Efisien dan Efektif		
1	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Tata Naskah Dinas	Tersedianya pedoman dan pemahaman dalam pembuatan Naskah Dinas	100%	Bag. Ortala, Setda
2	Analisa dan Evaluasi Jabatan SKPD	Tersedianya informasi jabatan SKPD	1 Dok	Bag. Ortala, Setda
3	Penyusunan Standar Operasional Pelayanan SKPD	Terselenggaranya pelayanan sesuai SOP	55%	Bag. Ortala, Setda
4	Evaluasi Kelembagaan	Terselenggaranya pelayanan yang optimal kepada masyarakat		Bag. Ortala, Setda
	Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga	Terciptanya Kerjasama Antar Lembaga		
1	Fasilitasi Desk Pemilu Legislatif dan Presiden RI Tahun 2009	Terbentuknya Desk Pemilu Legislatif dan Presiden RI Tahun 2009	80%	Bag. Pem dan Otda
2	Fasilitasi Kerjasama Antar Lembaga	Terwujudnya kerjasama antar lembaga	12 bulan	Bag. Pem dan Otda
	Pengelolaan dan Pengembangan Aset Daerah	Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah		
1	Monitoring dan Evaluasi Ijin Lokasi	20 ijin lokasi yan telah dikeluarkan	80%	Bag. Pem dan Otda
2	Sertifikasi Asset Tanah	Aset tanah milik Pemerintah Kota Depok berlandaskan hukum	75%	Bag. Aset, Setda
3	Fasilitasi Penyerahan Fasos Fasum	Data Fasos Fasum Se Kota Depok	2 buku	Bag. Aset, Setda
4	Penilaian Aset Kota Depok	Buku Penilaian Aset Kota Depok	5 Buku	Bag. Aset, Setda
5	Sosialisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Barang Milik Daerah	80%	Bag. Aset, Setda
6	Pengawasan Barang Daerah	Terlaksananya Pengawasan Barang Daerah	80%	Bag. Aset, Setda
7	Inventarisasi Barang Daerah	Buku Barang Daerah se Kota Depok	5 buku%	Bag. Aset, Setda
	Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah	Terwujudnya Kualitas Produk hukum		
1	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Adanya landasan yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	70%	Bag. Hukum, Setda
2	Penyediaan layanan advokasi bagi aparatur	Tertanganinya permasalahan Hukum	70%	Bag. Hukum, Setda
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Evaluasi Kinerja Kecamatan	Terciptanya kompetisi kinerja antar kecamatan se Kota Depok	80%	Bag. Pem dan Otda
2	Monitoring dan Pengendalian Bantuan Gubernur untuk Kecamatan dan Kelurahan	Terealisasinya bantuan Gubernur Jabar sesuai saran	80%	Bag. Pem dan Otda
3	Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LKPJ, LAKIP dan ILPPD	Terlaksananya pelaporan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Depok	400 buku	Bag. Pem dan Otda
4	Fasilitasi TAPD dalam Penyusunan RAPBD		60%	Bag. Pembangunan, Setda
5	Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Meningkatnya kualitas penyedia/barang/jasa	20%	Bag. Pembangunan, Setda
6	Penyusunan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	Meningkatnya kualitas penyedia/barang/jasa	20%	Bag. Pembangunan, Setda
7	Sosialisasi Peraturan Penyedia Barang/Jasa	Meningkatnya kualitas penyedia/barang/jasa	20%	Bag. Pembangunan, Setda
8	Penyusunan Pedoman Administrasi Kegiatan	Meningkatnya kualitas penyedia/barang/jasa	20%	Bag. Pembangunan, Setda
9	Evaluasi Administrasi penyaluran Bantuan Stimulan pembangunan Kota Depok	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Depok	40%	Bag. Pembangunan, Setda
10	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan DAK	Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi kegiatan DAK tahun 2009	1 buku laporan	Bag. Pembangunan, Setda
11	Pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan kota Depok	Terlaksananya data pelaksanaan kegiatan pembangunan kota Depok		Bag. Pembangunan, Setda

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
12	Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan APBD Kota Depok	Tersusunnya bahan pertimbangan/ evaluasi pelaksanaan kegiatan TA. 2009	40%	Bag. Pembangunan, Setda
13	Fasilitasi Tim Koordinasi Tugas Pembantuan	Terealisasinya tugas pembantuan di Kota Depok sesuai sasaran	80%	Bag. Pem dan Otda
14	Forum SKPD dan penyusunan Rencana Kerja 2010	Terkoordinasikannya perencanaan kegiatan lingkup sekretariat daerah dan tersedianya Renja Setda tahun 2010	1 keg, 1 dok	Bag. Ortala, Setda
15	Kajian Pemekaran Kelurahan	Terealisasinya hasil kajian tentang pemekaran kelurahan	15 Dok	Bag. Pem dan Otda
Peningkatan Produktifitas Usaha Koperasi dan UKM		Meningkatnya Pendapatan Anggota Koperasi dan UKM		
1	Pendirian BPR Kota Depok	Berdirinya BPR Kota Depok	75%	Bag. Ekonomi, Setda
2	Penyusunan Kebijakan Revitalisasi Koperasi di Kota Depok	Tersedianya dokumen kajian kebijakan revitalisasi Kota Depok	20 buku	Bag. Ekonomi, Setda
3	Perumusan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Mikro dan Menengah Kota Depok	Tersedianya dokumen perumusan kebijakan pengembangan ekonomi mikro dan menengah Kota Depok	30 buku	Bag. Ekonomi, Setda
Peningkatan Daya Tarik Investasi		Terwujudnya Kepastian Hukum Bagi Investor		
1	Penyusunan peta produksi Kota Depok	Tersedianya dokumen peta produksi Kota Depok	25 buku	Bag. Ekonomi, Setda
2	Kajian Keterkaitan Ekonomi Kota Depok dengan Wilayah Sekitarnya	Tersedianya dokumen Kajian Keterkaitan Ekonomi Kota Depok dengan Wilayah Sekitarnya	25 buku	Bag. Ekonomi, Setda
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah		Tersedianya data dan informasi keuangan yang akurat		
1	Penyusunan standar satuan harga dan analisa belanja kegiatan Kota Depok	Tersedianya pedoman harga satuan dan analisa belanja penyusunan RKA dan SKPD	60%	Bag. Pembangunan, Setda
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera		Meningkatnya Kualitas Masyarakat		
1	Penyusunan Juklak Bantuan Kegiatan Sosial			Bag. Sosial, Setda
Peningkatan Tertib Sosial		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Penegakan Perda		
1	Penyuluhan Hukum (Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan)	Masyarakat memahami produk hukum daerah	70%	Bag. Hukum, Setda
2	Publikasi peraturan perundang-undangan	Tersedianya lembaran daerah dan berita daerah, tersedianya liflet perda dan CD file	2500 buku, 1500 lembar, 500 CD	Bag. Hukum, Setda
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama		Meningkatkan Pemahaman, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama		
1	Penunjang Bantuan Sarana & Kegiatan Keagamaan	Terselenggarakannya Bantuan Stimulan Kepada Masyarakat	70%	Bag. Sosial, Setda
2	Pengiriman MTQ Tk. Prov. Jabar 2009	Meningkatnya apresiasi dan minat baca Al Qur'an pada masyarakat Kota Depok	70%	Bag. Sosial, Setda
3	MTQ Tk. Kota 2009	Meningkatnya apresiasi dan minat baca Al Qur'an pada masyarakat Kota Depok	70%	Bag. Sosial, Setda
4	Peringatan Hari Besar Islam Tingkat Kota Depok	Terselenggarakannya Syiar Islam di Kota Depok	70%	Bag. Sosial, Setda
5	Fasilitasi Pemberangkatan Haji Kota Depok Tahun 2009	Terselenggarakannya Haji Kota Depok	70%	Bag. Sosial, Setda
6	Pembinaan Mental Pegawai	Tercapainya jalinan komunikasi terbuka antara ulama umaro dan masyarakat	80%	Bag. Sosial, Setda
7	Pendataan Sarana Keagamaan	Tersedia data yang akurat tentang jumlah sarana keagamaan	80%	Bag. Sosial, Setda
Peningkatan Prestasi Olah Raga		Meningkatnya Prestasi Olah raga		
1	Peringatan Hari Besar Nasional	Terselenggarakannya kegiatan PHBN Tahun 2009	100%	Bag. Sosial, Setda
Urusan :		Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
SKPD :		Sekretariat DPRD		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Memperlancar komunikasi dan penerangan bangunan kantor	100%	Set DPRD
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tercapainya kebutuhan kebersihan dan keamanan kantor DPRD Kota Depok	100%	Set DPRD
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Menunjang aktivitas kantor	100%	Set DPRD
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Menunjang aktivitas kantor	100%	Set DPRD
5	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Menunjang aktivitas kantor	100%	Set DPRD
6	Penyediaan Makan dan Minum	Terwujudnya penyediaan makan dan minum	100%	Set DPRD
7	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah Sekretariat DPRD	Sebagai bahan penyusunan kebijakan sekretariat DPRD	100%	Set DPRD
8	Penyediaan Sarana Informasi	Meningkatnya sarana informasi	100%	Set DPRD
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya pemeliharaan kondisi gedung	85%	Set DPRD
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Memperlancar kegiatan	100%	Set DPRD
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Meningkatkan kondisi peralatan kantor	100%	Set DPRD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya Disiplin Aparatur		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tercapainya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	Set DPRD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tertib administrasi keuangan secara akuntabel	100%	Set DPRD
Peningkatan Manajemen Pelayanan		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya perlengkapan gedung kantor	100%	Set DPRD
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Keluarganya	Memberikan jaminan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok beserta keluarga	100%	Set DPRD

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Menunjang pengetahuan aparatur dan anggota DPRD	100%	Set DPRD
Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah melalui Diklat Struktural dan Fungsional		Meningkatnya Profesionalitas SDM Pemerintahan Daerah		
1	Pengembangan SDM Pegawai Melalui Workshop, Seminar, Semiloka dan lain-lain	Menambah wawasan dan pengetahuan aparatur sekretariat DPRD	100%	Set DPRD
Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga		Terciptanya Kerjasama Antar Lembaga		
1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan Luar Daerah Komisi A DPRD Kota Depok	Terdapatnya bahan rekomendasi DPRD untuk kebijakan pemerintah daerah	75%	Set DPRD
2	Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan Luar Daerah Komisi B DPRD Kota Depok	Terdapatnya bahan rekomendasi DPRD untuk kebijakan pemerintah daerah	75%	Set DPRD
3	Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan Luar Daerah Komisi C DPRD Kota Depok	Terdapatnya bahan rekomendasi DPRD untuk kebijakan pemerintah daerah	75%	Set DPRD
4	Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan Luar Daerah Komisi D DPRD Kota Depok	Terdapatnya bahan rekomendasi DPRD untuk kebijakan pemerintah daerah	75%	Set DPRD
5	Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan Luar Daerah Badan Kehormatan DPRD Kota Depok	Terdapatnya bahan rekomendasi DPRD untuk kebijakan pemerintah daerah	75%	Set DPRD
6	Kunjungan Kerja Luar Daerah Panitia Musyawarah DPRD Kota Depok	Terdapatnya bahan rekomendasi DPRD untuk kebijakan pemerintah daerah	75%	Set DPRD
7	Rapat dan Kunjungan Kerja Luar Daerah Panitia Anggaran	Sebagai bahan kebijakan dalam penetapan anggaran Pemerintah Kota Depok	75%	Set DPRD
8	Kunjungan Kerja Luar Daerah Panitia Legislasi DPRD Kota Depok	Terdapatnya bahan rekomendasi untuk kebijakan DPRD dalam pembentukan produk-produk hukum daerah	75%	Set DPRD
9	Fasilitasi dan Mendampingi Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD	Terlaksananya kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke pemerintah daerah lainnya	75%	Set DPRD
Peningkatan Peran dan Fungsi Legislatif		Terwujudnya Peran dan Fungsi Legislatif		
1	Rapat Kerja DPRD dan Pembahasan Rencana Kegiatan Dengan SKPD TA 2010	Terlaksananya rapat kerja DPRD dan pembahasan rencana kegiatan dengan SKPD TA 2009	100%	Set DPRD
2	Fasilitasi Kegiatan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok	Terlaksananya pembahasan APBD dan rapat kerja DPRD Kota Depok	100%	Set DPRD
3	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatnya kinerja pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok	100%	Set DPRD
4	Rapat dan Kunjungan Kerja Pansus LKPJ DPRD Kota Depok	Sebagai bahan kebijakan pemerintah daerah	100%	Set DPRD
5	Protokol Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok	Meningkatnya pelayanan protokoler terhadap pimpinan dan anggota DPRD	80%	Set DPRD
6	Kegiatan Reses DPRD Kota Depok	Tersebarannya aspirasi masyarakat sebagai bahan pokok-pokok pikiran DPRD terhadap rencana kerja pembangunan Kota Depok	100%	Set DPRD
7	Fasilitasi dan Mendampingi Kegiatan Pansus -Pansus DPRD Kota Depok	Terlaksananya kunjungan kerja dan pembahasan pansus-pansus DPRD Kota Depok	80%	Set DPRD
8	Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota Depok	Tersedianya informasi kegiatan DPRD	100%	Set DPRD
9	Penyusunan Risalah Rapat	Tersedianya himpunan buku risalah rapat	100%	Set DPRD
10	Rapat dan Kunjungan Kerja Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD Kota Depok	Sebagai bahan kebijakan pemerintah daerah	100%	Set DPRD
11	Rapat dan Kunjungan Kerja Pansus Asset DPRD Kota Depok	Sebagai bahan kebijakan pemerintah daerah	100%	Set DPRD
Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah		Terwujudnya Kualitas Produk hukum		
1	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat	80%	Set DPRD
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan		Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Peyusunan Rencana Kerja dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Depok	Terseleenggaranya kegiatan	100%	Set DPRD
Urusan :		Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
SKPD :		Inspektorat Daerah		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya komunikasi kerja, penerangan kerja dan sumberdaya air pendukung kerja	100%	Inspektorat
2	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor dan Keamanan kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa pendukung administrasi perkantoran non PNS	100%	Inspektorat
3	Penyedia Alat Tulis Kantor	Meningkatnya ketatalaksanaan kantor	70%	Inspektorat
4	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya arsip-arsip kantor	100%	Inspektorat
5	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Menambah kapasitas dan kelancaran penerangan kantor	70%	Inspektorat
6	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Meningkatnya pelaksanaan ketatalaksanaan kantor	70%	Inspektorat
7	Penyedia Makanan dan Minuman	Meningkatnya pelayanan bagi pegawai dan tamu	100%	Inspektorat
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Meningkatnya koordinasi tentang pengawasan	70%	Inspektorat
9	Penyedia Sarana Informasi	Meningkatnya pengetahuan dan informasi pegawai	70%	Inspektorat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dapat digunakannya kendaraan dinas penunjang pengawasan	100%	Inspektorat
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	70%	Inspektorat
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Meningkatnya tertib pelaporan keuangan	70%	Inspektorat
Peningkatan Manajemen Pelayanan		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya pelaksanaan ketatalaksanaan kantor	70%	Inspektorat

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
Peningkatan Kualitas Pengawasan				
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala/Reguler	Meningkatnya Kinerja & Disiplin Aparatur Tersusunnya laporan hasil pemriksaan (LHP)	38 LHP	Inspektorat
2	Pemeriksaan Khusus	Berkurangnya pelanggaran peraturan oleh aparat	30%	Inspektorat
3	Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Meningkatnya kesadaran audit menindaklanjuti temuan hasil pengawasan	70%	Inspektorat
4	Bimbingan Teknis Auditor Pengadaan Barang dan Jasa	Bertambahnya pengetahuan aparat pengawasan dalam mengaudit pengadaan barang dan jasa	70%	Inspektorat
5	Bimbingan Teknis Audit Pendapatan Asli Daerah	Bertambahnya pengetahuan aparat pengawasan dalam mengaudit PAD	70%	Inspektorat
6	Bimbingan Teknis Audit Sarana dan Prasarana	Bertambahnya pengetahuan aparat pengawasan dalam mengaudit Sarana Prasarana	70%	Inspektorat
7	Review Laporan Keuangan pemerintah Kota	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintah Kota	70%	Inspektorat
8	Sosialisasi Kormonev	Meningkatnya ketaatan aparat terhadap peraturan	70%	Inspektorat
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan				
1	Pelaksanaan Penyusunan Renja SKPD	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan	70%	Inspektorat
Urusan :		Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
SKPD :		Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya komunikasi kerja, penerangan kerja dan sumberdaya air pendukung kerja	100%	DPPK
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kebersihan kantor yang memenuhi standar kenyamanan kantor	100%	DPPK
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	100%	DPPK
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dimanfaatkannya barang cetak untuk menunjang kegiatan dinas	100%	DPPK
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dimanfaatkannya peralatan rumah tangga untuk menunjang kegiatan dinas	100%	DPPK
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan rapat	100%	DPPK
7	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Lancarnya kegiatan Rapat Koordinasi dan konsultasi	100%	DPPK
8	Penyediaan sarana informasi			DPPK
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Dimanfaatkannya kendaraan dinas untuk menunjang kegiatan dinas	100%	DPPK
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dimanfaatkannya perlengkapan kantor untuk menunjang kegiatan dinas	100%	DPPK
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Dimanfaatkannya laporan sebagai bahan pengambil kebijakan	100%	DPPK
Peningkatan Manajemen Pelayanan				
1	Pengadaan Barang Inventaris Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Barang Inventaris Kantor	100%	DPPK
2	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)	Diaplikasikannya SIMPAD	100%	DPPK
3	Pemeliharaan PBB On line	Meningkatnya pelayanan pembayaran PBB Online	75%	DPPK
4	Pengembangan Aplikasi SIMPAD (data potensi pajak restoran)	Meningkatnya kualitas administrasi sistem dan prosedur PAD	75%	DPPK
5	Pengelolaan Bantuan Sosial/Hibah	Terselurkannya bantuan keuangan kepada masyarakat	70%	DPPK
6	Kajian Akademik Revisi Perda Pajak dan retribusi Daerah			DPPK
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan				
1	Pelaksanaan Forum SKPD	Terprogramnya Rencana Kerja	100%	DPPK
2	Penelitian DPA Kota Depok	Tersusunnya DPA TA 2008 sbg bahan acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2009 dan 2010	100%	DPPK
3	Penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas	Terprogramnya Rencana Kerja	100%	DPPK
4	Penyusunan Perubahan KUA 2009, Penyusunan KUA 2010, Penyusunan Perubahan PPAS 2009 dan Penyusunan PPAS 2010.	Tersedianya buku perubahan KUA 2009 dan PPAS 2009, tersedianya buku KUA dan PPAS 2010	120 buku, 120 buku	DPPK
Peningkatan Pendapatan Daerah				
1	Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Terpenuhinya laporan evaluasi penerimaan pendapatan daerah	100%	DPPK
2	Penyusunan Revisi Peraturan Daerah Pajak Daerah	Revisi peraturan daerah pajak daerah	100%	DPPK
3	Bimbingan Teknis Audit Pajak Daerah	Meningkatnya pemahaman tentang audit pajak daerah	75%	DPPK
Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah				
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan daerah tentang perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD.	Tersedianya pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	10 Dok	DPPK
2	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	80%	DPPK
3	Inventarisasi dan sinkronisasi data gaji pegawai	Meningkatnya pelayanan inventarisasi dan sinkronisasi data pegawai se Kota Depok	80%	DPPK
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Depok	Tersedianya buku laporan semesteran keuangan daerah Kota Depok	2 buku	DPPK
5	Penyempurnaan Penyusunan Kebijakan akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan keuangan yang sesuai dengan SAP	31 SKPD	DPPK

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	Tersedianya buku raperda pertanggungjawaban APBD	1 buku	DPPK
7	Pengelolaan dan Penatausahaan Penerbitan Surat Pencairan Belanja SKPD	Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan daerah	80%	DPPK
8	Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Depok	Tersedianya pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	1 buku	DPPK
9	Penelitian RKA	Tersedianya bahan penyusunan RAPBD	2 laporan	DPPK
<p>Urusan : Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</p> <p>SKPD : Kec. Beji</p>				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Kec. Beji
2	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	Kec. Beji
3	Penyedia Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	Kec. Beji
4	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Kec. Beji
5	Penyedia komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Penyedia komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	100%	Kec. Beji
6	Penyedia Peralatan rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan Penyedia Peralatan rumah Tangga	100%	Kec. Beji
7	Penyedia Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Penyedia Makanan dan Minuman Rapat	100%	Kec. Beji
8	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya biaya Rapat-Rapat Koordinasi	100%	Kec. Beji
9	Penyediaan Sarana Informasi	Tersedianya Sarana Informasi	100%	Kec. Beji
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100%	Kec. Beji
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan bermotor	100%	Kec. Beji
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100%	Kec. Beji
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Meningkatnya kualitas sistem Pelaporan Keuangan Semesteran	100%	Kec. Beji
Peningkatan Manajemen Pelayanan		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Pengadaan Mebeuler	Tersedianya Mebeuler	100%	Kec. Beji
2	Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat perlengkapan kantor	100%	Kec. Beji
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan		Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	Tersusunnya usulan kegiatan pembangunan Tahun 2009	100%	Kec. Beji
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup		Menurunnya Pencemaran Lingkungan		
1	Pelaksanaan Program K3	Terwujudnya lingkungan yang aman, tertib dan bersih	100%	Kec. Beji
<p>Urusan : Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</p> <p>SKPD : Kec. Cimanggis</p>				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Kec. Cimanggis
2	Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	100%	Kec. Cimanggis
3	Penyedia Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	Kec. Cimanggis
4	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Kec. Cimanggis
5	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Penyedia komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor	100%	Kec. Cimanggis
6	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan Penyedia Peralatan rumah Tangga	100%	Kec. Cimanggis
7	Penyedia Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Penyedia Makanan dan Minuman Rapat	100%	Kec. Cimanggis
8	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terpenuhinya biaya Rapat-Rapat Koordinasi	100%	Kec. Cimanggis
9	Penyediaan Sarana Informasi	Tersedianya Sarana Informasi	100%	Kec. Cimanggis
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100%	Kec. Cimanggis
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya kendaraan bermotor	100%	Kec. Cimanggis
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100%	Kec. Cimanggis
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Meningkatnya kualitas sistem Pelaporan Keuangan Semesteran	100%	Kec. Cimanggis
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan		Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Pelaksanaan Musrenbang	Tersusunnya usulan kegiatan pembangunan Tahun 2009	100%	Kec. Cimanggis
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup		Menurunnya Pencemaran Lingkungan		
1	Pelaksanaan Program K3	Terwujudnya lingkungan yang aman, tertib dan bersih	100%	Kec. Cimanggis

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
Urusan : SKPD :		Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kec. Limo		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya kebutuhan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Kec. Limo
2	Penyedia Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor	Terpenuhiya kebutuhan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	100%	Kec. Limo
3	Penyedia Alat Tulis Kantor	Terpenuhiya kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	Kec. Limo
4	Penyedia Barang cetakan dan Penggandaan	Terpenuhiya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Kec. Limo
5	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhiya kebutuhan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Kec. Limo
6	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhiya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	Kec. Limo
7	Penyedia Makanan dan Minuman	Terpenuhiya kebutuhan Makanan dan Minuman	100%	Kec. Limo
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terseleenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	100%	Kec. Limo
9	Penyediaan Sarana Informasi	Terpenuhiya kebutuhan sarana Informasi	100%	Kec. Limo
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya kendaraan bermotor	100%	Kec. Limo
2	Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan gedung Kantor	Terpenuhiya perlengkapan gedung kantor	100%	Kec. Limo
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran	100%	Kec. Limo
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan		Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Musrenbang Kecamatan dan kelurahan	Tersusunnya usulan kegiatan pembangunan tahun 2009	100%	Kec. Limo
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup		Menurunnya Pencemaran Lingkungan		
1	Kebersihan, Ketertiban, Keindahan	Terciptanya lingkungan yang aman, tertib dan bersih	100%	Kec. Limo
Urusan : SKPD :		Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kec. Pancoran Mas		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya Kebutuhan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Kec. Pancoran Mas
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Terpenuhiya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	100%	Kec. Pancoran Mas
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhiya kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	Kec. Pancoran Mas
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhiya Kebutuhan Barang Cetak dan Pengadaan	100%	Kec. Pancoran Mas
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhiya Kebutuhan Listrik/Penerangan	100%	Kec. Pancoran Mas
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhiya kebutuhan peralatan rumah tangga	100%	Kec. Pancoran Mas
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhiya makanan dan minuman	100%	Kec. Pancoran Mas
8	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Terseleenggaranya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi	100%	Kec. Pancoran Mas
9	Penyediaan Sarana Informasi	Terpenuhiya Kebutuhan Sarana Informasi	100%	Kec. Pancoran Mas
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpenuhiya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	Kec. Pancoran Mas
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhiya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan bermotor	100%	Kec. Pancoran Mas
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhiya Kebutuhan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	100%	Kec. Pancoran Mas
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Dokumen Keuangan Semesteran	100%	Kec. Pancoran Mas
Peningkatan Manajemen Pelayanan		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Terpenuhiya Kebutuhan Perlengkapan Kantor	100%	Kec. Pancoran Mas
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan		Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Musyawarah Rencana Pembangunan	Terlaksananya Pembangunan di Kec. Pancoran Mas	100%	Kec. Pancoran Mas
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup		Menurunnya Pencemaran Lingkungan		
1	Pelaksanaan Program K3	Terpenuhiya Kegiatan Program K3	100%	Kec. Pancoran Mas
Urusan : SKPD :		Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kec. Sawangan		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya kebutuhan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Kec. Sawangan
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Terpenuhiya kebutuhan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	100%	Kec. Sawangan
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhiya kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	Kec. Sawangan
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhiya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Kec. Sawangan
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	Terpenuhiya kebutuhan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Kec. Sawangan
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhiya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	Kec. Sawangan
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhiya kebutuhan Makanan dan Minuman	100%	Kec. Sawangan
8	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terseleenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	100%	Kec. Sawangan

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor	100%	Kec. Sawangan
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan bermotor	100%	Kec. Sawangan
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	100%	Kec. Sawangan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya Dokumen Keuangan Semesteran	100%	Kec. Sawangan
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Pelaksanaan Musrenbang	Tersusunnya usulan kegiatan pembangunan tahun 2009	100%	Kec. Sawangan
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menurunnya Pencemaran Lingkungan		
1	Pelaksanaan Program K3	Terciptanya lingkungan yang aman, tertib dan bersih	100%	Kec. Sawangan
	Urusan : SKPD :	Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kec. Sukmajaya		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyedia Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Kec. Sukmajaya
2	Penyedia Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	100%	Kec. Sukmajaya
3	Penyedia Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	Kec. Sukmajaya
4	Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Kec. Sukmajaya
5	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Kec. Sukmajaya
6	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	Kec. Sukmajaya
7	Penyedia Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman	100%	Kec. Sukmajaya
8	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi	100%	Kec. Sukmajaya
9	Penyedia sarana Informasi	Terpenuhinya kebutuhan Informasi	100%	Kec. Sukmajaya
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung tempat kerja	100%	Kec. Sukmajaya
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan bermotor	100%	Kec. Sukmajaya
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor	100%	Kec. Sukmajaya
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersedianya dok laporan keuangan semesteran	100%	Kec. Sukmajaya
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan	Tersusunnya usulan kegiatan pembangunan tahun 2009	100%	Kec. Sukmajaya
	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Menurunnya Pencemaran Lingkungan		
1	Pelaksanaan Program K3	Terciptanya lingkungan yang aman, tertib dan bersih	100%	Kec. Sukmajaya
	Urusan : SKPD :	Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Satuan Polisi Pamong Praja		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Tersedianya sarana komunikasi	100%	Sat Pol PP
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	100%	Sat Pol PP
3	Penyediaan alat tulis kantor.	Terpenuhinya kelancaran administrasi perkantoran	100%	Sat Pol PP
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Terpenuhinya dokumen administrasi perkantoran	100%	Sat Pol PP
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Terpenuhinya penerangan kantor	100%	Sat Pol PP
6	Penyediaan peralatan rumah tangga.	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	100%	Sat Pol PP
7	Penyediaan makanan dan minuman.	Terpenuhinya jaman makanan dan minuman	100%	Sat Pol PP
8	Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah.	Terpenuhinya kelancaran tugas dinas	100%	Sat Pol PP
9	Penyediaan sarana informasi.	Terpenuhinya pelayanan informasi Satpol PP	100%	Sat Pol PP
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor.	Terwujudnya Kenyamanan Kerja Aparatur	100%	Sat Pol PP
2	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional.	Terwujudnya kelancaran tugas kantor	100%	Sat Pol PP
3	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor.	Terwujudnya kenyamanan kerja	100%	Sat Pol PP
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Sat. Pol. PP. beserta Perlengkapannya	Tewujudnya keseragaman dan keserasian pakaian dinas	100%	Sat Pol PP
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terwujudnya laporan keuangan	100%	Sat Pol PP

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Meningkatnya pelayanan kantor	100%	Sat Pol PP
2	Penyediaan Jasa Piket.	Terwujudnya keamanan kantor		Sat Pol PP
3	Pengadaan HT dan RIG	Meningkatnya komunikasi bagi anggota Satpol PP	100%	Sat Pol PP
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Penyelenggaraan Forum SKPD.	Terlaksananya penyelenggaraan Forum SKPD	100%	Sat Pol PP
	Peningkatan Tertib Sosial			
1	Pelatihan Penanggulangan Huru-Hara	Terciptanya kemampuan anggota Sat Pol PP		Sat Pol PP
2	Fasilitas Pengamanan dan Pengawasan Pemerintah Kota Depok	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam kegiatan yang dilaksanakan	80%	Sat Pol PP
3	Penerbitan PSK, Anak Jalanan dan Gepeng	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam kegiatan yang dilaksanakan	75%	Sat Pol PP
4	Fasilitas HUT Sat. Pol. PP. Kota Depok	Terlaksananya HUT Pol PP		Sat Pol PP
5	Penerbitan PKL, Bangunan Liar dan Perijinan	Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam kegiatan yang dilaksanakan	75%	Sat Pol PP
6	Pengamanan Pilpres dan Legislatif			Sat Pol PP
7	Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Anggota Sat. Pol. PP.			Sat Pol PP
8	Penyuluhan Perda Kota Depok dan Pendataan Pelanggar Perda			Sat Pol PP
9	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan PPNS			Sat Pol PP
	Urusan :	Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kpegawaian dan Persandian		
	SKPD :	Dinas Pemadam Kebakaran		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air, listrik dan telepon	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, telpon	100%	Dinas Damkar
2	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor	Meningkatnya kebersihan dan keamanan kantor	100%	Dinas Damkar
3	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Dinas Damkar
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	Dinas Damkar
5	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Teroenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	100%	Dinas Damkar
6	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	100%	Dinas Damkar
7	Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya keikutsertaan dalam Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	Dinas Damkar
8	Penyediaan sarana informasi	Terpenuhinya sarana informasi	100%	Dinas Damkar
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Meningkatnya Pemafaatan gedung kantor	100%	Dinas Damkar
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional lapangan	Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional	100%	Dinas Damkar
3	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	100%	Dinas Damkar
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		
1	Pengadaan pakaian kerja harian staf dan petugas operasional pemadam kebakaran	Meningkatnya disiplin aparat	100%	Dinas Damkar
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terpenuhinya laporan keuangan yang akuntabel	100%	Dinas Damkar
	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Pembangunan Lanjutan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sektor Pemadam Kebakaran	Meningkatnya pelayanan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat	100%	Dinas Damkar
2	Pembangunan gedung Kantor Pemadam Kebakaran (lanjutan/finishing)	Tersedianya kantor pemadam kebakaran yang memadai	100%	Dinas Damkar
3	Pengadaan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung	Meningkatnya manajemen pelayanan	100%	Dinas Damkar
4	Pengadaan Pompa Portable	Tersedianya pompa portable	1 unit	Dinas Damkar
5	Pengadaan APAR untuk SKPD dan Kecamatan se Kota Depok	Meningkatnya manajemen pelayanan	100%	Dinas Damkar
6	Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Kesempatan bagi Anggota Pemadam	Tersedianya petugas operasional pemadam kebakaran yang memadai	100%	Dinas Damkar
7	Pengadaan Perlengkapan Kendaraan Operasional Pemadam	Meningkatnya rasio perlengkapan kendaraan operasional 1:2	100%	Dinas Damkar
8	Pengadaan jaket tahan panas dan perlengkapan keselamatan kerja petugas operasional pemadam kebakaran	Meningkatnya rasio perlengkapan kendaraan operasional 1:2	100%	Dinas Damkar
9	Pengadaan alat komunikasi dan RIG Mobil	Meningkatnya pelayanan pemadaman	100%	Dinas Damkar
10	Pengadaan mobil komando pemadam kebakaran	Meningkatnya manajemen pelayanan	100%	Dinas Damkar
11	Pengadaan Jaket dan Perlengkapan Petugas Operasional Penyelamat	Meningkatnya manajemen pelayanan	100%	Dinas Damkar
12	Pengadaan Lahan/Tanah untuk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Sektor Pemadam Kebakaran	Terrealisasinya pembangunan UPT/sector pemadam kebakaran	100%	Dinas Damkar
13	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Dinas Damkar
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Penyelenggaraan Forum SKPD	Terjaringnya aspirasi masyarakat sebagai pengguna layanan	100%	Dinas Damkar
	Penanggulangan Bencana	Tertanggulangnya Bencana		

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
1	Operasional Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya	Meningkatnya pelayanan kebakaran	100%	Dinas Damkar
2	Kajian dan Penyusunan Draft Raperda pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Tersusunnya perda penanggulangan bahaya kebakaran	100%	Dinas Damkar
3	Pelatihan satuan relawan Kebakaran (SATLAKAR)	Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran	100%	Dinas Damkar
4	Penyuluhan Mitigasi bencana kebakaran dan bencana lainnya			Dinas Damkar
5	Pembuatan Sistem Komunikasi Informasi Kebakaran / Smart Alarm System	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana kebakaran	100%	Dinas Damkar
Urusan :		Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
SKPD :		Badan Pelayanan Perijinan Terpadu		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, telpon	100%	BPPT
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	BPPT
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	BPPT
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Teroenuhinya kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	BPPT
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	100%	BPPT
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya keikutsertaan dalam Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	BPPT
7	Penyediaan Sarana Informasi	Terpenuhinya sarana informasi		BPPT
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional	Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional	100%	BPPT
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Terpenuhinya laporan keuangan yang akuntabel	100%	BPPT
Peningkatan Manajemen Pelayanan		Meningkatnya kepuasan masyarakat pengguna layanan		
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Meningkatnya informasi pegawai	40%	BPPT
2	Pengadaan Jaringan komputer	Meningkatnya kinerja apataur	50%	
Urusan :		Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian		
SKPD :		Sekretariat Badan Narkotika Kota		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, telpon	100%	Set BNK
2	Penyediaan alat tulis kantor.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	Set BNK
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	Set BNK
4	Penyediaan peralatan rumah tangga.	Teroenuhinya kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	Set BNK
5	Penyediaan makanan dan minuman.	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	100%	Set BNK
6	Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah.	Terlaksananya keikutsertaan dalam Rapat - rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah		Set BNK
7	Penyediaan sarana informasi.	Terpenuhinya sarana informasi		Set BNK
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional	Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional	100%	Set BNK
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Terpenuhinya laporan keuangan yang akuntabel	100%	Set BNK
Peningkatan Manajemen Pelayanan		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Meningkatnya informasi pegawai	40%	Set BNK
2	Pengadaan Jaringan komputer	Meningkatnya kinerja apataur	50%	Set BNK
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan				
1	Penyuluhan Bahaya narkoba berbasis Masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba	40%	Set BNK
2	Sosialisasi Bahaya Narkoba Berbasis Pelajar dan Pemuda	Meningkatnya kesadaran pelajar dan pemuda akan bahaya narkoba	40%	Set BNK
Urusan :		Ketahanan Pangan		
SKPD :		Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan		
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera		Meningkatnya Kualitas Masyarakat		
1	Teknologi Tepat Guna	Dikenalnya teknologi unggulan Kota Depok	100%	Kantor PMKP
4	Penunjang pelaksanaan dan penyaluran Raskin (Dana talangan Raskin)	Terlaksananya pengurangan beban pengeluaran sebagian RTM melalui beras bersubsidi	63 kel	Kantor PMKP
3	Pemberian Makanan Tambahan	Meningkatnya kebutuhan gizi anak sekolah	60%	Kantor PMKP
4	Fasilitasi Tim POKJA Ketahanan Pangan dan Gizi di Kota Depok	Terciptanya kestabilan pangan yang ada di Kota Depok	65%	Kantor PMKP
Urusan :		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
SKPD :		Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan		

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air, Listrik dan Telepon	Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumberdaya Air, Listrik dan Telepon	100%	Kantor PMKP
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Terpenuhinya Kebersihan dan Keamanan Kantor	100%	Kantor PMKP
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	Kantor PMKP
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Kantor PMKP
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	Kantor PMKP
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	100%	Kantor PMKP
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya kehadiran Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	100%	Kantor PMKP
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya pemeliharaan mobil pejabat dan Kendaraan Bermotor	100%	Kantor PMKP
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Kantor PMKP
3	Penyediaan Gedung Kantor	Terlaksananya sewa Gedung Kantor	100%	Kantor PMKP
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya akuntabilitas keuangan	80%	Kantor PMKP
Peningkatan Manajemen Pelayanan		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatkan dan melancarkan kinerja pegawai dalam pelayanan	40%	Kantor PMKP
2	Pengadaan Meubelair	Meningkatkan dan melancarkan kinerja pegawai dalam pelayanan	100%	Kantor PMKP
3	TOT Monografi Sosial dan Ekonomi Berbasis Masyarakat	Meningkatnya Pemahaman Lurah terhadap Kepentingan Masyarakat	80%	Kantor PMKP
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan		Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Forum SKPD	Tersusunnya Rencana Kegiatan SKPD	80%	Kantor PMKP
	Penyusunan Profil Kelurahan	Meningkatnya keakuratan data kelurahan di Kota Depok	85%	Kantor PMKP
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera		Meningkatnya Kualitas Masyarakat		
1	Penunjang Program Pembangunan Potensi Masyarakat Kelurahan (PPMK)	Meningkatnya partisipasi msyarakat dalam pembangunan	80%	Kantor PMKP
2	Bulan Bhakti Gotong Royong	Meningkatnya peran serta masyarakat dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan	80%	Kantor PMKP
3	Fasilitasi TMMD	Meningkatnya peran serta TNI, Pemerintah dan Masyarakat dalam pembangunan daerah	80%	Kantor PMKP
4	Pelaksanaan Lomba Kelurahan	Meningkatnya kinerja kelurahan	85%	Kantor PMKP
5	Operasional Stimulan RT, RW, LPM, PKK dan Karang Taruna	Meningkatnya pemahaman dan kegiatan administrasi yang baik di tingkat RT,RW, LPM dan Karang Taruna se Kota Depok	63 Kelurahan	Kantor PMKP
6	Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-P2KP)	Melancarkan dan mensukseskan penanggulangan kemiskinan di Kota Depok	70%	Kantor PMKP
7	Pelatihan Usaha Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya kinerja kelompok usaha ekonomi di masyarakat	65%	Kantor PMKP
8	Penunjang Program Kemiskinan Terpadu (Paket P2KP)	Melancarkan dan mensukseskan penanggulangan kemiskinan di Kota Depok	60%	Kantor PMKP
9	Rehabilitasi Sarana Prasarana Olahraga			Kantor PMKP
10	Penunjang Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Meningkatnya kualitas rumah tinggal di Kota Depok	75%	Kantor PMKP
Urusan :		Kearsipan		
SKPD :		Kantor Arsip dan Perpustakaan		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	Kantor Arsip
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi Air dan Listrik	100%	Kantor Arsip
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Kantor Arsip
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100%	Kantor Arsip
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	Kantor Arsip
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman	100%	Kantor Arsip
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terselenggaranya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	Kantor Arsip
8	Penyediaan Sarana Informasi	Terpenuhinya kebutuhan Sarana Informasi	100%	Kantor Arsip
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	100%	Kantor Arsip
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100%	Kantor Arsip
3	Penyediaan Gedung Kantor	Tersedianya Gedung Kantor		Kantor Arsip
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran			Kantor Arsip

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Penyusunan Kajian Arsip Daerah	Tersedianya arsip daerah	100%	Kantor Arsip
2	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Arsip, Perpustakaan	100%	Kantor Arsip
3	Bintek Kearsipan Bagi SKPD	Tertatanya sarana penyimpanan arsip	65%	Kantor Arsip
	Pengembangan Kearsipan, Perpustakaan dan Telematika			
1	Pembuatan DED Perpustakaan	Tersedianya perpustakaan yang terintegrasi di Pemda Kota Depok	80%	Kantor Arsip
2	Penataan dan Klasifikasi Buku perpustakaan			
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Penyelenggaraan Forum SKPD	Tersusunnya Program/kegiatan dinas	100%	Kantor Arsip
	Urusan : SKPD :	Perpustakaan Kantor Arsip dan Perpustakaan		
	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Baik Jalur Sekolah dan Luar Sekolah			
1	Operasional Pelayanan Perpustakaan Keliling	Terselenggaranya layanan operasional perpustakaan di kelurahan dan kecamatan	85%	Kantor Arsip
2	Pengadaan Buku Perpustakaan	Terpenuhinya sarana buku perpustakaan	35%	Kantor Arsip
	Urusan : SKPD :	Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informasi		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Dinas Kominfo
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Dinas Kominfo
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100%	Dinas Kominfo
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	100%	Dinas Kominfo
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman	100%	Dinas Kominfo
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	Dinas Kominfo
7	Penyediaan Sarana Informasi	Terpenuhinya Sarana Informasi	100%	Dinas Kominfo
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Oprasional	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan bermotor	100%	Dinas Kominfo
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	100%	Dinas Kominfo
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Terpenuhinya pelaporan keuangan semesteran	100%	Dinas Kominfo
	Peningkatan Manajemen Pelayanan	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Belanja Modal Peralatan kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	Dinas Kominfo
2	Pengembangan Web site Kota Depok	Bertambahnya content dan keamanan website depok.go.id	100%	Dinas Kominfo
3	Pelatihan SDM TI	Tersedianya SDM TI	100%	Dinas Kominfo
4	Pembuatan SOP Pengelolaan Data			Dinas Kominfo
5	Penyediaan Media Informasi	Terpenuhinya Informasi Depok Dalam CD		Dinas Kominfo
6	Pengadaan Media Elektronik Informasi Pelayanan Publik	Terpenuhinya Informasi Bagi Publik		Dinas Kominfo
	Pengembangan Kearsipan, Perpustakaan dan Telematika	Meningkatnya Kearsipan, Perpustakaan dan Telematika		
1	Pembangunan Jaringan Internet dan Intranet			Dinas Kominfo
	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan			
1	Penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	Terpenuhinya peningkatan kualitas perencanaan dan penandalian pembangunan	100%	Dinas Kominfo
	Urusan : SKPD :	Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Perikanan		
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan	Meningkatnya Produk Pertanian Potensial		
1	Operasional Pelayanan Rumah Pematangan Hewan (RPH) Rangkapanjaya dan Tapos	Meningkatnya pembangunan RPH Tapos	10%	Distan
2	Pembangunan Rumah Potong Unggas Lanjutan	Terbangunnya ruang kotor dan ruang genset	1 unit	Distan
3	Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular serta Pengawasan Mutu Bahan Pangan Asal Ternak	Terkendalinya penyakit hewan menular di Depok, Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta, meningkatnya pengawasan keamanan pangan	100%	Distan
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Pematangan Hewan Tapos	Meningkatnya pembangunan RPH Tapos	10%	Distan
5	Operasional dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Poskeswan dan Check Point	Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan dan lalu lintas ternak	10%	Distan
	Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Meningkatnya Status Gizi Masyarakat		
1	Pelatihan Budidaya Padi, palawija dan sayuran Organik	Terlaksananya pengembangan petani organik	15 Ha padi organik	Distan
	Urusan :	Pertanian		

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
SKPD : Dinas Pertanian dan Perikanan				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan Jasa komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	100%	Distan
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor	100%	Distan
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	Distan
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Distan
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Distan
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	Distan
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman	100%	Distan
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	100%	Distan
9	Penyediaan Sarana Informasi	Terpenuhinya kebutuhan Sarana Informasi	100%	Distan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100%	Distan
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasioanal	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional gedung kantor	100%	Distan
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	100%	Distan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Meningkatnya akurasi pelaporan keuangan	90%	Distan
Peningkatan Manajemen Pelayanan		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor			
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan		Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Forum SKPD dan Penyusunan Renja	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pertanian	90%	Distan
Perencanaan, Pengendalian, dan Pemanfaatan Ruang & Bangunan		Meningkatnya Produk Potensial		
1	SIG Tematik Bidang Pertanian	Tersedianya SIG tematik bidang pertanian	1 paket	Distan
Pengembangan Agribisnis Perkotaan		Meningkatnya Produk Potensial		
1	Penyuluhan Petani	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani	30%	Distan
2	Pelatihan Budidaya Peternakan	Terlatihnya peternak sapi perah melalui pelatihan bintek budidaya ternak, meningkatnya kegiatan budidaya peternakan	30 orang, 10%	Distan
3	Fasilitasi Pusat Informasi dan Promosi TPPH	Terbangunnya pagar kantor hortikultura, terfasilitasinya informasi pasar hortikultura, Terfasilitasinya pertemuan kelembagaan pasar dan UKM olahan, terfasilitasinya pameran/prolisi TPPH	1 unit 115 m, 1 tahun, 2 komoditas UKM olahan 3 kali, 1 kali	Distan
4	Pelatihan Budidaya Hortikultura dan Pengadaan Bibit Tanaman	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi hortikultura		Distan
5	Penyelenggaraan Hari Krida Pertanian (HKP)	Meningkatnya jaringan pemasaran bagi pelaku agribisnis perkotaan	10%	Distan
Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera		Meningkatnya Kualitas Masyarakat		
1	Pemberdayaan Usaha Tani dan Wanita Tani untuk Penanggulangan Kemiskinan	Meningkatnya kemampuan wirausaha kelompok orang miskin	50%	Distan
Urusan : Kelautan dan Perikanan				
SKPD : Dinas Pertanian dan Perikanan				
Pengembangan Agribisnis Perkotaan		Meningkatnya Produk Potensial		
1	Pembangunan Balai Benih Ikan Tahap 1	Tersedianya pembangunan balai benih ikan	1 unit	Distan
2	Pelatihan dan Promosi Ikan Hias dan Ikan Konsumsi	Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan wawasan petani ikan hias dan ikan konsumsi, terpromosikannya ikan hias di Kota Depok	60 orang, 15 %	Distan
Urusan : Energi dan Sumberdaya Mineral				
SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan		Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Pengawasan, Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas LPG	Tersedianya informasi pendistribusian minyak tanah, gas LPG dan SPBU	25%	Dinas Indag
Urusan : Ketahanan Pangan				
SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
Peningkatan Manajemen Pelayanan		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Monitoring Perkembangan Harga dan Ketersediaan Kebutuhan Pokok	Terpenuhinya data perkembangan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok	75%	Dinas Indag
2	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen	10%	Dinas Indag
Urusan : Perdagangan				
SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan				

No	Program/Kegiatan	Sasaran	Target	ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	6
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	Dinas Indag
2	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	Terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	100%	Dinas Indag
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	100%	Dinas Indag
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	Dinas Indag
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100%	Dinas Indag
6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	100%	Dinas Indag
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan Minuman	100%	Dinas Indag
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	Dinas Indag
9	Penyediaan Sarana Informasi	Meningkatnya Informasi	100%	Dinas Indag
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		
1	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100%	Dinas Indag
2	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	100%	Dinas Indag
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100%	Dinas Indag
4	Penyediaan Gedung Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Gedung Kantor	100%	Dinas Indag
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Terukurinya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Dinas Indag
Peningkatan Manajemen Pelayanan		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	Dinas Indag
2	Fasilitasi Tera Ulang Luar Kantor	Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen	30%	Dinas Indag
3	Pelaksanaan Pasar Murah	Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau	10 Komoditi bhn pokok	Dinas Indag
4	Informasi Hasil Kesepakatan Bilateral dan Perkembangan Ekspor Depok	Tersedianya Informasi Hasil Kesepakatan Bilateral dan Perkembangan Ekspor Depok	25 Bukukesepakatan bilateral, 25 buku informasi ekspor	Dinas Indag
5	Sosialisasi Perda perindustrian dan Perdagangan	Terpenuhinya peningkatan PAD	55%	Dinas Indag
6	Sosialisasi dan Pendataan Potensi Gudang	Teridentifikasinya data potensi gudang	50 gudang	Dinas Indag
7	Fasilitasi Pembentukan Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat	Terbentuknya LPKSM	1 LPKSM	Dinas Indag
8	Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol	Terawasinya peredaran MB Gol B dan C	15%	Dinas Indag
9	Pengawasan Potensi Kemetrolgian	Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen	6 Kec	Dinas Indag
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan		Terwujudnya Pembangunan yang Aspiratif		
1	Penyelenggaraan Forum SKPD dan Penyusunan Renja	Meningkatnya kualitas usulan program dinas dan renja dinas	70%	Dinas Indag
2	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya Rencana Strategis Dinas		Dinas Indag
Peningkatan Daya Tarik Investasi				
1	Promosi Potensi Daerah	Meningkatnya Peluang Pasar & Pendapatan Masyarakat	10%	Dinas Indag
Urusan : SKPD :		Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
Pengembangan Usaha Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah		Terwujudnya Sentra Industri Kecil dan Menengah		
1	Pelatihan Teknik Produksi Handycraft dari Kayu	Meningkatnya keterampilan pengusaha IKM kerajinan Meuble dan furniture dari kayu	90%	Dinas Indag
2	Gugus Kendali mutu Industri Kecil	Meningkatnya pemahaman peserta tentang kendali mutu industri kecil tingkat dasar	10 orang	Dinas Indag
3	Kajian Sentra IKM	Terbentuknya sentra IKM	2 sentra IKM	Dinas Indag
4	Kajian Industri Kompetensi (dalam rangka one village one product)	Meningkatnya kualitas produk konveksi kec. Pan Mas	15 orang	Dinas Indag
5	Pelatihan Creation of Enterprisess Formation of Entrepreneur	Terlaksananya Pelatihan CEFE	20 Orang	Dinas Indag
6	Pelatihan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatny kualitas SDM IKM Kota Depok	50%	Dinas Indag
Pengembangan Usaha Perdagangan dan Jasa		Meningkatnya Usaha Perdagangan dan Jasa		
1	Fasilitasi Stabilitas Harga	Terpenuhinya kebutuhan dengan harga terjangkau	50%	Dinas Indag
2	Sosiliasi Pengawasan dan Perijinan Bidang Perdagangan kepada pelaku Usaha			Dinas Indag
3	Profil Perusahaan	Tersedianya data perusahaan yang berbadan hukum	3 bentuk perusahaan	Dinas Indag

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL